



**PEMERINTAH KABUPATEN
FLORES TIMUR**



LAPORAN KINERJA PEMERINTAHAN

KABUPATEN FLORES TIMUR

TAHUN 2023



Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam revisi Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan lain-lain.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efesiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Flores Timur pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance*, dan *Clean Government*.

Larantuka, Maret 2024
BUPATI FLORES TIMUR,
DORIS ALEXANDER RIHI, M.Si



Tekhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023. Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 memiliki 16 (enam belas) sasaran strategis dengan total 42 (empat puluh dua) indikator kinerja, dan 42 (empat puluh dua) target kinerja yang harus dicapai. Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 42 (empat puluh dua) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 15 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 4 target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 19 target; dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 4 target.

Rincian Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

NO	TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)	SKALA ORDINAL
Tujuan I : Terwujudnya daya saing daerah			
Terdapat 3 sasaran dan 17 indikator kinerja			
1.	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	103,73	BAIK SEKALI
2.	Terwujudnya Daya Saing SDM	94,07	BAIK
3.	Terwujudnya Daya Saing Infrastruktur	104,94	BAIK SEKALI
Rata-rata Tujuan I		100,92	BAIK SEKALI
Tujuan II : Terwujudnya Pembangunan Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan			
Terdapat 2 sasaran dan 2 indikator kinerja			
1.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Adil dan Merata	84,96	BAIK
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	99,40	BAIK SEKALI

Rata-rata Tujuan II		92,18	BAIK
Tujuan III : Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas			
Terdapat 6 sasaran dan 18 indikator kinerja			
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat	112,05	BAIK SEKALI
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	108,20	BAIK SEKALI
3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan	83,23	BAIK
4	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	158,25	BAIK SEKALI
5	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender. Penyetaan Perempuan dan Anak	99,83	BAIK SEKALI
6.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah	0,00	N/A
Rata- rata Tujuan III		80,22	BAIK SEKALI
Tujuan IV : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Terdapat 5 sasaran dan 5 indikator kinerja			
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	53,06	KURANG
2.	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	0,00	N/A
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	103,33	BAIK SEKALI
4.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100	BAIK SEKALI
5.	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara	99,25	BAIK SEKALI
Rata-rata Tujuan IV		71,13	CUKUP
Rata-rata Tujuan I – IV		90,28	BAIK SEKALI

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 menunjukkan realisasi sebesar Rp 2.429.418.621.463,- atau 95% dari total pagu anggaran sebesar 2.312.563.149.391,- .

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Flores Timur	2
1.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	16
1.4 Sistematika	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Visi, misi, tujuan dan sasaran strategi Kabupaten Flores Timur	22
2.2 Starategi pembangunan	26
2.3 Arah Kebijakan	29
2.4 Rencana Stategis dan program kegiatan	34
2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)	45
2.6 Perjanjian Kinerja (PK)	58
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran capaian kinerja	67
3.2 Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur	113
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	116
LAMPIRAN	
1. Pernyataan Telah Direviu Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur	
2. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Tahun 2023	
3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
4. Rencana Kinerja Tahunan 2024 Kabupaten Flores Timur	
5. SOP Penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Peta Wilayah Kabupaten Flores Timur	2
1.2 Indek Pembangunan Manusia NTT Tahun 2015 – 2019	11
3.1 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Laporan Keuangan Pemerintah /RKPD Kabupaten FLores Timur tahunn anggaran 2022	112

DAFTAR TABEL

		Halaman
1.1	Jumlah Desa dan Kelurahan serta Luas Kecamatan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2023	3
1.2	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Menurut Kecamatan Tahun 2022	4
1.3	Penduduk Flores Timur Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022	5
1.4	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin, 2022	6
1.5	PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah) Tahun 2018-2022	7
1.6	PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023	8
1.7	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2022	9
1.8	Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022	15
1.9	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2022	15
1.10	Data Jabatan Sturktural menurut Jumlah Jabatan, Jabatan Terisi dan Jabatan Lowong	16
2.1	Srategi Pembangunan pada tujuan dan sasaran RPD Kabpuaten Flores Timur tahun 2023-2026	28
2.2	Arah Kebijakan Pembangunan dari masing-masing strategi pembangunan kabupaten flores timur tahun 2023-2026	31
2.3	Program Prioritas Pembangunan Daerah Baerdasarkan RPD	36
2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Flores Timur	47
2.4	Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Flores Timur	60
3.1	Skala Pengukuran Ordinal	68
3.2	Hasil Pengukuran Atas Pencapaian Kinerja 2023	69
3.3	Sasaran 1 Terwujudnya daya saing ekonomi	72
3.4	Perbandingan realisasi Pertumbuhan PDRB (%) tahun 2021 s.d 2023	73
3.5	PROGRES Indeks Desa Membangun	74
3.6	Sasaran Strategi 2 Terwujudnya daya saing SDM	75
3.7	Perbandingan realisasi Rata-rata lama sekolah tahun 2021 s.d 2023	77

3.8	Perbandingan realisasi Angka Harapan lama sekolah tahun 2021 s.d 2023	78
3.9	Perbandingan realisasi Angka Drop Out/Angka Putus Sekola (APS) tahun 2021 s.d 2023	79
3.10	Perbandingan realisasi Angka Melek Huruf tahun 2021 s.d 2023	81
3.11	Perbandingan realisasi Angka Harapan Hidup tahun 2021 s.d 2023	82
3.12	Perbandingan realisasi Angka Kesakitan (per 100 jiwa) tahun 2021 s.d 2023	83
3.13	Perbandingan realisasi Tingkat pengangguran terbuka tahun 2021 s.d 2023	84
3.14	Sasaran Strategi 3 Terwujudnya daya saing Infrastruktur	84
3.15	Perbandingan Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan pada tingkat Nasional, Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur dari tagun 2021 s/d 2023	85
3.16	Perbandingan Realisasi Persentase jaringan irigasi Kabupaten Flores Timur dari tagun 2021 s/d 2023	87
	Sasaran Strategi 4	
3.17	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Secara Adil dan Merata	89
3.18	Sasaran Strategi 5 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	89
3.19	Terget dan Capaian Indikator pendukung pelaksanaan pencegahan Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	92
3.20	Sasaran Strategi 6 Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	93
3.21	Perbandingan realisasi APK PAUD/TK (point) Nasional/ Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023	94
3.22	Perbandingan realisasi APK SD/MI/Paket A (point) Nasional/ Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023	95
3.23	Perbandingan realisasi APK SMP/MTs/ Paket B (point) Nasional/ Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023	96
3.24	Perbandingan realisasi APM PAUD/TK (point) Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023	96

3.25	Perbandingan realisasi APM SD/MI/Paket A (point) Nasional/ Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023	97
3.26	Perbandingan realisasi APM SMP/MTs/ Paket B (point) Nasional/ Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023	98
3.27	Perbandingan realisasi Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (% Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023	98
3.28	Sasaran Strategi 7 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	100
3.29	Perbandingan realisasi Indeks Keluarga Sehat tahun 2021 s.d 2023	101
3.30	Perbandingan realisasi Angka Kematian Bayi tahun 2021 s.d 2023	102
3.31	Perbandingan realisasi Prevalensi Stunting tahun 2021 s.d 2023	103
3.32	Sasaran Strategi 8 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan KB	104
3.33	Sasaran Strategi 9 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	105
3.34	Sasaran Strategi 10 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	106
3.35	Sasaran Strategi 11 Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah	107
3.36	Sasaran Strategi 12 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	107
3.37	hasil penilaian evaluasi SAKIP di instansi pemerintah dapat dikategorikan sebagai berikut	108
3.38	Rincian hasil evaluasi Sakip tahun 2023	108
3.39	Presentase Nilai Evaluasi Sakip tahun 2021 s/d 2023	109
3.40	Sasaran Strategi 13 Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	110
3.41	Sasaran Strategi 14 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	110
3.42	IKM Unit Pelayanan x 25	111
3.43	Realisasi Indeks Kepuasan tahun 2021 s/d 2023	111

3.44	Sasaran Strategi 15		
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		112
3.45	Sasaran Strategi 16		
	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara		113
3.46	Sasaran Strategi 16		
	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara		114



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 ditanyakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Gambaran Umum Kabupaten Flores Timur

1.2.1 Kondisi Geografi

Letak, Luas, Batas Wilayah Administrasi dan Kondisi Geografi Kabupaten Flores Timur terletak antara 08°04'-08° 40'LS dan 122°38'-123°57'BT. Dengan luas wilayah seluruhnya 5.983,38 km², terdiri dari luas daratan 1.812,85 km² (31% luas wilayah) yang tersebar pada 3 pulau besar dan 27 pulau kecil serta luas lautan 2.064,65 km² (69% luas wilayah), dan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sikka, dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lembata.

Gambar 1.1

Peta Wilayah Kabupaten Flores Timur



Topografi Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah berbukit dan bergunung. Kondisi alam tersebut ditandai dengan tingkat kemiringan 12 %, ketinggian rata-rata di atas 100 m, dan memiliki tekstur tanah antara kasar dan sedang. Tingkat Kondisi wilayah geografis yang demikian dibarengi dengan keadaan iklim yang kering mengakibatkan wilayah Flores Timur rawan bencana longsor dan banjir. Kabupaten Flores Timur berada dalam jalur gunung api yang masih aktif sebanyak 4 (empat) gunung yaitu gunung Lewotobi laki-laki dan perempuan, gunung Leraboleng di Pulau Flores dan gunung Ile Boleng di Pulau Adonara. Kabupaten Flores Timur memiliki 290 mata air yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan debit antara 0,5-20 liter



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

perdetik. Sumber mata air tersebut umumnya berada pada kawasan hutan dengan luas 44,390,78 Ha. Kondisi klimatologi mengalami 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Kabupaten Flores Timur terdiri dari 19 kecamatan terbagi ke dalam 229 desa dan 21 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tanjung Bunga yakni 257,57 km² (14,21% dari total luas Kabupaten Flores Timur), sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Solor Selatan yakni sebesar 1,74%. Rincian luas wilayah Kabupaten Flores Timur menurut kecamatan sebagaimana pada tabel 1.1 berikut;

Tabel 1.1

Jumlah Desa dan Kelurahan serta Luas Kecamatan
di Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

Pulau	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Daerah Area (Km ²)	Luas (%)
	1. Wulanggitang	11	-	225,85	12,46
	2. Titehena	14	-	154,84	8,54
	3. Tanjung Bunga	16	-	257,57	14,21
	4. Ile Mandiri	8	-	72,76	4,01
	5. Larantuka	2	18	48,91	2,70
	6. Demon Pagong	7	-	85,40	4,71
	7. Ile Bura	7	-	118,32	6,53
	8. Lewolema	7	-	92,84	5,12
Flores Timur Daratan		72	18	1.056,49	58,28
	9. Solor Barat	14	1	128,20	7,08
	10. Solor Timur	17	-	66,56	3,68
	11. Solor Selatan	7	-	31,85	1,74
Solor		38	1	226,61	12,50
	12. Adonara Barat	18	-	79,71	4,40
	13. Wotan Ulumado	12	-	86,31	4,76
	14. Adonara Timur	19	2	91,06	5,02
	15. Ile Boleng	21	-	49,30	2,72
	16. Witihama	16	-	79,43	4,38
	17. Klubagolit	12	-	44,41	2,46
	18. Adonara Tengah	13	-	42,73	2,36
	19. Adonara	8	-	56,80	3,13
Adonara		119	2	529,75	29,22
Flores Timur		229	21	1.812,85	100

Sumber : BPS, Kabupaten Flores Timur Dalam Angka 2023



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

1.2.2 Kondisi Demografis

Perkembangan Penduduk Kabupaten Flores Timur pada akhir tahun 2022 berjumlah sebanyak 286,166 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 141.290 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 144.876 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 157.85 jiwa/km². Secara rinci sebaran penduduk disetiap kecamatan terlihat pada tabel 1.2 berikut;

Tabel 1.2

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Menurut Kecamatan Tahun 2022

KECAMATAN	Luas Wilayah (Km ²)	Jenis Kelamin			Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Wulanggitang	225,85	7,611	7,622	15,273	67,62
Titehena	154,84	6,820	6,851	13,671	88,29
Larantuka	48,91	20,635	20,719	41,354	845,51
Ile Mandiri	72,76	5,970	5,952	11,922	163,85
Tanjung Bunga	257,57	7,693	7,596	15,289	59,36
Solor Barat	128,20	5,601	5,850	11,451	89,32
Solor Timur	66,56	8,302	8,505	16,807	255,51
Adonara Barat	79,71	7,231	7,129	14,360	180,15
Wotan Ulumado	86,31	5,241	5,208	10,449	121,06
Adonara Timur	91,06	15,079	15,935	31,014	340,59
Klubagolit	44,41	6,222	6,808	13,030	293,40
Witihama	79,43	8,571	9,276	17,847	224,69
Ile Boleng	49,30	8,602	9,305	17,907	363,23
Demon Pagong	85,40	2,542	2,499	5,014	59,03
Lewolema	92,84	4,967	4,902	9,869	106,30
Ile Bura	118,32	3,934	3,849	7,783	65,78
Adonara	56,80	5,841	6,149	11,990	211,09
Adonara Tengah	42,73	6,938	7,066	14,004	327,73
Solor Selatan	31,85	3,490	3,615	7,105	223,08
FLORES TIMUR	1.812,85	144,290	144,876	286,166	157,85

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Tabel di atas menggambarkan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Larantuka dengan 41,345 jiwa dan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Demon Pagong dengan jumlah 5,014 jiwa.

1.2.2.1 Penduduk Menurut Berdasarkan Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut umur dapat memberikan suatu ciri terhadap penduduk, apakah tergolong sebagai penduduk yang produktif atau yang tidak produktif.



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Komposisi seperti ini dapat menggambarkan pola perilaku sosial ekonomi penduduk. Penduduk yang berumur 0–14 tahun dan yang berumur lebih dari 64 tahun dikategorikan sebagai penduduk yang tidak produktif. Komposisi penduduk menurut umur di Flores Timur dapat disajikan pada tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3 Penduduk Flores Timur Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	00-04	6,474	5,847	12,321
2	05-09	12,403	11,308	23,711
3	10-14	14,262	13,162	27,424
4	15-19	14,841	13,739	28,580
5	20-24	14,790	14,015	28,805
6	25-29	12,573	11,778	24,351
7	30-34	10,426	10,363	20,789
8	35-39	9,532	9,545	19,077
9	40-44	8,954	9,426	18,380
10	45-49	7,792	9,106	16,898
11	50-54	7,570	8,693	16,263
12	55-59	6,438	7,818	14,256
13	60-64	5,240	6,523	11,763
14	65-69	3,900	5,176	9,076
15	70-74	2,684	3,745	6,429
16	75+	3,411	4,632	8,043
Jumlah		141,290	144,876	286,166

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Flores Timur, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia muda (15-24 tahun) sangat mendominasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Flores Timur tengah memasuki era bonus demografi, dimana kelebihan penduduk usia produktif bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan.

1.2.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Untuk melihat bagaimana keadaan TPAK di Kabupaten Flores Timur akan disajikan dalam tabel 1.4 berikut:



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Tabel 1.4

Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan
Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin 2022

Jenis Kegiatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	74.242	63.598	141.840
a. Bekerja	70.393	66.500	136.893
b. Pengangguran	3.894	1.098	4.947
Bukan Angkatan Kerja	13.710	34.681	48.391
a. Sekolah	6.622	6.924	13.546
b. Mengurus Rumah Tangga	2.674	23.251	25.925
c. Lain – lain	4.414	4.506	8.920
Jumlah	87.952	102.379	190.231
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74,56		
Tingkat Pengangguran	3,49		

Sumber : BPS, Kabupaten Flores Timur Dalam Angka 2023

Dari tabel 1.4. di atas, menggambarkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 adalah 74,56% dan tingkat pengangguran terbuka 3,49%. Capaian tingkat pengangguran ini mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 0,32 point dengan capaian 3,81%.

1.2.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi

1.2.3.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total produk/nilai tambah semua sector ekonomi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Flores Timur dalam satu periode/tahun tertentu. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku ialah total produk/nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi pada satu tahun yang dinilai dengan harga satuan per komoditi pada tahun tersebut. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah total produk/nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang dinilai dengan harga satuan per komoditi pada satu tahun tertentu.

Penyajian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku bertujuan memberikan gambaran tentang jumlah nilai tambah (PDRB) yang telah dibentuk oleh setiap kegiatan ekonomi pada periode berjalan (berlaku). Disamping itu juga dapat diperoleh gambaran tentang peranan dari setiap kegiatan ekonomi dalam membentuk nilai tambah maupun rata-rata pendapatan penduduk pada periode berjalan. Tabel 1.5 berikut ini dapat kita lihat



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

bagaimana perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2018 sampai dengan 2022

Tabel 1.5

PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)
Tahun 2018-2022

Uraian PDRB	PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,28	27,37	27,45	28,07	28,90
Pertambangan dan Penggalian	0,90	0,89	0,90	0,88	0,85
Industri Pengolahan	0,84	0,84	0,84	0,82	0,83
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,08	0,08	0,09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Konstruksi	4,73	4,79	4,28	4,45	4,43
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,53	8,60	8,30	8,15	8,39
Transportasi dan Pergudangan	5,53	5,39	5,20	5,15	5,30
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
Informasi dan Komunikasi	4,37	4,37	4,93	4,68	4,65
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,83	3,78	4,12	4,34	4,51
Real Estate	3,35	3,10	3,03	2,93	3,01
Jasa Perusahaan	0,16	0,16	0,10	0,08	0,08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16,93	17,10	17,68	17,98	17,26
Jasa Pendidikan	16,00	16,06	16,15	15,57	15,10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,34	2,34	2,56	2,70	2,61
Jasa lainnya	5,03	5,01	4,27	4,00	3,89
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : BPS, Kabupaten Flores Timur Dalam Angka, 2023

Dari Tabel 1.5 diatas menggambarkan bahwa kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu sebesar 28,90 % dari nilai total PDRB. Data yang ada menunjukkan bahwa sumbangsih sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap nilai total PDRB di Kabupaten Flores Timur cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan sumbangsih sebesar 27,28% dari total nilai PDRB, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 27,37% dan tahun 2020 meningkat menjadi 27,45% serta tahun 2021 meningkat 28,07%.



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Perbandingan PDRB Harga Konstan disuatu wilayah antara suatu tahun dengan tahun sebelumnya merupakan perbandingan kuantum produk antara dua tahun tanpa dipengaruhi oleh harga (inflasi/deflasi) pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dari suatu tahun ke tahun berikutnya adalah pertumbuhan riil ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Tabel 1.6 PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Tahun 2019-2023

Uraian PDRB	PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	940,19	942.94	961,84	997,15	1040,20
Pertambangan dan Penggalian	34,71	34.73	34.98	35,06	35,54
Industri Pengolahan	34,40	33.20	33,21	34,53	38,38
Pengadaan Listrik dan Gas	2,52	2.82	2.84	3,04	3,38
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,00	1.03	1,09	1,15	1,17
Konstruksi	207,32	186.69	194,86	193,83	202,35
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	280,85	264,80	263,95	274,86	290,82
Transportasi dan Pergudangan	192,13	186,98	187,94	194,20	199,43
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,90	2,41	2,43	2,53	2,78
Informasi dan Komunikasi	195,12	222.84	214,20	219,80	226,95
Jasa Keuangan dan Asuransi	143,88	157.60	162,00	163,34	166,60
Real Estate	116,10	114.52	114,80	114,94	117,36
Jasa Perusahaan	4,69	2.99	2,35	2,40	2,46
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	654,82	682.80	699,52	700.66	701,74
Jasa Pendidikan	449,10	448.71	435,46	432,78	447,68



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Uraian PDRB	PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	78,91	82,37	86,79	87,67	90,71
Jasa lainnya	154,89	131,06	124,29	124,95	128,09
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3493,52	3498,47	3522,55	3582,90	3695,63

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2023

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Flores Timur pada tahun 2023 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Flores Timur atas dasar harga konstan 2010, mencapai 3,69 triliun rupiah pada tahun 2023. Angka tersebut meningkat dari 3,58 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 0.14 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya 2020 yang yakni sebesar 0,14 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur dapat di lihat pada tabel 1.7 dibawah ini :

Tabel 1.7

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2022

Uraian PDRB	PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,09	4,31	0,29	2,00	3,67
Pertambangan dan Penggalian	5,39	5,89	0,04	0,73	0,22
Industri Pengolahan	2,06	5,01	-3,49	0,03	0,97
Pengadaan Listrik dan Gas	9,56	0,91	12,09	0,55	7,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,72	4,28	2,97	5,91	5,51
Konstruksi	5,06	5,35	-9,95	4,38	-0,53
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,84	5,03	-5,57	-0,32	4,14
Transportasi dan Pergudangan	4,33	2,95	-2,68	0,52	3,33
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,71	3,70	-16,85	1,02	6,27
Informasi dan Komunikasi	6,44	5,56	14,21	-3,88	2,61
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,53	3,38	9,54	2,79	0,83
Real Estate	4,48	-0,58	-1,36	0,24	0,12



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Uraian PDRB	PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jasa Perusahaan	1,26	3,88	-36,16	-21,49	2,39
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,45	6,94	4,27	2,45	0,16
Jasa Pendidikan	2,65	4,82	-0,09	-2,95	0,61
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,67	4,18	4,38	5,36	1,01
Jasa lainnya	3,64	4,75	-15,39	-5,16	0,53
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,74	4,80	0,14	0,69	1,71

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2022

Tabel 1.7 di atas menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 4,74 persen, naik menjadi 4,80 persen pada tahun 2019 dan pada tahun 2021 menurun menjadi 0,69 persen akibat pandemic Covid-19. Tahun 2022 walaupun lambat, pertumbuhan ekonomi Flores Timur mulai meningkat menjadi 1,71 persen.

Dengan mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi dari tiap-tiap sektor yang ada di Kabupaten Flores Timur, diharapkan pembuat kebijakan dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengoptimalkan potensi sektor yang ada untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

1.2.3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah indeks komposit dari gabungan 3 (tiga) indikator, yaitu usia harapan hidup, angka melek huruf serta rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. IPM mengukur secara spesifik pencapaian masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, untuk mencapai dan mempertahankan standar kehidupan yang layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

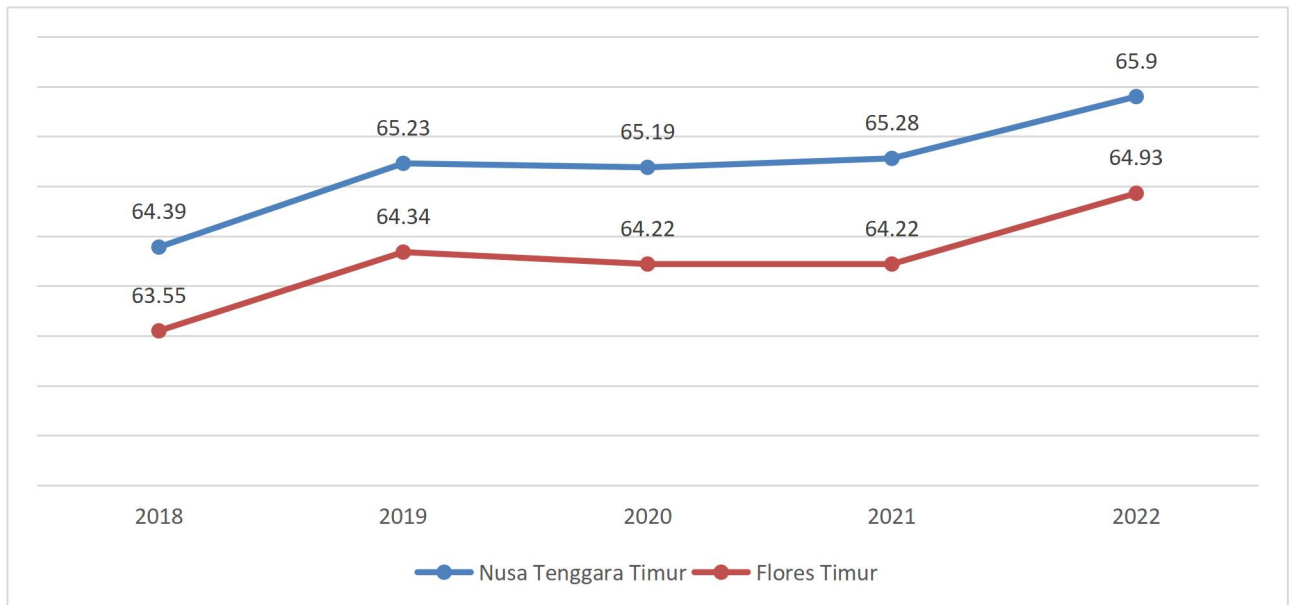


LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Sampai dengan tahun 2022, IPM Flores Timur mencapai 64,93. Jika dibandingkan dengan rata – rata IPM di NTT maka perkembangan IPM Flores Timur berada di bawah rata-rata Provinsi NTT sebesar 65,90.

Gambar 1.2

Indek Pembangunan Manusia NTT Tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS, Kabupaten Flores Timur Dalam Angka 2021

1.2.4 Kondisi Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur staf yang diwadahi dalam Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelayanan administrasi dan memberi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang diwadahi dalam Sekretariat DPRD Tipe C;



3. Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam Inspektorat Daerah Tipe A;
4. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana yang diwadahi dalam dinas- dinas daerah, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan serta urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
 - i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan



Menengah;

- k. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - l. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
 - n. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
 - o. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - p. Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - q. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - r. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Pangan;
 - s. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Perkebunan dan Peternakan;
 - t. Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan sub urusan Perikanan; dan
 - u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan.
5. Badan Daerah merupakan unsur penunjang yang diwadahi dalam badan-badan daerah, terdiri dari:



- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan Pembangunan, serta fungsi penunjang urusan Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan, sub urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - c. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan, sub urusan Pendapatan; dan
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
6. Kecamatan, terdiri dari:
- a. Kecamatan Larantuka dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Adonara Timur dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Adonara Barat dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Adonara dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Adonara Tengah dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Kelubagolit dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Witihama dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Ile Boleng dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Wotan Ulumado dengan Tipe A;
 - j. Kecamatan Tanjung Bunga dengan Tipe A;
 - k. Kecamatan Wulanggitang dengan Tipe A;
 - l. Kecamatan Titehena dengan Tipe A;
 - m. Kecamatan Lewolema dengan Tipe A;
 - n. Kecamatan Ile Mandiri dengan Tipe A;
 - o. Kecamatan Ile Bura dengan Tipe A;
 - p. Kecamatan Demon Pagong dengan Tipe A;
 - q. Kecamatan Solor Timur dengan Tipe A;
 - r. Kecamatan Solor Barat dengan Tipe A; dan
 - s. Kecamatan Solor Selatan dengan Tipe A.



1.2.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur berdasarkan data Nominatif PNS dan P3K lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 keadaan 31 Desember 2022 sebanyak 4.892 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.058 orang dan perempuan sebanyak 2.834 orang. Pada Tabel 1.8 dan 1.9 digambarkan rincian PNS berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan.

Tabel 1.8 Jumlah ASN (PNS & PPPK) Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	SD	16	4	20
2	SLTP	29	3	32
3	SLTA	433	342	775
4	D.I	3	30	33
5	D.II	78	46	124
6	D.III	201	750	951
7	S.1	1105	1445	2.550
8	S.2	46	17	63
9	S.3	1	-	1
Jumlah		1912	2637	4549

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Flores Timur, 2023

Tabel 1.9 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	Gol.I	16	5	21
2	Gol.II	372	430	802
3	Gol.III	1.145	1.925	3070
4	Gol.IV	387	269	656
Jumlah		1920	2.629	4.549

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Flores Timur, 2022



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Berdasarkan data Jabatan Struktural Tahun 2022, terdapat 534 Jabatan dengan 434 Jabatan terisi dan masih terdapat 100 jabatan yang lowong keadaan 31 Desember Tahun 2022 sesuai tabel 1.10 di bawah ini :

Tabel 1.10 Data Jabatan Struktural menurut Jumlah Jabatan, Jabatan Terisi dan Jabatan Lowong

No.	Jabatan	Jumlah Jabatan	Jabatan	
			Terisi	Lowong
1	JPT	36	30	6
2	Administrator	117	166	11
3	Pengawas	321	232	83
Jumlah		534	434	100

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Flores Timur, 2022

1.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

1.3.1 Permasalahan Terkait Program Prioritas

Berdasarkan gambaran umum daerah dan hasil evaluasi maka teridentifikasi berbagai permasalahan yang menjadi perhatian di tahun 2022 sebagai berikut:

1. Bidang Sumber Daya Manusia
 - a. Masih rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. Menurunnya harmonisasi hubungan sosial antar warga;
 - c. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender;
 - e. Rendahnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
 - g. Tingginya angka DO;
 - h. Rendahnya Pelayanan dan Pembinaan KB;
 - i. Rendahnya Kualitas derajat kesehatan masyarakat dan Pelayanan Kesehatan;
 - j. Masih adanya Kasus Gizi Buruk;
 - k. Kurangnya sarana dan prasarana Kesehatan;
 - l. Angka stunting yang tergolong tinggi;
 - m. AKI/AKB dan angka kesakitan masih tinggi;
 - n. Belum adanya lembaga perlindungan anak;



- o. Rendahnya keterampilan tenaga kerja;
 - p. Lemahnya Pendampingan Kelompok Masyarakat.
2. Bidang Ekonomi
- a. Rendahnya pendapatan masyarakat;
 - b. Kurangnya penyediaan lapangan kerja baru;
 - c. Penguatan kapasitas kelompok tani dan kelembagaannya;
 - d. Sinergisitas antara pemangku kepentingan;
 - e. Pemetaan Kawasan;
 - f. Aktifitas Ekonomi berbasis potensi lokal;
 - g. Penerapan teknologi pertanian yang tepat guna dan rama lingkungan;
 - h. Ketersediaan energi, protein, lemak;
 - i. Pola penganekaragaman pangan;
 - j. Pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - k. Regulasi terkait pengolahan sumber daya hayati laut dan rehabilitasi terumbu karang dan mangrove;
 - l. Perluasan pemasaran garam.
3. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
- a. Kondisi jalan dan jembatan kabupaten yang tidak mantap;
 - b. Belum tersedianya perlengkapan pengaman jalan;
 - c. Prasarana transportasi laut belum memadai;
 - d. Peralatan uji kir belum berfungsi;
 - e. Pendistribusian air PDAM kurang merata;
 - f. Menurunnya debit air pada sumber mata air;
 - g. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan ruang di daerah sekitar mata air;
 - h. Masih kurangnya prasarana pengaman pantai dan pengendali banjir dan normalisasi sungai/kali mati;
 - i. Masih ada pertambangan tanpa ijin yang dilakukan masyarakat;
 - j. Belum ada dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - k. Masih ada lahan kritis pada daerah yang berpotensi banjir dan longsor;
 - l. Masih banyak beceklog;
 - m. Masih banyak sumber air baku yang belum diuji kualitasnya;
 - n. Belum optimalnya sarana dan prasarana sampah perkotaan;
 - o. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah;



- p. Masih ada desa yang belum teraliri listrik;
 - q. Belum maksimalnya penegakan Perda Tata Ruang,
4. Bidang Pemerintahan
- a. Kurangnya Infrastruktur pendukung dalam peningkatan pelayanan publik;
 - b. Rendahnya Kapasitas SDM Aparatur;
 - c. Rendahnya kerjasama antar Stakeholder/lintas sector;
 - d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi;
 - e. Rendahnya sistem pengawasan dan penegakan produk hukum;
 - f. Lemahnya sistem dan prosedur tata kelola pemerintah daerah

1.3.2 Permasalahan pada aspek geografis.

Pada aspek geografis permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Flores Timur adalah:

1. Kondisi geografis dengan topografi yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan berpotensi menimbulkan bencana alam. Dari aspek ini Kabupaten Flores Timur menjadi salah satu daerah yang rawan bencana alam;
2. Tingkat pertumbuhan penduduk tergolong tinggi, sex ratio yang besar, dan penyebaran penduduk yang tidak merata.

1.3.3 Permasalahan pada aspek kesejahteraan masyarakat

Pada aspek ini menampilkan sejumlah permasalahan adalah :

1. Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB;
2. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bila dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional;
3. Rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin, KAT dan PMKS lainnya untuk mengkomulasi modal produktif, sumber-sumber keuangan, modal sosial dan sarana fisik;
4. Rendahnya kontribusi lembaga kesejahteraan sosial dalam membantu penanganan masalah sosial di masyarakat;
5. Tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas pelayanan, penempatan dan perlindungan TKI;
6. Di bidang olahraga prasarana dan sarana olahraga masih sangat terbatas.

1.3.4 Permasalahan pada aspek pelayanan umum

Pada aspek pelayanan umum terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :



1. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
2. Akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas belum memadai;
3. Jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang belum memadai;
4. Belum optimalnya penyediaan obat-obat perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan dan keamanan pangan serta Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang belum menjadi budaya dalam masyarakat;
5. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang KB yang berdampak kurangnya jumlah peserta akseptor KB maupun akses terhadap fasilitas KB;
6. Infrastruktur transportasi wilayah belum memadai;
7. Sistem dan prosedur kerja dilingkungan aparatur Negara belum efisiensi, efektif dan berprilaku hemat;
8. Sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah belum memiliki SPM dan SOP;
9. Capaian laporan kinerja keuangan yang masih pada level Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diakibatkan oleh neraca aset yang belum optimal;
10. Belum optimalnya pelayanan persampahan, karena belum tersedianya TPS secara merata dalam kota dan TPK di luar kota;
11. Belum efektifnya fungsi dan peran infrastruktur dan suprastruktur politik serta lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam perumusan kebijakan;
12. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah serta masih rendahnya kapasitas keuangan daerah dalam memenuhi tuntutan pembangunan serta belum efektifnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
13. Belum efektifnya lembaga penyelenggara Negara, lembaga politik dan lembaga masyarakat dalam menjamin kepastian hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat dan masih terbatasnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum dan hak asasi manusia, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

1.3.5 Permasalahan pada aspek daya saing

1. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani;
2. Rendahnya pendapatan asli daerah;
3. Belum memadainya aksesibilitas daerah;
4. Minimnya ketersediaan lembaga keuangan mikro;
5. Belum berkembangnya investasi di daerah;
6. Rendahnya kualitas tenaga kerja Flores Timur.



1.3.6 Isu Strategis

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan yang terkait dengan program pembangunan daerah (prioritas utama), yang disinergikan dengan isu global, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini.

Sejalan dengan isu global, nasional dan provinsi NTT, serta memperhatikan permasalahan utama yang harus diselesaikan selama tahun 2023, maka dirumuskan isu strategis Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan pemasaran hasil pertanian;
2. Perlindungan dan pelestarian sumberdaya laut yang bersinergi dengan pengembangan kawasan konservasi dan perlindungan biota/ mamalia laut;
3. Penciptaan lapangan kerja baru melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta perluasan kesempatan kerja melalui penguatan iklim investasi;
4. Kurang didorongnya pengembangan kewirausahaan, industri berbasis sumber daya lokal yang menyerap tenaga kerja lokal;
5. Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
6. Ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan belum memadai;
7. Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran;
8. Kualitas tata kelola pemerintahan yang kurang optimal atau belum menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik;
9. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi;
10. Ketersediaan air baku;
11. Kualitas dan kuantitas perumahan dan lingkungan permukiman;
12. Lingkungan hidup;
13. Pengendalian pemanfaatan ruang;
14. Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa dan pemberdayaan masyarakat.



1.4 Sistematika

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Kondisi Geografis, Data Demografi, Kondisi Ekonomi Daerah dan Kondisi serta Permasalahan Utama (*strategis issue*) dan Sistematika penyajian LKIP Kabupaten Flores Timur.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis Pembangunan, Arah Kebijakan, Rencana Strategis dan Program Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja (PK) Kabupaten Flores Timur 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan pemanfaatannya dalam rangka *feed back* dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran strategis Kabupaten Flores Timur

Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023-2026 sebagai tahun transisi akibat adanya kebijakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, RPD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan yang lain baik secara vertikal maupun secara horizontal. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 senantiasa berpedoman pada RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020- 2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023. RPD Tahun 2023-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026 dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). RPD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.



2.1.1 Visi dan Misi

RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 merupakan periode pembangunan lima tahunan ketiga dalam rangka pencapaian visi daerah dua puluh tahunan RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025. Visi tersebut adalah Flores Timur yang maju, sejahtera bermartabat dan berdaya saing. Berdasarkan visi tersebut, sasaran pembangunan jangka menengah tahap keempat/ terakhir yang ingin dicapai adalah:

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode tahun 2023-2026 yang disusun berdasarkan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022. Sehingga dalam penyusunannya, karena ketiadaan Kepala Daerah hasil pemilihan kepala daerah, RPD Tahun 2023-2026 diarahkan pada pencapaian Visi RPJPD Tahun 2005-2025 yakni ***“Flores Timur yang maju, sejahtera bermartabat dan berdaya saing”***, dengan sasaran pembangunan jangka menengah tahap keempat/terakhir yang ingin dicapai adalah:

- 1) Terwujudnya jaminan kehidupan bermartabat;
- 2) Meningkatnya kemampuan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan;
- 3) Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkendali;
- 4) Meningkatnya kualitas SDM;
- 5) Tersedianya tenaga kerja produktif di sektor usaha ekonomi daerah;
- 6) Meningkatnya infrastruktur dasar dan transportasi untuk mendukung perekonomian daerah;
- 7) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
- 8) Meningkatnya kesejahteraan sosial.

Mengacu pada sasaran pembangunan di atas, serta memperhatikan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi, kondisi faktual, permasalahan dan isu-isu strategis maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan



pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran merupakan gambaran dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program pembangunan daerah. Capaian sasaran pembangunan selain menunjukkan tercapainya tujuan pembangunan jangka menengah daerah, juga berisikan sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Dengan demikian capaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah melalui RPD Tahun 2023-2026 merupakan kontribusi periode terakhir untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang (RPJPD) tahun 2005-2025. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Daya Saing Daerah.

Pelaksanaan pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi potensi dan sumber daya daerah yang dimiliki dalam rangka terwujudnya daya saing daerah melalui sasaran pembangunan:

- a. Terwujudnya daya saing ekonomi, yang dapat diukur dari pencapaian kinerja: Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan; Pertumbuhan PDRB; Laju inflasi daerah; Jumlah investor; Jumlah wisatawan; dan Indeks Desa Membangun.
- b. Terwujudnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), yang dapat diukur dari pencapaian kinerja: Rata-rata lama sekolah; Angka harapan lama sekolah; Angka Drop Out; Rasio lulusan Sarjana; Magister dan Doktor; Angka Melek Huruf; Angka Harapan Hidup; Angka Kesakitan; dan Tingkat pengangguran terbuka.
- c. Terwujudnya daya saing infrastruktur, yang dapat diukur dari pencapaian kinerja: tingkat kemantapan jalan; Sarana dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik; Sarana dan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik; Persentase jaringan irigasi; Akses air minum aman; Akses sanitasi aman dan layak; serta Persentase jaringan intra pemerintah.



2. Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan Flores Timur diarahkan pada pemanfaatan tata ruang agar dapat berdayaguna, dan peningkatan infrastruktur dasar yang terencana, selaras, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan ditandai dengan tercapainya sasaran pembangunan :

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata, yang diukur dari pencapaian kinerja: Tingkat Kemiskinan.
- b. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, yang diukur dari pencapaian kinerja: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

3. Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas.

Pembangunan Flores Timur ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Flores Timur yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta adaptif, inovatif dan terampil dalam rangka terwujudnya manusia yang berkualitas melalui sasaran pembangunan:

- a. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat, yang diukur dari pencapaian kinerja: APK dan APM PAUD/TK; APK dan APM SD/MI/ Paket A; APK dan APM SMP/ MTs/Paket B; Angka melanjutkan Pendidikan SD ke SMP; dan Angka melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA.
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang diukur dari pencapaian kinerja: Indeks Keluarga Sehat; Angka Kematian Ibu; Angka Kematian Bayi; Prevalensi Stunting; dan Cakupan pelayanan vaksinasi Covid 19 (Vaksin kedua).
- c. Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk dan layanan Keluarga Berencana, yang diukur dari pencapaian kinerja: Angka Kelahiran Total.
- d. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, yang diukur dari pencapaian kinerja: Persentase PMKS.
- e. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak, yang diukur dari pencapaian kinerja: Indeks Pembangunan Gender; Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan; dan Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak.



- f. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, yang diukur dari pencapaian kinerja: Persentase organisasi pemuda yang aktif; dan Persentase wirausaha muda.

4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah yang handal harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pemerintahan Flores Timur yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance ditujukan pada terwujudnya tata kelola pemerintah pemerintahan yang baik melalui sasaran pembangunan:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang diukur dari pencapaian kinerja: Indeks Kepuasan masyarakat; Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi jabatan; Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah; Opini BPK, Persentase Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan; Persentase keterlibatan masyarakat dalam Pemilu; Persentase OPD yang terhubung dengan website Pemda; Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD; Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;

2.2

Strategi Pembangunan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas. Dengan demikian strategi pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan pernyataan yang menjelaskan langkah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah daerah tahun 2023-2026. Strategi pembangunan tersebut diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan strategis sebagai upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2023- 2026, maka dirumuskan Strategi pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 sebagaimana diuraikan pada tabel 2.1 berikut;



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Tabel 2.1

Strategi pembangunan pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
(1)		(2)		(3)	
1	Terwujudnya daya saing daerah	1.1	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	1.1.1	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian berbasis kawasan sesuai potensi wilayah
				1.1.2	Meningkatkan kualitas produksi, promosi dan pemasaran produk unggulan daerah
				1.1.3	Pengembangan agroindustri
				1.1.4	Meningkatkan nilai tambah sektor penyumbang PDRB
				1.1.5	Pengawasan dan Pengendalian harga bahan pokok melalui aplikasi secara berkala
				1.1.6	Penciptaan iklim investasi yang kondusif
				1.1.7	Meningkatkan daya tarik pariwisata
				1.1.8	Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa
		1.2	Terwujudnya daya saing SDM	1.2.1	Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata pada semua tingkat pendidikan
				1.2.2	Optimalisasi Penyelenggaraan pendidikan Keaksaraan dan pendidikan non formal yang bermutu
				1.2.3	Peningkatan jaminan Kepastian memperoleh layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
				1.2.4	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
				1.2.5	Meningkatkan pelaksanaan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi
		1.3	Terwujudnya daya saing Infrastruktur	1.3.1	Meningkatkan kualitas jalan
				1.3.2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut
				1.3.3	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi darat
				1.3.4	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi
				1.3.5	Meningkatkan akses air minum masyarakat



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
(1)		(2)		(3)	
				1.3.6	Meningkatkan akses sanitasi aman dan layak bagi masyarakat
				1.3.7	Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pendukung
2	Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	2.1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata	2.1.1	Pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin
				2.1.2	Peningkatan pendapatan keluarga miskin
		2.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2.2.1	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
				2.2.2	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya
3	Terwujudnya Manusia dan masyarakat yang berkualitas	3.1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat	3.1.1	Meningkatkan kualitas Fasilitas Pendidikan dan SDM Pendidik
		3.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.2.1	Peningkatan jaminan Kepastian memperoleh layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
		3.3	Meningkatnya Kualitas pengendalian Penduduk dan layanan KB	3.3.1	Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB
		3.4	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	3.4.1	Meningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS
				3.4.2	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat
		3.5	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	3.5.1	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		3.6	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	3.6.1	Pembinaan, Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Pemuda



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
(1)		(2)		(3)	
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	4.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	4.1.1	Peningkatan kualitas pelayanan publik
				4.1.2	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas ASN
				4.1.3	Optimalisasi Potensi PAD
				4.1.4	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah
				4.1.5	Peningkatan kualitas pengawasan, penyelenggaraan pemerinah daerah.
				4.1.6	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu.
				4.1.7	Meningkatkan keterlibatan OPD dalam website pemda
				4.1.8	Peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan.
				4.1.9	Peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan.
				4.1.10	Peningkatan kesadaran hukum.
				4.1.11	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mitigasi, pencegahan dan penanggulangan bencana.
				4.1.12	Penguatan fungsi Litbang Daerah
				4.1.13	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rumusan arah kebijakan Pembangunan kabupaten Flores Timur merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah bersama stakeholders terkait agar lebih optimal dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan pembangunan kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2023-2026, sebagaimana diuraikan pada tabel 2.2 berikut:



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Tabel 2.2

Arah Kebijakan Pembangunan dari masing-masing Startegi Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN			
		2023	2024	2025	2026
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan 1: Terwujudnya daya saing daerah					
1.1.1	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian berbasis kawasan sesuai potensi wilayah	Penguatan Kelembagaan Petani dan Penyuluh	Peningkatan Penyediaan sarana dan prasarana pertanian	Pengolahan hasil dan Pasca Panen	
		Pemetaan potensi wilayah dan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian			
1.1.2	Meningkatkan kualitas produksi, promosi dan pemasaran produk unggulan daerah	Penguatan kelembagaan industri	Peningkatan kualitas produksi	Peningkatan promosi dan pemasaran produk	
1.1.3	Pengembangan agroindustri				
1.1.4	Meningkatkan nilai tambah sektor penyumbang PDRB	Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses produksi			
		Perluasan sistem dan jaringan pemasaran			
1.1.5	Pengawasan dan Pengendalian harga bahan pokok melalui aplikasi secara berkala	Pengendalian bongkar muat barang			
		Publikasi harga bahan pokok melalui aplikasi			
1.1.6	Penciptaan iklim investasi yang kondusif	Pemetaan potensi Investasi	Pemantapan OSS	Promosi Potensi Investasi Daerah	
1.1.7	Meningkatkan daya tarik pariwisata	Penguatan kapasitas pelaku pariwisata	Peningkatan aksesibilitas dan amenities	Promosi dan pemasaran pariwisata	
		Peningkatan atraksi pariwisata			
1.1.8	Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa	Penguatan kelompok ekonomi masyarakat dan pemberdayaan PKK			
		Penguatan kelembagaan BUMDES			



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN			
		2023	2024	2025	2026
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.2.1	Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata pada semua tingkat pendidikan	Pemberian Beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi			
1.2.2	Optimalisasi Penyelenggaraan pendidikan Keaksaraan dan pendidikan non formal yang bermutu	Peningkatan kapasitas kelembagaan pendidikan non formal			
		Memperbanyak tutor pendidikan keaksaraan di desa dengan memberdayakan sarjana pendidikan di desa			
		Mengembangkan layanan perpustakaan daerah dan memperkuat perpustakaan desa			
1.2.3	Peningkatan jaminan Kepastian memperoleh layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Peningkatan jaminan layanan kesehatan dan peningkatan gernas			
1.2.4	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif				
1.2.5	Meningkatkan pelaksanaan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi	Penyusunan Kajian dan SID Pembangunan BLK	Revitalisasi dan Optimalisasi BLK		
		Membangun koordinasi dan kerja sama BLK milik swasta			
1.3.1	Meningkatkan kualitas jalan	Pembangunan dan pemeliharaan jalan di ibukota kabupaten			
		Pembangunan dan pemeliharaan jalan di wilayah			
		Peningkatan Status Jalan			
1.3.2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana transportasi laut			
1.3.3	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi darat	Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana transportasi darat			
1.3.4	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	Pemetaan Daerah Irigasi	Pembangunan dan pemeliharaan Daerah Irigasi		
1.3.5.	Meningkatkan akses air minum masyarakat	SID air bersih	Pembangunan dan peningkatan jaringan air minum		



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN			
		2023	2024	2025	2026
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan 2 : Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan					
2.1.1	Peningkatan pendapatan keluarga miskin	Verifikasi dan Validasi data kemiskinan	Fasilitasi Bantuan Sosial dan Pengembangan Ekonomi		
2.1.2	Pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin	Peningkatan sarana dan prasarana layak			
2.2.1	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan fungsi laboratorium lingkungan hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		
		Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan pengrusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Optimalisasi penanganan dan pengolahan sampah			
2.2.2	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota			
Tujuan 3: Terwujudnya Manusia dan masyarakat yang berkualitas					
3.1.1	Meningkatkan kualitas Fasilitas Pendidikan dan SDM Pendidik	Optimalisasi Penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal yang bermutu			
		Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Pendidikan Nasional			
		Peningkatan Mutu, kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan			
3.2.1	Peningkatan jaminan Kepastian memperoleh layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Optimalisasi pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga (PISPK)			
		Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana kesehatan yang merata dan berkualitas			
		Meningkatan pengendalian dan pengawasan sistem jaminan kesehatan masyarakat			
		Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan secara merata			
3.3.1	Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB	Penataan Pengendalian Kependudukan			
		Meningkatkan Kinerja Bangsa Kencana melalui KIE yang intens.			



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN			
		2023	2024	2025	2026
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
3.4.1	Meningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS	Mempercepat upaya perlindungan sosial, pemberdayaan sosial serta rehabilitasi sosial			
3.4.2	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat				
3.5.1	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan keberdayaan perempuan dan anak			
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak			
3.6.1	Pembinaan, Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Pemuda	Revitalisasi Organisasi Kepemudaan			
		Peningkatan pembinaan, pendampingan dan penguatan kapasitas bagi pemuda			
		Menyediakan Sarpras olahraga yang memenuhi standar dan menciptakan atlet berprestasi			
Tujuan 4: Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik					
4.1.1	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Penerapan standar pelayanan minimal di lingkungan pemerintah daerah			
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.			
		Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perijinan.			
4.1.2	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas ASN	Penataan sistem administrasi ASN			
		Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur			
4.1.3	Optimalisasi Potensi PAD	Pendataan dan penetapan obyek PAD	Implementasi digitalisasi sistem pungutan PAD		
4.1.4	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah	Penertiban Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset.	Pendampingan pengelolaan keuangan dan aset daerah		
4.1.5	Peningkatan kualitas pengawasan, penyelenggaraan pemerinah daerah.	Peningkatan peran penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.			



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN			
		2023	2024	2025	2026
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
4.1.6	Peningkatan peranserta masyarakat dalam pemilu.	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga negara.			
4.1.7	Meningkatkan keterlibatan OPD dalam website pemda	Meningkatkan kualitas website pemda			
4.1.8	Peningkatan konsistensi antardokumen perencanaan.	Membangun sistem perencanaan dan penganggaran terpadu.			
4.1.9	Peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan.	Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (Target dan Saaranjelas, terukur) dan Partisipatif dan tepat waktu.			
4.1.10	Peningkatan kesadaran hukum.	Peningkatan pemahaman masyarakat akan Peraturan Perundang-Undangan dan HAM.			
		Peningkatan pembinaan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, satuan perlindungan masyarakat.			
4.1.11	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mitigasi, pencegahan dan penanggulangan bencana.	Peningkatan upaya mitigasi, pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.			
4.1.12	Penguatan fungsi Litbang Daerah	Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM kelitbangan			
4.1.13	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Penataan Administrasi Umum Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa;			
		Peningkatan kualitas SDM Aparatur Desa			

2.4 Rencana Strategis dan Program Kegiatan

Perumusan program dan rencana strategi pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan serta target yang akan dicapai. Dalam rangka pencapaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Flores Timur menetapkan beberapa program unggulan/prioritas berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

periode tahun 2023-2026, Keberhasilan capai Kabupaten Flores timur dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan RPD. Indikator dan target sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Program Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan RPD

KODE			TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			2023	2024	2025	2026
Tujuan 1			Terwujudnya daya saing daerah					
Sasaran 1.1			Terwujudnya Daya Saing Ekonomi					
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentasi Lembaga Petani tingkat madya(%)	1,95	2,93	2,93	4,88
					0,74	1,47	1,47	2,21
				Rasio Penyuluh perdesa (rasio)	19,85	20,58	20,58	19,85
3	27	02	Program Penyediaan danPengembangan Sarana Pertanian	Cakupan pemenuhan sarana pertanian (%)	17,24	19,08	19,08	23,41
					48	50	50	54
3	27	03	Program Penyediaan danPengembangan PrasaranaPertanian	Cakupan pemenuhan prasarana pertanian (%)	24,65	28,15	28,15	36,5
					50	52,63	52,63	57,89
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap (%)	38,19	38,96	38,96	40,5
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan	0,43	0,76	0,76	1,42
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang bergerak di bidangpertanian yang memilikiBadan Hukum (%)	1,04	1,67	1,67	2,50
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase industriskala kecil dan menengah yang mengelola hasil pertanian (%)	15,15	30,30	30,30	60,61
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan sarana distribusi perdagangan(%)	27,78	30,56	30,56	36,11
3	30	04	Program Stabilisasi HargaBarang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terkendalnya harga barang (perbandingan harga pasar dgn harga dasar) (Laporan)	19	19	19	19
3	30	07	Program Penggunaan danPemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan IKM yang difasilitasi (%)	18,18	22,73	22,73	31,82



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

KODE			TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			2023	2024	2025	2026
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentasi pengembangan iklim penanaman modal (%)	100	100	100	100
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentasi promosi penanaman modal (%)	100	100	100	100
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentasi fasilitasi pelayanan perizinan (%)	89	93	93	100
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase prasarana dan sarana pariwisata (%)	73,53	79,41	79,41	91,17
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	100	100	100	100
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi dan pemasaran pariwisata (%)	50	66,67	66,67	91,17
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDES aktif (%)	46,72	51,97	51,97	62,45
				Persentase Peningkatan Desa Tertib Administrasi (%)	79,04	74,67	74,67	65,9
				Persentase Aparatur Desa yang di Tingkatkan Kapasitasnya (%)				
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang PADes-nya meningkat (%)	10,53	10,53	10,53	10,53
Sasaran 1.2			Terwujudnya daya saing SDM					
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD (%)	57	58	58	60
				APM PAUD (%)	57	59	59	65
				APK SD (%)	97	98	98	100
				APM SD (%)	89	89	89	90
				APK SMP (%)	96	97	97	100
				APM SMP (%)	67	68	68	70
				Penurunan Buta Huruf (%)	46	44	44	40
				Angka DO (%)	1,20	1,17	1,17	1,10
				Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	100	100	100	100
				Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA (%)	100	100	100	100



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

KODE			TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			2023	2024	2025	2026
				Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik (%)	26,11	29,83	29,83	37,29
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	100	100
				Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	100	100	100	100
				Presentasi PAUD Terakreditasi B (%)	22,85	23,94	23,94	26,11
				Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	50,72	52,50	52,50	56,07
				Persentase SMP terakreditasi minimal B(%)	55	58	58	64
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa (<i>Mahasiswa</i>)	531	631	631	831
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan penyelenggaraan perpustakaan (%)	37,50	41,67	41,67	50,00
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan PHBS (%)	57	59	59	63
				Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,3	93,3	93,3	95
				Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	82,5	83,7	83,7	86,2
				Presentase puskesmas yang terakreditasi utama(%)	33,29	52,29	52,29	90,29
				Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	67,7	72,8	72,8	80
				Angka Gizi Buruk (%)	0,3	0,2	0,2	0,1
				Cakupan Desa/Kelurahan STBM	60,8	67,2	67,2	80
				Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	94	96	96	98
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100	100	100	100



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

KODE			TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			2023	2024	2025	2026
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	75	85	85	100
				Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan (%)	60	65	65	75
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)	2,86	2,88	2,88	2,93
				Persentase pemenuhan sarana pelatihan BLK (%)	0	0	0	70
Sasaran 1.3			Terwujudnya daya saing Infrastruktur					
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan yang ditangani (%)	63,56	65,03	65,03	68,58
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kondisi baik (Bendungan) (%)	45,45	54,54	54,54	72,73
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum (%)	86,87	87,44	87,44	89,56
1	03	04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase sarana dan prasarana Sampah (%)	25	0	0	75
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Akses limbah domestik layak (%)	72,14	72,18	72,18	72,35
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	52	44	44	32
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayanan	Persentase peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	30,5	25,5	25,5	15,5



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

KODE			TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			2023	2024	2025	2026
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase pengadaan tanah pemda yang difasilitasi (%)	66,67	66,67	66,67	66,67
2	16	03	Program Aplikasi Informatika	Persentase peningkatan jaringan intra pemerintah (%)	76,22	84,42	84,42	100
			Tujuan 2 Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan					
			Sasaran 2.1 Terpenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata					
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)	13,26	16,33	16,33	22,47
				Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100	100	100	100
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Cakupan rumah layak huni (%)	91,99	92,24	92,24	93,82
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan PSU (%)	0,8	1,6	1,6	3,2
			Sasaran 2.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup					
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)	75	75	75	75
				Cakupan daerah yang dikonservasi (%)	25	50	50	100
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah (%)	99	99	99	100
				Persentase pengurangan sampah (%)	0,27	0,28	0,28	0,3
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap penataan ruang (%)	60	100	100	100
			Tujuan 3 Terwujudnya Manusia dan masyarakat yang berkualitas					
			Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat					
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD (%)	57	58	58	60
				APM PAUD (%)	57	59	59	65
				APK SD (%)	97	98	98	100
				APM SD (%)	89	89	89	90
				APK SMP (%)	96	97	97	100
				APM SMP (%)	67	68	68	70



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

KODE			TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			2023	2024	2025	2026
				Penurunan Buta Huruf (%)	46	44	44	40
				Angka DO (%)	1,20	1,17	1,17	1,10
				Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	100	100	100	100
				Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA(%)	100	100	100	100
				Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik (%)	26,11	29,83	29,83	37,29
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	100	100
				Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	100	100	100	100
				Presentasi PAUD Terakreditasi B (%)	22,85	23,94	23,94	26,11
				Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	50,72	52,50	52,50	56,07
				Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	54,68	57,8	57,8	64,04
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi (%)	81,29	81,53	81,53	82,00
Sasaran 3.2			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan PHBS (%)	57	59	59	63
				Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,3	93,3	93,3	95
				Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	82,5	83,7	83,7	86,2
				Persentase puskesmas yang terakreditasi utama (%)	33,29	52,29	52,29	90,29
				Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	67,7	72,8	72,8	80
				Angka Gizi Buruk (%)	0,3	0,2	0,2	0,1
				Cakupan Desa/Kelurahan STBM	60,8	67,2	67,2	80
				Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	94	96	96	98
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)	100	100	100	100



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

KODE			TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			2023	2024	2025	2026
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standard (%)	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai standard (%)	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai standard (%)	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	75	85	85	100
				Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan (%)	60	65	65	75
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan maskin	17,75	17,17	17,17	16
				Presentase penerapan SOP (%)	85	85	85	90
				Cakupan Pemulihan Kesehatan (%)	89,21	89,47	89,47	90
				Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	46	64	64	100
				Cakupan Mutu Pelayanan RS	86,43	87,62	87,62	90
				Persentase sarana/ prasarana RS dalam kondisi baik (%)	77,12	78,08	78,08	80
				Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	94	96	96	98
				Persentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	60	65	65	75
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)	15,99	20,66	20,66	30,00
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa yang menerapkan PERDES KIBBLA (%)	6,8	11,2	11,2	20
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	10	15	15	25
					20	20	20	20



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

KODE			TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			2023	2024	2025	2026
Sasaran 3.3			Meningkatnya Kualitas pengendalian Penduduk dan layanan KB					
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	53,63	54,75	54,75	57,00
				Cakupan Akseptor Baru (%)	62,00	65,00	65,00	70,00
Sasaran 3.4			Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat					
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)	13,26	16,33	16,33	22,47
				Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100	100	100	100
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	53,06	60,06	60,06	74,06
Sasaran 3.5			Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak					
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang berpartisipasi di sektor publik (%)	46,00	47,00	47,00	48,00
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terselesaikan (%)	0,001	0,001	0,001	0,001
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)	0,02	0,02	0,02	0,01
				Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)	8	12	12	20
Sasaran 3.6			Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah					
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	10,99	21,98	21,98	43,96
				Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri (%)	1,7	3,4	3,4	6,8
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase fasilitas olahraga yang memenuhi standar (%)	8	16	16	32
Tujuan 4			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik					
Sasaran 4.1			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik					
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan penerapan SPM sesuai standar (%)	100	100	100	100



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

KODE			TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			2023	2024	2025	2026
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerapan SOP sesuai standar (%)	100	100	100	100
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP (%)	100	100	100	100
				Rasio penduduk ber-KK (%)	100	100	100	100
				Rasio Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA (%)				
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Rasio penduduk ber- AKTA Kelahiran (%)	42,89	63,38	63,38	54,19
				Rasio penduduk ber- AKTA Nikah (%)	22,79	24,97	24,97	77,93
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase fasilitasi pelayanan perizinan (%)	89	93	93	100
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memiliki sertifikat fungsional sesuai jabatan (%)	14,68	18,45	18,45	26,00
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai jabatan (%)	14,68	18,45	18,45	26,00
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD (%)	5,76	6,29	6,29	7,30
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan (%)	55,00	60,50	60,50	73,05
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Aset (%)	13,75	15,13	15,13	18,15
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut LHP (%)	75,00	77,00	77,00	80,00
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perentase Keterlibatan Lembaga Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat (%)	100	100	100	100
2	16	02	Program Informasi dan Komunikasi Publik.	Cakupan layanan media komunikasi dan Informasi publik (%)	40	40	40	41
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)	100	100	100	100



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

KODE			TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			2023	2024	2025	2026
				Persentase realisasi program RPJMD kedalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)	100	100	100	100
5	01	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	Persentase konsistensi program kegiatan RPJMD ke Renstra dan RKPD ke Renja (%)	100	100	100	100
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kasus sosial yang ditangani (%)	11,50	11,75	11,75	12,00
1	05	02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus kriminal yang ditangani (%)	60	60	60	60
				Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)				
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penurunan Resiko Bencana (%)	66,67	77,78	77,78	100
				Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	75,78	83,85	83,85	100
				Persentase Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	16,79	17,79	17,79	19,79
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%)	100	100	100	100
				Persentase desa/ kelurahan siaga bencana (%)	1,2	1,2	1,2	1,2
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)	1	1	1	1
				Jumlah Inovasi yang dihasilkan (dokumen)	3	3	3	3
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDES aktif (%)	46,72	51,97	51,97	62,45
				Persentase Peningkatan Desa Tertib Administrasi (%)	79,04	74,67	74,67	65,9
				Persentase Aparatur Desa yang di Tingkatkan Kapasitasnya (%)				



2.5

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Flores Timur ditetapkan melalui Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Adapun IKU Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tercantum pada Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Flores Timur

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	DEFINISI OPERASIONAL
						FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN
I.	Terwujudnya Daya Saing Daerah					
	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Flores Timur Dalam angka 2021, Laporan Tahunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	$\frac{\text{PDRB} (t + 1) - \text{PDRB} (t)}{\text{PDRB} (t)} \times 100 \%$ Keterangan: (t + 1) = Tahun Pengamatan PDRB T = Tahun Pengamatan PDRB sebelumnya
		Laju Inflasi Daerah	Pendukung/ Penunjang	Bagian Perekonomian pada Setda Kabupaten Flores Timur	Flores Timur Dalam Angka 2021, Laporan Tahunan Bagian Perekonomian pada Setda Kabupaten Flores Timur	$\left[\frac{1 + \Delta \text{Inf}1 + \Delta \text{Inf}2 + \Delta \text{Inf}t}{1/t} \right] - 1$ Keterangan: ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya. t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi. Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut: $\frac{\Delta \text{Inf} = \text{Inf} (n + 1 - \text{inf} (n))}{\text{Inf} (n)} \times 100 \%$ Keterangan: nfn = nilai inflasi pada tahun n Inf n + 1 = nilai pada 1 tahun berikutnya n = tahun ...
		Indeks Desa Membangun (IDM)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Flores Timur Dalam Angka Tahun 2021, Laporan Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	$\frac{\sum \text{Skor } x}{N \times 5}$ Ix = Indeks N = Jumlah Indikator



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	DEFINISI OPERASIONAL
						FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN
	Terwujudnya daya saing SDM	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pendidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Flores Timur dalam Angka Tahun 2021. Laporan Tahunan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani Pendidikan Formal. Rumus Perhitungannya: $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n \& i$
		Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Pendidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Flores Timur dalam Angka Tahun 2021. Laporan Tahunan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang Rumus Perhitungannya: $HLS a = FK \times \sum_{i=1}^t \frac{E t}{I = a P t}$
		Angka Drop Out/ Angka Putus Sekolah (APS)	Pendidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Flores Timur Dalam Angka Tahun 2021. Laporan Tahunan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Siswa yang meninggalkan sekolah sebelum naik tingkat atau lulus pada jenjang pendidikan tertentu. Rumusnya perhitungannya: Jumlah putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan yang sama.
		Rasio Lulusan S1, S2 dan S3 (Per 10.000.000 Jiwa)	Pendidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Flores Timur Dalam Angka Tahun 2021. Laporan Tahunan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	$\frac{\text{Jumlah lulusan S1/S2/S3}}{\text{Jumlah penduduk} \times 10.000}$
		Angka Melek Huruf (%)	Pendidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Flores Timur Dalam Angka Tahun 2021. Laporan Tahunan Dinas Pendidikan	Persentase jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin. Rumus Perhitungannya: Jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis usia



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	DEFINISI OPERASIONAL
						FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN
					Kepemudaan dan Olahraga	15 tahun ke atas per jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas X 100
		Angka Harapan Hidup	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Flores Timur Dalam Angka Tahun 2021. Laporan Tahunan Dinas Kesehatan	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Rumus Perhitungannya: $\text{Usia Harapan Hidup} = \frac{\text{Umur masing-masing yang meninggal} \times \text{Jumlah org yang meninggal pada tahun itu}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
		Angka kesakitan (per 100 jiwa)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Flores Timur Dalam Angka Tahun 2021. Laporan Tahunan Dinas Kesehatan	Jumlah penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu jangka waktu tertentu (umumnya 1 tahun) dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru tersebut pada pertengahan jangka waktu yang bersangkutan. Rumus Perhitungannya: $\text{Angka Kesakitan} = \frac{\text{Jumlah Penderita Baru}}{\text{Jumlah penderita yang mungkin terkena penyakit tersebut pada pertengahan tahun}} \times 100$
		Tingkat pengangguran terbuka	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Flores Timur Dalam Angka Tahun 2021. Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$
	Terwujudnya Daya Saing Infrastruktur	Tingkat kemantapan jalan)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100\%$
		Rasio	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Laporan Tahunan	Rasio konektivitas digunakan untuk melihat ketersediaan



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	DEFINISI OPERASIONAL
						FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN
		Konektivitas			Dinas Perhubungan	angkutan (Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan) di wilayah Kabupaten yang dilayani. Rasio Konektivitas = $(IK\ 1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK\ 2 \times \text{bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ IK 1 (angkutan jalan) = (jumlah trayek yang dilayani di Kabupaten X bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek di Kabupaten). IK 2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) = (jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi di kabupaten X bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan di kabupaten) Keterangan: IK 1 (angkutan jalan) Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah Trayek AKAP. Jumlah Kebutuhan Trayek adalah jumlah kebutuhan Trayek Perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan Trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu. IK 2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintas perintis ditambah lintasan komersial. Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersial untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu.
						Bobot Angkutan Jalan Atau Sungai, Danau dan Penyeberangan: Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	DEFINISI OPERASIONAL
						FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN
						angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50 bobot angkutan jalan = 50) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot SDP = 30) (bobot angkutan jalannya = 70) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalannya = 100) Bobot trayek atau lintas: Bobot trayek atau lintas dengan frekwensi tinggi (5 X dalam seminggu) bobot = 1 Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (3 – 4 X dalam seminggu) bobot = 0,8 Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi rendah (< 3 X dalam seminggu), bobot = 0,5
		Persentase jaringan Irigasi (%)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan Tahunan Dinas Umum dan Penataan Ruang	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik -----X 100 % Luas irigasi kabupaten
		Akses air minum aman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan Tahunan Dinas Umum dan Penataan Ruang	Penduduk berakses air minum ----- X 100 % Jumlah penduduk
		Akses sanitasi aman dan layak (%)	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi ----- x 100% Jumlah rumah tinggal
		Persentase Jaringan Intra Pemerintah (%)	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Laporan Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika	Jaringan tertutup yang menghubungkan antara simpul jaringan dalam suatu Organisasi. Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat /Pemerintah Daerah bertujuan menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam instnsi Pusat/Pemerintah Daerah
II.	Terwujudnya Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan					



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	DEFINISI OPERASIONAL
						FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat.	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM.	Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UKM	Ukuran standar hidup layak bagi masyarakat yakni terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup: makanan, air bersih dan tempat tinggal yang layak juga kesempatan untuk sekolah, kondisi pekerjaan yang adil dan mendukung layanan kesehatan hingga jaminan sosial saat menganggur, sakit, pensiun atau situasi rentan lainnya.
	Meningkatnya a Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH).	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Mulai Tahun 2020 Indikator Kualitas Lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yakni: Indeks Kualitas Air (IKA) = 53,88 Indeks Kualitas Udara (IKU) = 88,06 Indeks Kualitas Lahan (IKL) = 60,72 Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) = 84,81 IKLH tahun 2022 sebesar: 72,42 dari target RPJMN sebesar 69,22
		a. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air.	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup.	Nilai relatif = $\frac{Ci/Lij}{(Ci/Lif)^{2rata-rata} + (Ci/Li)^{2Maksimum}}$ Rumus metode IP : $I = \frac{\sqrt{(Ci/Lif)^{2rata-rata} + (Ci/Li)^{2Maksimum}}}{2}$
		b. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$
		c. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup.	$IKTL = 100 - ((4,3 - TH \times 100) \times 50)$ ----- 54,3



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	DEFINISI OPERASIONAL
						FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN
						Keterangan: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan
		d. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup	Nilai yang menggambarkan kondisi air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
III	Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang berkualitas					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	APK PAUD/TK (Point)	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan PAUD/TK dengan penduduk kelompok usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Rumus Menghitung: $\frac{\text{Jumlah Murid PAUD/Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 3-6 Tahun}} \times 100$
		APK SD/MI/Paket A (Point)	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan SD/MI dengan penduduk kelompok usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Rumus Menghitung: $\frac{\text{Jumlah Murid SD/Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun}} \times 100$
		APK SMP/MTs/Paket B (Point)	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMP/MTs dengan penduduk kelompok usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Rumus Menghitung: $\frac{\text{Jumlah Murid SMP/Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun}} \times 100$
		APM PAUD/TK	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah Perbandingan antara jumlah penduduk kelompok



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	DEFINISI OPERASIONAL
						FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN
		(Point)			Kepemudaan dan Olahraga	usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan PAUD/TK dengan penduduk usia sekolah yang dinyatakan dalam persentase. Rumus Perhitungannya: $\frac{\text{Jumlah Anak Didik PAUD 0-6 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk 0-6 Tahun}}$
		APM SD/MI/Paket A (Point)	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI dengan penduduk usia sekolah yang dinyatakan dalam persentase. Rumus Perhitungannya $\frac{\text{Jumlah Siswa SD/MI 7-12 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk 7-12 Tahun}}$
		APM SMP/MTs/Paket B (Point)	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang bersekolah pada jenjang Pendidikan SMP/MTs dengan penduduk usia sekolah yang dinyatakan dalam persentase. Rumus Perhitungannya: $\frac{\text{Jumlah Siswa SMP/MTs 13-15 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk 13-15 Tahun}}$
		Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah siswa baru kelas 1 pada jenjang pendidikan SMP per jumlah lulusan pada jenjang pendidikan SD tahun ajaran sebelumnya.
		Angka	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Jumlah siswa baru Kelas 1 pada jenjang pendidikan SMA



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	DEFINISI OPERASIONAL
						FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN
		Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA (%)			Kepemudaan dan Olahraga	per jumlah lulusan pada jenjang pendidikan SMP tahun ajaran sebelumnya.
	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (%)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Flores Timuיר Dalam Angka Tahun 2021 dan Laporan Tahunan Dinas Kesehatan	Rumus Perhitungannya: $\text{IKS} = \frac{\text{Jumlah Keluarga dengan IKS} > 0,800}{\text{Jumlah Seluruh Keluarga}}$ Kategorinya: Keluarga Sehat : IKS diatas 0,800 Keluarga Pra Sehat IKS 0,500 – 0,800 Keluarga tdk Sehat IKS kurang dari 0,500
		Angka Kematian Ibu (AKI Per 100.000 KLH)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Flores Timuיר Dalam Angka Tahun 2021 dan Laporan Tahunan Dinas Kesehatan	Rumus Perhitungannya: jumlah kematian karena kehamilan, persalinan, masa nifas atau komplikasi selama satu periode X 1000
		Angka Kematian Bayi (AKB per 1000 KLH)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Flores Timuיר Dalam Angka Tahun 2021 dan Laporan Tahunan Dinas Kesehatan	Angka kematian bayi adalah angka kematian pada bayi umur 0-1 tahun Rumus $\frac{\text{jumlah kematian bayi}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1000$
		Prevalensi Stunting (%)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Flores Timuיר Dalam Angka Tahun 2021 dan Laporan Tahunan Dinas Kesehatan	Anak Umur 0 – 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan Indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) memiliki Z score kurang dari 2 SD. Rumus Perhitungannya: $\frac{\text{Jumlah Balita Pendek}}{\text{Jumlah Balita yang di Ukur Panjang/Tinggi Badan}} \times 100 \%$
		Cakupan Pelayanan Vaksinasi	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Flores Timuיר Dalam Angka Tahun 2021 dan Laporan	Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19: Skema Vaksin Covid-19 secara mandiri sasarannya 75 juta orang membutuhkan 172 juta dosis.



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	DEFINISI OPERASIONAL
						FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN
		Covid-19 Vaksin ke 2 (%)			Tahunan Dinas Kesehatan	Vaksi program pemerintah dengan sasarannya 32. 158.276 Orang termasuk Aparat TNI dan Polri membutuhkan 73.960.000 dosis.
	Meningkatnya Kualitas pengendalian Penduduk dan layanan KB	Angka Kelahiran Total (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.	Laporan Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.	Angka kelahiran total adalah banyaknya anak yang diperkirakan/dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu Rumus= CBR= $n/(p) (1000)$ Keterangan n = jumlah kelahiran pada tahun tersebut p = jumlah populasi saat perhitungan.
	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.	Persentase PMKS	Sosial	Dinas Sosial	Laporan Tahunan Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$
	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.	Laporan Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.	Indek pembangunan gender (IPG) merupakan indikator page 19 yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender.
	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Laporan Tahunan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}} \times 100\%$
		Persentase wirausaha Muda	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan UKM	Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UKM.	$\frac{\text{Jumlah wirausaha muda}}{\text{Jumlah seluruh wirausaha}} \times 100\%$
IV	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	DEFINISI OPERASIONAL
						FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Predikat Sakip	Penunjang/ Pendukung	Bagian Organisasi pada Setda Kabupaten Flores Timur	Hasil Evaluasi dari Kementrian PAN RB Tahun 2022	Aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi Pemerintah. Tahun 2022 nilai Sakip 52,47 dengan predikat CC.
	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) KPK	Penunjang/ Pendukung	Inspektorat Daerah	SPI Eksternal oleh KPK	Organisasi non Pemerintah yang berskala Internasional yang bertekad untuk memerangi ketidakadilan yang disebabkan oleh Korupsi. Tahun 2022 Kabupaten Flores Timur mencapai nilai 72,87 (sumber datanya survey penilaian integritas oleh KPK)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penunjang/ Pendukung	Bagian Organisasi pada Setda Kabupaten Flores Timur	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM Kabupaten Flores Timur tahun 2022 81,18 dengan kategori baik.
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Penunjang/ Pendukung	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Evaluasi BPK RI Tahun 2022	Opini dari hasil Pemeriksaan Keuangan merupakan pernyataan profesional dari pemeriksa yang di dapat dari data dan fakta hasil pemeriksaan, khususnya mengenai tingkat kewajaran informasi keuangan yang telah disajikan dalam Laporan Keuangan. Opini BPK tahun 2022 dan Tahun 2023 untuk Kabupaten Flores Timur Wajar Tanpa Pengecualian.



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	DEFINISI OPERASIONAL
						FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN
	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.	Laporan Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.	Indek pembangunan gender (IPG) merupakan indikator page 19 yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender.



2.6 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Tingkat Kabupaten Dilakukan 2 Kali Perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Penjabat Bupati Flores Timur pada bulan Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada bulan November 2023. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah

1. Penyusun kembali perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur yang berdampak dari Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022 sehingga di buatlah dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
2. Penyusun kembali Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 menggantikan Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022. dengan melakukan penyesuaian Kembali Indikator Kinerja yang awalnya sebanyak 111 Indikator menjadi 42 Indikator
3. Penyesuaian target menjadi lebih rendah, karena target yang sebelumnya tidak realistis (sangat jauh dari realisasi tahun 2023, dan sumber daya tidak banyak berbeda dibandingkan tahun sebelumnya)

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

mengatur: Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;*
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan*
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran*

Adapun Perubahan / Revisi 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Flores Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya Daya Saing Daerah			
1.	Terwujudnya daya saing Ekonomi	1 Pertumbuhan PDRB	%	4,59
		2 Laju Inflasi Daerah	Poin	0,45
		3 Indeks Desa Membangun	Poin	41,67
2	Terwujudnya Daya Saing SDM	4 Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,04
		5 Angka Harapan lama sekolah	Tahun	13,44
		6 Angka Drop Out	%	1,2
		7 Rasio lulusan S1, S2, S3 (per 10.000 jiwa)	%	500
		8 Angka melek huruf	%	99,54
		9 Angka harapan hidup	Tahun	65,7
		10 Angka kesakitan (per 100 jiwa)	Per 100 jiwa	14
		11 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,560
3.	Terwujudnya daya saing Infrastruktur	12 Rasio Konektivitas	Rasio	63,94
		13 Persentase jaringan irigasi	%	21,58
		14 Akses air minum aman	%	86,34
		15 Akses sanitasi aman dan layak	%	72,18
		16 presentase jaringan IntraPemerintah	%	76,23
2.	Terwujudnya Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan			
4.	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata	17 Tingkat Kemiskinan	%	10,00



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
5.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	18 Indeks Kualitas Lingkungan hidup (point)	Poin	69,71
3.	Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas			
6.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	19 APK PAUD/TK (point)	Poin	56,61
		20 APK SD/MI/Paket A (point)	Poin	97,35
		21 APK SMP/MTs/ Paket B (point)	Poin	95,98
		22 APM PAUD/TK (point)	Poin	56,74
		23 APM SD/MI/Paket A (point)	Poin	88,85
		24 APM SMP/MTs/ Paket B (point)	Poin	67,49
		25 Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	%	100
		26 Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA(%)	%	100
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	27 Indeks Keluarga Sehat (point)	Poin	0,29
		28 Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 KLH)	Per 100.000 KLH	124/100.000
		29 Angka Kematian Bayi (AKB) (Per1000 KLH)	Per1000 KLH	10/1000
		30 Prevalensi Stunting (%)	%	17
		31 Cakupan pelayanan vaksinasi Covid 19 (Vaksin kedua) (%)	%	75
8.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk dan layanan KB	32 Angka Kelahiran Total (TFR) (%)	%	3,1
9.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	33 Persentase PMKS (%)	%	10,42
10.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	34 Indeks Pembangunan Gender (point)	Poin	92,24
		35 Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan (Kasus)	Kasus	20
		36 Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak (Kasus)	Kasus	25



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
11.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah	37 Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	%	24,7253
		38 Persentase wirausaha muda (%)	%	1,71
4.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
12.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah	39 Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	%	24,7253
	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	40 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) KPK.	Point	83,20
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	41 Indeks Kepuasan masyarakat (point)	Poin	80,52
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	42 Opini BPK (Opini)	Opini	WTP
	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara	43 Indeks Profesional ASN	Indeks	36,14



**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2023**

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2023

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Terwujudnya Daya Saing Daerah			
1	Sasaran 1 : Terwujudnya daya saing Ekonomi		
1)	Program Penyuluhan Pertanian (Pertanian)	238.499.750,00	APBD
2)	Program Penyuluhan Pertanian (Perkebunan)	191.911.625,00	APBD
3)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Pertanian)	-	APBD
4)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Perkebunan)	416.077.919	APBD
5)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Pertanian)	15.781.556.595,00	APBD
7)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	73.379.065	APBD
8)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	471.485.424	APBD
9)	Program Pengembangan UMKM	44.749.735	APBD
10)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	162.353.000	APBD
11)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	59.249.425	APBD
12)	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	109.021.525	APBD
13)	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	24.516.705	APBD
14)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	40.999.445	APBD
15)	Program Promosi Penanaman Modal	29.999.260	APBD
16)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	80.000.000	APBD II
17)	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	320.615.000	APBD II
18)	Program Pemasaran Pariwisata	320.000.000	APBD II



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2023

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
19)	Program Pengembangan Kebudayaan	550.599.000	APBD II
20)	Program Pembinaan Sejarah	30.000.000	APBD II
21)	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100.000.000	APBD II
22)	Program Penataan Desa	89.844.830	APBD
23)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	269.926.595	APBD
24)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat	3.457.365.400	APBD
2	Sasaran 2 : Terwujudnya Daya Saing SDM		
1)	Program Pengelolaan Pendidikan	111.585.583.887	APBD
2)	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	980.142.240,00	APBD
3)	Program Pembinaan Perpustakaan	741.410.405	APBD
4)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	53.930.925.242	APBD
5)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	281.329.245,00	APBD
3	Sasaran 3 : Terwujudnya daya saing Infrastruktur		
1)	Program Penyelenggaraan Jalan	3.997.178.852	APBD
2)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	230.719.670	APBD
3)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.734.197.831	APBD
4)	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Tidak ada kegiatan	
5)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8.635.004.705	APBD
6)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.704.424.200,00	APBD
7)	Program Pengelolaan Pelayaran	109.935.975,00	APBD



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2023

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
8)	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Sudah dikembalikan pada masing-masing OPD	
9)	Program Aplikasi Informatika	239.801.000,00	APBD
Terwujudnya Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan			
4	Sasaran 4 : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata		
1)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	129.999.915,00	APBD
2)	Program Kawasan Permukiman	3.259.041.025	APBD
3)	Program Peningkatan Prasaranan, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	229.999.960	APBD
5	Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		
1)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	131.543.890,00	DAU
2)	Program Pengelolaan Persampahan	3.778.158.755	APBD II
3)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	835.681.435	APBD
Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas			
6	Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat		
1)	Program Pengelolaan Pendidikan	111.585.583.887	APBD
2)	Program Pengembangan Kurikulum	174.943.650	APBD
3)	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	54.971.300	APBD
7	Sasaran 7 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		
1)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinkes)	51.660.181.684,00	APBD
2)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RS)	25.047.156.704	APBD II
3)	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	425.515.740	APBD



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2023

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
4)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100.000.000,00	APBD
5)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinkes)	11.139.232.040	APBD
6)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (RS)	25.047.156.704	APBD II
8	Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk dan layanan KB		
1)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.737.042.494,00	APBD
9	Sasaran 9 : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat		
1)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	190.780.795	APBD
2)	Program Rehabilitasi Sosial	513.380.840	APBD
10	Sasaran 10 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak		
1)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	49.986.100,00	APBD
2)	Program Perlindungan Perempuan	49.965.510	APBD
3)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	19.999.900,00	APBD
11	Sasaran 11 : Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah		
1)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	344.977.175,00	APBD
2)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	69.940.250,00	APBD
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
12	Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
1)	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	1.297.708.890,00	APBD
2)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (SOP)	Tidak ada kegiatan	
3)	Program Pendaftaran Penduduk	668.750.375	APBD II
4)	Program Pencatatan Sipil	157.441.425	APBD II



**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2023**

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2023

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
5)	Program Pelayanan Penanaman Modal	90.000.005	APBD
6)	Program Kepegawaian Daerah	1.991.662.683	APBD
7)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	46.999.720,00	APBD
8)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	916.738.275	APBD II
9)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.849.299.368	APBD
10)	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	810.296.475	APBD
11)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	727.891.130	APBD
12)	Program Perumusan Kebijakan	267.746.600	APBD
13)	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	19.786.661.829	APBD
14)	Program Informasi dan Komunikasi Publik	140.086.375	APBD
15)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1.301.897.718	APBD
16)	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	596.393.440	APBD
17)	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	143.168.658	APBD
18)	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	420.496.540	APBD
19)	Program Penanggulangan Bencana	845.624.840	APBD
20)	Program Penanganan Bencana	403.084.290	APBD
21)	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	446.062.825	APBD
22)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	239.820.635,00	APBD



**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Flores Timur atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPD 2023 – 2026. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam RPD terdapat 4 Tujuan, 16 Sasaran, dengan 42 Indikator Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, menggunakan rumus



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Realisasi}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 dijabarkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja sasaran strategis.

Ada 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023, yaitu:

1. Terwujudnya daya saing daerah
2. Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan
3. Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas
4. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik

Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Penjabat Bupati Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Penjabat Bupati merupakan kinerja tahun ke-1 pada periode RPD Kabupaten Flores Timur 2023-2026.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Ordinal

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % s.d 100 %	Baik (B)
3	55 % s.d 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 90,28 dengan nilai Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Kategori **Baik Sekali** yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran Atas Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategi 1 Terwujudnya daya saing Ekonomi					
No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1	Pertumbuhan PDRB (%)	0,55	4,59	3,15	68,63
1.2	Laju Inflasi Daerah (Point)	-2,02	0,45	3,33	740,00
1.3	Indeks Desa Membangun (Point)	24 Desa tertinggal	41,67	95,45	229,06
Sasaran Strategi 2 Terwujudnya daya saing SDM					
2.1	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	7,72	8,04	8,04	100,00
2.2	Angka Harapan lama sekolah (Tahun)	12,92	13,44	12,95	96,35
2.3	Angka Drop Out/ Angka Putus Sekolah (APS) (%)	1,24	1,20	0,65	54,17
2.4	Rasio lulusan S1, S2, S3 (per 10.000 jiwa)	459,30	500	659,24	131,85
2.5	Angka melek huruf (%)	99,52	99,54	98,79	99,25
2.6	Angka harapan hidup (Tahun)	65,31	65,7	65,5	99,70
2.7	Angka kesakitan (per 100 jiwa)	14,58	14	10,83	77,36
2.8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,81	3,56	3,79	93,93
Sasaran Strategi 3 Terwujudnya daya saing Infrastruktur					
3.1	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	73,07	74,33	77,54	104,32
3.2	Rasio Konektivitas (Rasio)	0	63,94	N/A	0,00
3.3	Persentase jaringan irigasi (%)	21,08	21,58	50	231,70
3.4	Akses air minum aman (%)	86,17	86,34	78,15	90,51
3.5	Akses sanitasi aman dan layak (%)	72,11	72,18	54,99	76,18
3.6	Persentase jaringan IntraPemerintah (%)	68,04	76,23	96,75	126,92



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Sasaran Strategi 4					
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Secara Adil dan Merata					
4.1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat (Tingkat Kemiskinan) (%)	10,19	10	11,77	84,96
Sasaran Strategi 5					
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup					
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	-	69,71	69,29	99,40
Sasaran Strategi 6					
Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat					
6.1	APK PAUD/TK (point)	55,48	56,61	98,84	174,60
6.2	APK SD/MI/Paket A (point)	96,47	97,35	99,09	101,79
6.3	APK SMP/MTs/ Paket B (point)	94,64	95,98	88,91	92,63
6.4	APM PAUD/TK (point)	53,99	56,74	72,22	127,28
6.5	APM SD/MI/Paket A (point)	88,47	88,85	88,67	99,80
6.6	APM SMP/MTs/ Paket B (point)	66,66	67,49	67,68	100,28
6.7	Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	110,3	100	100	100,00
6.8	Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA(%)	103,12	100	100	100,00
Sasaran Strategi 7					
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat					
7.1	Indeks Keluarga Sehat (point)	0,12	0,29	0,138	47,59
7.2	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 KLH)	149	124	162	130,65
7.3	Angka Kematian Bayi (AKB) (Per1000 KLH)	10,5/1000	10	15,4	154,00
7.4	Prevalensi Stunting (%)	20,9	17	18,10	106,47
7.5	Cakupan pelayanan vaksinasi Covid 19 (Vaksin kedua) (%)	35,39	75	76,71	102,28
Sasaran Strategi 8					
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan KB					
8.1	Angka Kelahiran Total (TFR) (%)	3,2	3,10	2,58	83,23
Sasaran Strategi 9					
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat					
9.1	Persentase PMKS (%)	11,58	10,42	16,49	158,25



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Sasaran Strategi 10					
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak					
10.1	Indeks Pembangunan Gender (point)	92,24	92,08	99,83	478,59
Sasaran Strategi 11					
Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah					
11.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	0	24,725	N/A	0,00
11.2	Persentase wirausaha muda (%)	1,68	1,71	N/A	0,00
Sasaran Strategi 12					
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik					
12.1	Predikat Sakip (%)	52,00	100	53,06	53,06
Sasaran Strategi 13					
Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN					
13.1	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) KPK.	0	83,2	N/A	0,00
Sasaran Strategi 14					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
14.1	Indeks Kepuasan masyarakat (point)	81,60	80,52	83,2	103,33
Sasaran Strategi 15					
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah					
15.1	Opini BPK (Opini)	WDP	WDP	WTP	100
Sasaran Strategi 16					
Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara					
16.1	Indeks Profesional ASN (point)	0	36,14	35,87	99,25

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 15 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 4 target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 19 target: dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 4 target.



3.2 Analisis Capaian

Tabel 3.3

Sasaran Strategi 1 Terwujudnya daya saing Ekonomi

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya daya saing Ekonomi” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1	Pertumbuhan PDRB (%)	0,55	4,59	3,15	68,63
1.2	Laju Inflasi Daerah (Point)	-2,02	0,45	3,33	13,51
1.3	Indeks Desa Membangun (Point)	24 Desa tertinggal	41,67	95,45	229,06

1.1. Pertumbuhan PDRB (%)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan pendekatan lapangan usaha. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambahan bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Hasil capaian Skor Pertumbuhan PDRB (%) adalah 68,63% (“cukup”). Skor ini merupakan hasil validasi dari nilai target 4,59 dan realisasi 3,15.

■ Masalah/ Kedala yang di Hadapi

Pada tahun 2023, tidak ada permasalahan pada indikator ini karena dilihat dari kunjungan web meningkat dan selain itu juga masih ada juga kunjungan langsung di BPS juga meningkat.

■ Strategis

Menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu melalui pendekatan lapangan usaha dimana berfokus pada seluruh komponen nilai tambahan bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya

■ Rencana Aksi

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

1. Mendorong upaya optimalisasi semua potensi penerimaan daerah melalui optimalisasi sector-sektor yang memungkinkan peningkatan PAD
2. Mendorong kesadaran masyarakat untuk berani memanfaatkan jasa perbankan untuk pengembangan usaha mikro
3. Pemerintah harus dapat mendorong belanja belanja yang lebih mengarah pada sector yang berkontribusi lebih bagi pertumbuhan PDRB daerah (sector pertanian, perkebunanm kelautan perikanan, Lingkungan hidup dan Koperasi)

Perbandingan realisasi Pertumbuhan PDRB (%) tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan realisasi Pertumbuhan PDRB (%)
tahun 2021 s.d 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Pertumbuhan PDRB (%)	0,69	1,71	3,15

Berdasarkan Tabel 3.4 Perbandingan realisasi Pertumbuhan PDRB (%) dari tahun 2021 s/d 2023 mengalami peningkatan.

1.2. Laju Inflasi Daerah (Poin)

Pada table 3.3 Capaian indikator Laju Inflasi Daerah (Poin) yaitu 13,51% dengan target kinerja mencapai 0,45 dan realisasi 3,33 dengan kategori **Kurang Baik**. Indikator ini dicapai melalui Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dan ditunjang oleh kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kabupaten Kota. Berdasarkan data statistic dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Flores Timur terlihat pada tahun 2023 Laju Inflasi Daerah melebihi dari target yang ditetapkan sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

■ Masalah/ Kedala yang di Hadapi

Tingkat inflasi yang meningkat bisa dikaitkan dengan kondisi perekonomian nasional maupun daerah, hal ini dapat diartikan bahwa ekonomi mengalami kelebihan permintaan atas produk yang melebihi kapasitas penawaran produksinya sehingga harga semua jenis produk cenderung mengalami kenaikan



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

■ Rencana Aksi

1. Mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten agar dapat bersinergi dan konsiten dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
2. Mengaktifkan satgas pangan di daerah yang bertugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas kepada Pemerintah;
3. Melakukan gerakan tanam pangan cepat panen;
4. Intensifkan jaringan pengaman social;
5. Menjaga Distribusi bahan pangan/stabilisasi harga;

1.3. Indeks Desa Membangun (Poin)

Capaian Indikator Indeks Desa (Poin) membangun pada tabel 3.3 ialah 229,06 % dengan target kinerja mencapai 41,67 dan realisasi 95,45 dengan kategegori Baik Sekali. Dari data awal tahun 2021 dengan total 24 Desa Tertinggal di tahun 2023 total desa tertinggal di kabupaten Flores Timur Tersisa 1 Desa Tertinggal. Dapat Dijelaskan bahwa ada 23 Desa dari 24 Desa tertinggal sudah berubah statusnya menjadi Desa Berkembang dan Desa Maju dengan persentasi capaian kinerja seperti dijelaskan di atas.

Tabel 3.5

PROGRES Indeks Desa Membangun

Data Awal 2021	Jumlah (Desa)	STATUS IDM	
		Status IDM 2022	Status IDM 2023
Desa Tertinggal	24	2	1
Desa Berkembang	166	109	80
Desa Maju	36	110	131
Desa Mandiri	3	8	17
TOTAL	229	229	229

Progres perkembangan IDM dari tahun ke tahun sangat memuaskan. Dari data awal tahun 2021 dengan total 24 Desa Tertinggal di tahun 2023 total desa tertinggal di kabupaten Flores Timur Tersisa 1 Desa Tertinggal. Dapat Dijelaskan bahwa ada 23 Desa dari 24 Desa tertinggal sudah berubah statusnya menjadi Desa Berkembang dan Desa Maju dari rentang waktu dari tahun 2021 sampai tahun 2023 dengan persentasi capaian kinerja seperti dijelaskan di atas. Untuk kategori Desa Mandiri di Tahun 2021 dari 3 Desa meningkat menjadi 8 Desa di tahun 2022 dan pada Tahun 2023 mencapai 17 Desa. Target RENSTRA untuk Tahun 2023 adalah 3 desa hal ini tentu sangat membanggakan kita semua. Sementara Kondisi



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Desa Tertinggal masih tersisa 1 Desa yaitu Desa Latonliwo II Kecamatan Tanjung Bunga. Dengan adanya pendampingan-pendampingan dari semua aspek diharapkan agar di tahun 2024 tidak ada lagi.

Meskipun IDM memiliki dampak yang positif, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan data yang akurat dan terkini untuk mengukur indikator dalam IDM. Dalam beberapa kasus, data yang tersedia terkadang kurang lengkap atau tidak mutakhir, sehingga dapat memengaruhi akurasi penilaian IDM.

Selain itu, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa juga merupakan faktor penting dalam mencapai dampak yang maksimal dari IDM. Diperlukan sinergi yang kuat antara berbagai pihak untuk mengimplementasikan kebijakan dan program yang sesuai dengan hasil evaluasi IDM.

Salah satu dampak penting dari IDM adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan memperhatikan aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, IDM dapat membantu mengarahkan upaya pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Misalnya, melalui pemetaan kebutuhan kesehatan desa berdasarkan IDM, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya untuk memperkuat fasilitas kesehatan dan program pencegahan penyakit di desa.

Pada akhirnya, evaluasi IDM terhadap pembangunan desa di Indonesia tahun 2023 adalah langkah penting untuk memastikan bahwa upaya pembangunan desa berjalan sesuai harapan dan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak IDM dan memperkuat komitmen untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan, inklusif, dan adil.

Tabel 3.6

Sasaran Strategi 2 Terwujudnya daya saing SDM

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya daya saing SDM” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.1	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	7,72	8,04	8,04	100,00
2.2	Angka Harapan lama sekolah (Tahun)	12,92	13,44	12,95	96,35
2.3	Angka Drop Out/ Angka Putus Sekolah (APS) (%)	1,24	1,20	0,65	54,17



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

2.4	Rasio lulusan S1, S2, S3 (per 10.000 jiwa)	459,30	500	659,24	131,85
2.5	Angka melek huruf (%)	99,52	99,54	98,79	99,25
2.6	Angka harapan hidup (Tahun)	65,31	65,7	65,5	99,70
2.7	Angka kesakitan (per 100 jiwa)	14,58	14	10,83	77,36
2.8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,81	3,56	3,79	93,93

2.1 Rata-rata lama sekolah

Pada Tabel 3.6 indikator Rata-rata lama sekolah ini dari tingkat pendidikan masyarakat. Nilai capaian dari rata-rata lama sekolah yaitu 100% kategori Baik Sekali dengan nilai target 8,04 dan realisasinya 8,04. Tingginya rata-rata lama sekolah menunjukkan banyaknya jumlah tahun standar untuk menamatkan pendidikan seseorang. Perhitungan indeks ini berdasarkan 2 indikator yakni, Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah dapat diartikan sebagai harapan yang mampu ditempuh oleh anak. Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka tingkat intelegensi dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas seseorang dan menjadi salah satu upaya dalam membentuk pertumbuhan ekonomi. Umumnya rata-rata lama sekolah merupakan indeks yang menunjukkan lamanya pendidikan seseorang mulai dari masuk pada jenjang sekolah dasar sampai dengan jenjang pendidikan terakhir.

Untuk menghitung rata-rata lama sekolah di butuhkan informasi sebagai berikut :

1. Partisipasi sekolah
2. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki
3. Ijazah tertinggi yang dimiliki
4. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jejang pendidikan formal yang pernah di jalani. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir ditingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan konversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut :



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

1. Tidak punya ijazah = 0 tahun
2. SD = 6 tahun
3. SMP = 9 tahun
4. SMA = 12 tahun
5. D1/D2 = 14 tahun
6. D3 = 15 tahun
7. D4 = 16 tahun
8. S1 = 17 tahun
9. S2 = 19 tahun
10. S3 = 22 tahun

■ Masalah / Kendala yang dihadapi

Secara umum penyebab Rata-rata lama sekolah belum optimal disebabkan oleh:

1. Banyaknya penduduk di atas 25 tahun yang hanya mengenyam pendidikan SD
2. Banyaknya masyarakat dimasa lampau yang tidak melanjutkan sekolah, bahkan banyak di temukan yang tidak bersekolah.

■ Rencana Aksi

Apabila di temukan Rata-rata lama sekolah yang rendah di suatu daerah tentunya dibutuhkan perhatian khusus di bidang pendidikan merupakan faktor keberhasilan dari peningkatan angka Rata-rata lama sekolah, yang berupa penguatan anggaran dan pemerataan akses bagi seluruh masyarakat. Penguatan akses untuk sektor pendidikan formal dan non formal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan seluruh masyarakat. Melalui pendidikan bermutu akan terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tabel 3.7

Perbandingan realisasi Rata-rata lama sekolah
tahun 2021 s.d 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Rata-rata lama sekolah	7,30	7	8,04

2.2 Angka Harapan lama sekolah

Angka Harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Meningkatkan harapan lama sekolah merupakan salah satu upaya strategis yang wajib dilakukan untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan Tabel 3.6 tersebut dapat dilihat bahwa untuk Harapan lama Sekolah capaiannya adalah **12,95** Tahun dari target **13,44** tahun atau sebesar sebesar **96,35%**. Dari capaian tersebut diatas diketahui bahwa harapan lama sekolah penduduk yang ada diwilayah Kabupaten Flores Timur adalah 12,95 Tahun atau penduduk diwilayah Kabupaten Flores Timur diharapkan menamatkan Pendidikan sampai SMA (12 Tahun) dan kuliah selama 9 bulan. Capaian tahun ini naik 0,8% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 12,94, faktor biaya Pendidikan menjadi salah satu kendala utama untuk meningkatkan HLS, pemberian Beasiswa Kuliah dapat menjadi salah satu perlu cara untuk meningkatkan HLS.

■ Masalah / Kendala yang dihadapi

Faktor penyebab putus sekolah adalah faktor ekonomi dan latar belakang orang tua yang rendah dan kurangnya perhatian orang tua, kurangnya minat anak terhadap sekolah dan motivasi belajar siswa serta lingkungan pertemanan yang buruk

■ Rencana Strategi

Ada beberapa Rencana Strategi untuk mengurangi Angka Harapan Lama Sekolah :

1. Melakukan sosialisasi informasi Paket B dan C lebih massive dalam rangka optimalisasi program belajar 12 tahun kepada masyarakat khususnya bagi usia produktif terutama di daerah yang memiliki Angka Harapan Lama rendah untuk membangun dan menguatkan kesadaran pentingnya pendidikan sehingga angka putus sekolah dapat ditekan serta merumuskan bahan dan output dari sosialisasi informasi wajib belajar 12 tahun
2. Melakukan pemanfaatan sekolah-sekolah dasar dan Menengah untuk dimanfaatkan oleh PKBM yang terkendala Sarana dan Prasarana

Perbandingan realisasi Angka Harapan lama sekolah tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Perbandingan realisasi Angka Harapan lama sekolah
tahun 2021 s.d 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Angka Harapan lama sekolah	12,92	12, 94	12,95



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Berdasarkan Tabel 3.8 bahwa nilai realisasi dari tahun 2021 s/d 2023 mengalami peningkatan.

2.3 Angka Drop Out/ Angka Putus Sekolah (APS)

Pada tabel 3.6 menyatakan indikator Angka putus sekolah menunjukkan capaian ialah 54,17% dengan target 1,20 dan realisasi 0,65, dalam konteks sekolah, drop out merujuk pada siswa yang meninggalkan sekolah sebelum lulus. Sementara itu, dalam lingkup perguruan tinggi, istilah ini mengacu pada mahasiswa yang berhenti kuliah sebelum berhasil menyelesaikan gelar atau program studi yang diambil.

■ Masalah / Kendala yang dihadapi

Faktor penyebab putus sekolah adalah faktor ekonomi dan latar belakang orang tua yang rendah dan kurangnya perhatian orang tua, kurangnya minat anak terhadap sekolah dan motivasi belajar siswa serta lingkungan pertemanan yang buruk

■ Reaksi Aksi

Ada beberapa upaya untuk mengurangi Angka putus Sekolah yaitu :

1. Meningkatkan kualitas guru
2. Memberikan beasiswa
3. Membangun komunikasi pendidikan untuk membantu anak yang putus sekolah
4. Pemerataan akses pendidikan dan fasilitas pendidikan

Tabel 3.9

Perbandingan realisasi Angka Drop Out/Angka Putus Sekolah (APS)
tahun 2021 s.d 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Angka Drop Out/Angka Putus Sekolah (APS)	1,65	0,00	0,65

2.4 Rasio lulusan S1, S2, S3 (per 10.000 jiwa)

Rasio lulusan S1, S2, S3 (per 10.000 jiwa) pada tabel 3.6 memiliki capaian 131,85% dengan target 500 dan realisasi 659,24. Rasio lulusan S1, S2, S3 (per 10.000 jiwa) Membandingkan Tingkat Pendidikan Tinggi di Indonesia dari S1, S2, hingga S3. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, jalur akademik untuk pendidikan tinggi dibagi ke dalam tiga strata, yakni Strata 1 yang mencetak lulusan sarjana, Strata 2 untuk program magister, serta Strata 3 yang memberikan gelar doktor.



■ **Faktor Rendahnya Lulusan**

1. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya jumlah lulusan S1, S2 (Magister) dan S3 (Doktor) di Indonesia. Pertama adalah keterbatasan sumber daya;
2. tingginya biaya pendidikan. Biaya pendidikan tingkat lanjut, terutama untuk program S3, cenderung tinggi. Banyak individu kesulitan membiayai pendidikan mereka tanpa beasiswa atau dukungan keuangan eksternal;
3. kurangnya fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Beberapa daerah di Indonesia memiliki keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pendidikan tingkat lanjut.
4. kurangnya kesadaran dan dukungan. Beberapa individu mungkin tidak sepenuhnya menyadari manfaat dan peluang yang dapat diperoleh melalui pendidikan tingkat lanjut;
5. kualitas pendidikan dasar dan menengah. Kualitas pendidikan dasar dan menengah dapat mempengaruhi kesiapan dan motivasi siswa untuk melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi;
6. tingginya beban kerja dan keterbatasan waktu. Beberapa individu mungkin menghadapi kesulitan untuk mengimbangi antara pekerjaan, kehidupan keluarga, dan pendidikan tingkat lanjut.

■ **Faktor Rendahnya Lulusan**

- 1) Memberian beasiswa dan pendanaan. Menyediakan beasiswa penuh dan parsial untuk mahasiswa S1, S2 dan S3 dapat mengurangi beban biaya pendidikan;
- 2) Pendampingan dan dukungan akademis. Lembaga pendidikan dapat menyediakan program pendampingan untuk mahasiswa S1, S2 dan S3 dengan membangun sistem dukungan akademis untuk membantu mahasiswa dalam penelitian dan kegiatan akademis lainnya;
- 3) Kebijaksanaan Pendidikan yang bisa di capai oleh lulusan S1, S2 dan S3 dst;
- 4) pemasaran pendidikan. Meningkatkan upaya pemasaran untuk meningkatkan daya tarik dan kesadaran akan program S1, S2 dan S3;
- 5) Fleksibilitas program. Menyediakan pilihan studi yang lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang bekerja adalah juga sebuah pilihan melalui pengembangan program S1, S2 dan S3 yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar.

2.5 Angka melek huruf

Pada indikator ini pada umumnya penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya seperti huruf jawa, kanji dan lainnya terhadap



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

penduduk usia 15 tahun keatas. Nilai capaian dari Angka melek huruf pada tabel 3.6 yaitu 99,257% dengan nilai target 99,54 dan realisasinya 98,79. Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

■ **Kendala / Masalah yang dihadapi**

Faktor utama penyebab tingginya angka melek huruf adalah kemiskinan. Terutama karena masih sulit makan setiap pergi ke sekolah

■ **Rencana Aksi**

Sebagai upaya penuntasan angka melek huruf, Kemendikbud melakukan 4 langkah, yaitu :

1. Pemutakhiran angka melek huruf
2. Fokus ke daerah yang angka melek hurufnya tinggi
3. Meningkatkan jaringan pemberantasan angka melek huruf
4. Melakukan inovasi pada pendidikan untuk angka melek huruf

Tabel 3.10

Perbandingan realisasi Angka Melek Huruf
tahun 2021 s.d 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Angka Melek Huruf	95,31	94,88	98,79

Berdasarkan tabel 3.10 menyatakan bahwa nilai realisasi dari tahun 2021 s/d 2023 meningkat

2.6 Angka harapan hidup

Pada indikator Angka Harapan Ibu, Capaiannya di pengaruhi oleh kesehatan ibu dan bayi serta penanganan penyakit menular dan tidak menular. Nilai capaian dari Angka Harapan Hidup yaitu 99,70% dengan nilai target 65,7 dan realisasinya 65,5. Angka Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu daerah. Pada



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

negara berkembang biasanya Angka Harapan Hidup masih berkisar 40-60 tahun. Namun dalam negara maju Angka Harapan Hidup relatif lebih tinggi hingga mencapai umur 90 tahun.

■ Masalah/ Kedala yang di Hadapi

Secara umum penyebab Angka Harapan Hidup belum optimal di sebabkan oleh:

1. Kematian ibu di flores timur sebagian besar di sebabkan oleh pendarahan dan infeksi pada saat persalinan;
2. Kematian Bayi di flores Timur sebagian besar di sebabka oleh kurangnya pemeriksaan pada saat kunjungan Neonatal dan kunjungan bayi;
3. Kematian yang di sebabkan penyakit menular diantaranya TB, HIV-AIDS dan Covid-19;
4. Kematian yang di sebabkan oleh penyakit tidak mular diantaranya Hipertensi dan Diabetes.

■ Rencana Aksi

Apabila di temukan Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah maka pemerintah harus mengadakan lebih banyak program pembangunan , kesehatan dan program sosial lainnya seperti kesehatan lingkungan, kecukuoan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan. Sementara peningkatan angka harapan hidup menungjukan bahwa bayi-bayi telah terjamin kesehatan dan kemiskinan sudah di atasi lebih baik.

Tabel 3.11

Perbandingan realisasi Angka Harapan Hidup
tahun 2021 s.d 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Angka Harapan Hidup	65,7	65,4	65,5

Pada tabel 3.11 menyatakan bahwa realisasi tahun 2021 s/d 2023 naik namun tidak begitu signifikan.

2.7 Angka kesakitan (per 100 jiwa)

Angka kesakitan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan masyarakat yang bersangkutan. Angka kesakitan penduduk dapat diketahui



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

dengan melakukan pendekatan angka keluhan kesehatan, durasi terganggu kesehatannya, serta cara dan jenis pengobatan yang dilakukan. Angka Kesakitan dapat dilihat dari banyak nya penduduk yang mengalami gejala sakit, faktor penyebab di lihat dari penyakit menular dan tidak menular, semakin tinggi kasus penyakit di Kabupaten Flores Timur semakin besar angka kesakitan. Nilai capaian indikator pada indikator Angka Kesakitan (per 100 jiwa) pada tabel 3.6 yaitu 77,36 % dengan nilai target 14 dan realisasi 10,83.

■ Masalah/ Kedala yang di Hadapi

1. Penyebab Angka Kesakitan yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular
2. Tidak ada kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat dan bersih

■ Rencana Aksi

1. Menjaga Kebersihan lingkungan dengan program STBM,
2. Melakukan Kunjungan Rumah untuk deteksi dini penyakit,
3. Melaksanakan kegiatan PosBindu
4. Melakukan Penyuluhan pola hidup bersih dan sehat

Tabel 3.12

Perbandingan realisasi Angka Kesakitan (per 100 jiwa)
tahun 2021 s.d 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Angka Kesakitan (per 100 jiwa)	14,58	A/N	10,83

Pada tabel 3.12 menyatakan bahwa nilai realisasi tahun 2021 s/d 2023 mengalami penurunan.

2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada indikator ini terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Mereka yang tak punya pekerjaan yang mempersiapkan usaha. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Nilai capaian dari Angka melek huruf pada tabel 3.6 yaitu 93,93% dengan nilai target 3,56 dan realisasinya 3,79. Indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan
2. Tingkat inflasi dan
3. Upah yang berlaku



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Tingkat pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengertian menganggur disini adalah aktif mencari pekerjaan.

■ Masalah / Kendala yang dihadapi

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka diantaranya faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka adalah

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Upah
3. Inflasi dan
4. Investasi

■ Rencana Aksi

Terdapat beberapa faktor untuk mengatasi tingkat pengangguran terbuka, yaitu :

1. Memperbanyak lowongan kerja
2. Memberikan training kerja
3. Memberikan sertifikasi training kerja
4. Memberikan workshop usaha
5. Memberikan pinjaman modal usaha
6. Memberikan pemerataan daerah industri
7. Penyukuhan informasi lowongan kerja

Tabel 3.13

Perbandingan realisasi Tingkat pengangguran terbuka
tahun 2021 s.d 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Tingkat pengangguran terbuka	3,81	3,49	3,79

Berdasarkan tabel 3.13 menyatakan bahwa nilai realisasi dari tahun 2021 s/d 2023 mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan.

Tabel 3.14

Sasaran Strategi 3
Terwujudnya daya saing Infrastruktur

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya daya saing Infrastruktur” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.1	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	73,07	74,33	77,54	104,32



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

3.2	Rasio Konektivitas (Rasio)	0	63,94	N/A	0,00
3.3	Persentase jaringan irigasi (%)	21,08	21,58	50	231,70
3.4	Akses air minum aman (%)	86,17	86,34	78,15	90,51
3.5	Akses sanitasi aman dan layak (%)	72,11	72,18	54,99	76,18
3.6	Presentase jaringan IntraPemerintah (%)	68,04	76,23	96,75	126,92

3.1 Tingkat Kemantapan Jalan (%)

Pada tabel 3.14 menyatakan nilai capaian indikator ialah 104,32%, dengan nilai target 74,33 dan realisasi 77,54. Data ini berisi data Kemantapan Jalan Nasional di Indonesia yang mana jalan Mantap adalah jalan nasional dalam kondisi baik dan sedang, sementara jalan yang di katakan Tidak Mantap adalah jalan nasional dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Adapun penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini adalah sebagai berikut:

- Kd_Prov : menyatakan kode dari tiap provinsi sesuai penamaan BPS
- Provinsi : menyatakan nama provinsi di Indonesia
- Total_Panjang : menyatakan total panjang jalan nasional tiap provinsi dalam satuan kilometer (km)
- Mantap_km : menyatakan panjang jalan nasional dengan kondisi Mantap dalam satuan kilometer (km)
- Mantap_% : menyatakan persentase jalan nasional dengan kondisi Mantap dalam satuan persen (%)
- TMantap_km : menyatakan panjang jalan nasional dengan kondisi Tidak Mantap dalam satuan kilometer (km)
- TMantap_% : menyatakan persentase jalan nasional dengan kondisi Tidak Mantap dalam satuan persen (%)

Berikut perbandingan Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan pada tingkat Nasional, Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023

Tabel 3.15

Perbandingan Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan pada tingkat Nasional, Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
-------------------	----------------	----------------	----------------



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Tingkat Kemantapan Jalan Nasional / Indonesia	37,43	41,81	N/A
Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur	46,28	46,44	48,87
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Flores Timur	73,07	N/A	77,54

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa Indikator Tingkat Kemantapan Jalan Nasional/ Indonesia dari tahun 2021 s/d 2022 mengalami peningkatan, Sedangkan indikator Tingkat Kemantapan Jalan tingkat nasional / Indonesia realisasi tahun 2023 ditulis “N/A” karena pada tahun 2023 belum dilakukan pengukuran. Untuk Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi dan Kabupaten Juga mengalami peningkatan.

■ Masalah / Kendala :

1. Masalah pembebasan lahan
2. Keterbatasan Sumber daya manusia
3. Terbatasnya alokasi anggaran dari DAU

■ Rencana Aksi :

1. Melakukan pendekatan dengan masyarakat terkait dengan pembebasan lahan
2. Sumber daya manusia harus dibekali dengan pengetahuan tentang jalan dan jembatan
3. Mengusulkan anggaran dari sumber lain seperti DAK

3.2 Rasio Konektivitas (%)

Berdasarkan Tabel 3.14 nilai Capaian Indikator Rasio Konektivitas (%) yaitu N/A dengan nilai target 63,94, dan nilai realisasi N/A, pada indikator ini telah berjalan realisasi kegiatannya.

3.3 Persentase jaringan irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian pemberian dan penggunaannya. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan pengelolaan jaringan irigasi tersier tanggung jawab Petani Pemakai Air.

Dengan meningkatkan kondisi infrastruktur jaringan sehingga mampu meningkatkan fungsi layanan irigasi, meningkatkan luas areal tanam dan/atau indeks pertanaman dan meningkatkan partisipasi P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam pengelolaan jaringan irigasi. Berdasar tabel 3.14 menyatakan capaian indikator Presentase Jaringan Irigasi



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

adalah 231,70% dengan realisasi 50 dan target 21,58 yang jika di bandingkan dari data awal mengalami peningkatan.

■ Masalah / Kendala :

1. Ketersediaan Air
2. Sarana dan Prasarana
3. Institusi Pengelolaan
4. Sumber Daya Manusia
5. Produktivitas Tanam

■ Rencana Aksi :

1. Pemeliharaan pada daerah sumber mata air
2. Rehabilitasi / pemeliharaan daerah irigasi yang rusak
3. Harus ada aturan yang memayungi tentang daerah irigasi
4. Perlu adanya tenaga penyuluh dan pembekalan untuk tenaga P3A
5. Petani harus didukung dengan alat – alat pertanian dan pupuk yang memadai

Berikut perbandingan Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan pada tingkat Nasional, Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023

Tabel 3.16

Perbandingan Realisasi Persentase jaringan irigasi Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Persentase jaringan irigasi Kabupaten Flores Timur	21,08	21,08	50

Berdasarkan tabel 3.16 menyatakan bahwa realisasi indikator Persentase jaringan irigasi Kabupaten Flores Timur mengalami peningkatan yang besar.

3.3 Akses air minum aman

Menurut Studi kualitas air minum rumah tangga di Indonesia tahun 2020, secara nasional akses air minum layak telah mencapai 93,0% sedangkan akses air minum tidak aman yang dinilai dari kontaminasi bakteri E Coli ada 81,9% dan 18,1% dinyatakan aman jika dinilai dari kontaminasi bakteri E Coli secara nasional. Berdasarkan Susenas BPS, diolah Bappenas, 2020 perkiraan capaian berdasarkan angka proyeksi Provinsi Akses Air Minum aman mencapai 5,65 % dan sedangkan pada Kabupaten Flores



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

timur berdasarkan tabel 3.14 nilai capaian indikator Akses air minum aman yaitu 90,51 dengan nilai target 86,34 dan realisasi 78,15.

■ **Masalah / Kendala :**

1. Terbatasnya alokasi anggaran dari DAU
2. Belum didatakan secara rinci potensi air baku dan air tanah dalam
3. Rata - rata di desa belum terbentuknya Kelompok Pengelola Sistem Air Minum di desa (KPSPAM)

■ **Rencana Aksi :**

1. Potensi sumber air baku di beberapa desa elevasinya di bawah permukaan warga sehingga butuh anggaran untuk mengangkat air ke titik elevasi yang lebih tinggi / Mengusulkan anggaran dari sumber lain seperti DAK
2. Perlu adanya pembaharuan penyusunan RISPAM
3. Pembentukan / Pembenahan kembali Kelompok Pengelola Sistem Air Minum di desa (KPSPAM)

3.5 Akses sanitasi aman dan layak

Akses sanitasi aman dan layak merupakan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat. Berdasarkan tabel 3.14 nilai capaian indikator Akses sanitasi aman dan layak adalah 76,18 dengan nilai target 72,18 dan realisasinya 54,99.

■ **Masalah / Kendala :**

1. Terbatasnya alokasi anggaran dari DAU
2. Instalasi pengolahan limbah tinja yang telah dibangun belum beroperasi karena badan pengelola masih dalam proses pembentukan UPTD
3. Sarana IPLT yang telah dibangun masih membutuhkan sarana penunjang seperti : air, BBM, selang penyedot

■ **Rencana Aksi :**

1. Mengusulkan anggaran dari sumber lain seperti DAK
2. Melakukan pendampingan kegiatan Sanitasi di Kabupaten
3. Pengadaan prasarana penunjang pada IPLT

3.6 Presentase jaringan IntraPemerintah

Integrasi Jaringan intra pemerintah (JIP), mencakup Penyelenggaraan jaringan yang menghubungkan antar Pusat Data antar Instansi Pemerintah di Indonesia, dan



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Penyelenggaraan sistem komunikasi yang menghubungkan antara Pusat Data dengan perangkat kerja ASN, seperti personal computer, laptop, tablet maupun smartphone, berdasarkan tabel 3.14 menyatakan bahwa besar capaian untuk indikator sasaran Presentase Jaringan IntraPemerintah yaitu 126,92% dengan target 72,23 dan realisasinya 96,75, dimana terdapat peningkatan Jaringan IntraPemerintah telah melampaui target dengan menyisahkan membuka jalur 2 5 titik blak spot untuk dari 154 titik. 5 titik diantaranya Watanura (solor Timur), Kawela (Wotan Ulumado), Gekeng Derang (Tanjung Bunga), Nawokote (Wulanggitang), Nilek Noheng (Wulanggitang).

Tabel 3.17

Sasaran Strategi 4 Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Secara Adil dan Merata

Capaian indikator sasaran “Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Secara Adil dan Merata” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat (Tingkat Kemiskinan) (%)	10,19	10	11,77	84,96

4.1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat (Tingkat Kemiskinan) (%)

Pada Maret 2023, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.592.657,-/rumah tangga miskin/bulan, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 19,96 persen atau turun 0,09 persen poin terhadap Maret 2022. sedangkan pada tingkat kabupaten Flores Timur dengan nilai capaian berdasarkan tabel 3.17 ialah 84,96 dengan target 10 dan realisasi 11,77.

Tabel 3.18

Sasaran Strategi 5 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	-	69,71	69,29	99,40



10.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)

Tujuan dan sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup adalah Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target yang ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 IKLH tahun 2023 ditetapkan target 69,71 poin. Realisasi IKLH Kabupaten Flores Timur tahun 2023 adalah 69,29 poin yang dikategorikan kedalam kriteria sedang. Tingkat capaian kinerja 99,40%.

Dalam Upaya peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Flores Timur melaksanakan 2 Program Prioritas yaitu :

1. Program Pengendalian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Program Pengelolaan Persampahan

Selain itu ada beberapa program yang sangat penting yang berfungsi untuk menunjang pencapaian target sasaran antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur merupakan hasil perhitungan secara komposit oleh komponen Indeks Lingkungan yaitu IKA, IKU dan IKTL. Nilai untuk masing-masing indeks adalah Indeks Kualitas Air (IKA)= 50 poin masuk pada kategori sedang; Indeks Kualitas Udara (IKU)= 89, 74 masuk pada kategori baik; dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL)= 64,58 masuk kategori sedang.

Dari hasil IKLH tahun 2023 melalui Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor : S.1127/PPKL/SETPPKL/REN.D/B/12/2023 perihal Penyampaian Hasil Nilai IKLH Kabupaten; merekomendasikan sebagai berikut :

■ Peningkatan Kualitas Air:

- a. Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

- b. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar
- c. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestic dan USK khususnya untuk masyarakat.
- d. Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah USK atau limbah domestic.
- e. Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha dan/atau kegiatan serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air.
- f. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah.

■ **Peningkatan Kualitas Udara :**

- a. Agar menetapkan Target IKU untuk 5 tahun dan dimasukkan kedalam RPJMD serta menyusun Perda tentang PPU. Agar dilakukan peningkatan kapasitas SDM staf melalui pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis.
- b. Melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran udara baik dari industry maupun transportasi
- c. Melakukan pemantauan kualitas udara dan menambah jumlah lokasi titik sampling dengan penggunaan APBD
- d. Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam kegiatan PPU.
- e. Membuat program kegiatan inovasi lain untuk pengendalian pencemaran udara

■ **Peningkatan Kualitas Tutupan Lahan :**

- a. Perlu melengkapi isian data Indonesia Hijau dengan menyebutkan data di kolom isian.
- b. Perlu adanya kebijakan dan peraturan dalam implementasi kegiatan yang mendukung pengendalian kerusakan lahan.

Perlu mempertahankan tutupan hutan melalui pengawasan dan intervensi kebijakan alih fungsi lahan.

A. Upaya yang dilakukan dalam melindungi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)

Dalam Upaya pencapaian target sasaran tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur melaksanakan kegiatannya yaitu dengan melakukan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, dan Udara. Target kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen yang dihasilkan, realisasi 1 dokumen, capaian kinerja 100%. Pelaksanaan kegiatan pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui Koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Tingkat kabupaten, propinsi, serta Tingkat Kementerian Lingkungan hidup terhadap Upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan terhadap Air, Udara dan tutupan lahan/tanah. Implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut dimanfaatkan sebagai data dan informasi untuk mengetahui Kualitas air, Kualitas Udara, Kualitas Tutupan Lahan, dimana hasilnya terlihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.19

Target dan Capaian Indikator pendukung pelaksanaan pencegahan Kualitas Lingkungan Hidup (Point)

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	KET.
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,71	69,29	SEDANG
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	62,28	50,0	SEDANG
3.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	80	89,74	BAIK
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	66,50	64,58	SEDANG

Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

- Representatif pengambilan sampel air untuk dilakukan pengujian masih terbatas pada satu badan Sungai, belum dilakukan mencapai 50% jumlah Sungai di kabupaten flores timur.
- Belum optimal merespon untuk melakukan pemulihan terhadap badan Sungai sampling.

Untuk memaksimalkan pencapaian target maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan mulai dari tahap perencanaan dengan melakukan inventarisasi; pencegahan dengan melakukan kegiatan penyusunan kebijakan, pembinaan, penguatan kerja sama dengan stakeholder, monitoring dan evaluasi lingkungan; penanggulangan dengan membangun infrastruktur



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

pengendalian pencemaran dan penanganan pencemaran, serta pelaksanaan pemulihan dilokasi-lokasi yang mengalami kerusakan lingkungan.

Tabel 3.20

Sasaran Strategi 6 Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
6.1	APK PAUD/TK (point)	55,48	56,61	98,84	174,60
6.2	APK SD/MI/Paket A (point)	96,47	97,35	99,09	101,79
6.3	APK SMP/MTs/ Paket B (point)	94,64	95,98	88,91	92,63
6.4	APM PAUD/TK (point)	53,99	56,74	72,22	127,28
6.5	APM SD/MI/Paket A (point)	88,47	88,85	88,67	99,80
6.6	APM SMP/MTs/ Paket B (point)	66,66	67,49	67,68	100,28
6.7	Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	110,3	100	100	100,00
6.8	Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA(%)	103,12	100	100	100,00

6.1. APK PAUD/TK (point)

APK adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi prasekolah adalah APK dan APM PAUD. Mengingat regulasi pemerintah Indonesia yang menetapkan awal usia SD/ sederajat adalah 7 tahun, maka APK dan APM PAUD yang disajikan dalam publikasi ini memuat kelompok umur 3-6 tahun. APK PAUD dihitung melalui proporsi anak 0-6 tahun yang mengikuti pendidikan prasekolah terhadap jumlah anak usia 3-6 tahun. Pada tabel 3.20 menyatakan capaian APK PAUD/TK (point) tahun 2023 yaitu 174,60% dengan target 56,61 dan realisasinya 98,84.

Berikut adalah perbandingan realisasi APK PAUD/TK (point) Nasional/ Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023, berdasarkan suber data BPS, Susenas Maret tahun 2023.



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Tabel 3.21

Perbandingan realisasi APK PAUD/TK (point) Nasional/ Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
APK PAUD/TK Nasional/ Indonesia	35,59	35,28	36,36
APK PAUD/TK Nusa Tenggara Timur	32,59	32,46	34,38
APK PAUD/TK Kabupaten Flores Timur	89,63	97,34	98,84

Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa APK Paud/TK nasional, provinsi dan kabupaten mengalami peningkatan dari tahun 2021 s/d 2023. sehingga diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten\Kota dapat segera membuat perangkat regulasi yang mewajibkan Wajib PAUD Pra SD, juga bagaimana mengisi akses daerah yang belum ada PAUD sehingga dapat memberikan layanan terhadap desa yang belum mendapat layanan PAUD, sehingga dapat mengatasi rendahnya akses APK PAUD pada daerah terpencil rendah akses terjadi karena pemerintah kurang maksimal dalam memberikan perhatian terhadap jenjang PAUD dikarenakan pemerintah masih fokus dalam penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun sebagaimana diamanatkan UU. Kedua, karena kondisi geografis negara kita yang sangat luas sehingga sulit pemerataan dilakukan.

6.2. APK SD/MI/Paket A (point)

Tabel 3.20 menyatakan bahwa nilai capaian indikator APK SD/MI/Paket A Kabupaten Flores Timur ialah 101,79% dengan target 97,35 dan realisasi 99,09 Secara teknis, APM selalu lebih rendah dibanding APK dan APS dikarenakan ketiga ukuran tersebut memiliki penyebut yang sama, tapi pembilang APM memiliki cakupan yang paling kecil. Apabila APM mencapai 100 persen, maka seluruh anak usia sekolah dikatakan bersekolah tepat waktu. Adapun, jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya pada jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Berikut adalah perbandingan realisasi APK SD/MI/Paket A (point) Nasional/ Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023, berdasarkan suber data BPS, Susenas Maret tahun 2023.



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Tabel 3.22

Perbandingan realisasi APK SD/MI/Paket A (point) Nasional/ Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
APK SD/MI/Paket A (point) Nasional/ Indonesia	106,2	106,27	105,62
APK SD/MI/Paket A (point) Nusa Tenggara Timur	113,55	113,36	111,35
APK SD/MI/Paket A (point) Kabupaten Flores Timur	101,57	101,90	99,09

Dilihat dari tren 3 tahun terakhir, angka partisipasi pada usia SD/ sederajat, secara umum cenderung mengalami penurunan. Khususnya pada tahun 2023, partisipasi SD/ sederajat mengalami penurunan yang cukup terlihat bila dibandingkan dengan. APK SD/MI/Paket A (point) Nasional/ Indonesia dan APK SD/MI/Paket A (point) Nusa Tenggara Timur, APK SD/ sederajat pada Kabupaten Flores Timur mengalami penurunan sebesar 2,81 poin.

6.3. APK SMP/MTs/ Paket B (point)

Tabel 3.20 menyatakan bahwa nilai capaian indikator APK SMP/MTs/ Paket B (point) Kabupaten Flores Timur ialah 92,64% dengan target 95,98 dan realisasi 88,91. Secara teknis, APM selalu lebih rendah dibanding APK dan APS dikarenakan ketiga ukuran tersebut memiliki penyebut yang sama, tapi pembilang APM memiliki cakupan yang paling kecil. Apabila APM mencapai 100 persen, maka seluruh anak usia sekolah dikatakan bersekolah tepat waktu. Adapun, jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya pada jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Berikut adalah perbandingan realisasi APK SMP/MTs/ Paket B (point) Nasional/ Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023, berdasarkan suber data BPS, Susenas Maret tahun 2023.



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Tabel 3.23

Perbandingan realisasi APK SMP/MTs/ Paket B (point) Nasional/ Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
APK SMP/MTs/ Paket B (point) Nasional/ Indonesia	92,8	92,11	92,51
APK SMP/MTs/ Paket B (point) Nusa Tenggara Timur	90,78	89,88	90,41
APK SMP/MTs/ Paket B (point) Kabupaten Flores Timur	94,64	92,08	88,91

Dilihat dari tren 3 tahun terakhir, angka partisipasi pada usia SD/ sederajat, secara umum cenderung mengalami penurunan. Khususnya pada tahun 2023, partisipasi SD/ sederajat mengalami penurunan yang cukup terlihat bila dibandingkan dengan. APK SMP/MTs/ Paket B (point) Nasional/ Indonesia dan APK SMP/MTs/ Paket B (point) Nusa Tenggara Timur, APK SMP/MTs/ Paket B pada Kabupaten Flores Timur mengalami penurunan sebesar 3,17 poin.

6.4. APM PAUD/TK (point)

Pada tabel 3.20 menyatakan capaian APM PAUD/TK (point) tahun 2023 yaitu 127,28% dengan target 56,74 dan realisasinya 72,22. APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi prasekolah adalah APK dan APM PAUD. Mengingat regulasi pemerintah Indonesia yang menetapkan awal usia SD/ sederajat adalah 7 tahun, maka APK dan APM PAUD yang disajikan dalam publikasi ini memuat kelompok umur 3-6 tahun. APM PAUD diukur dengan membandingkan antara jumlah anak usia 3-6 tahun yang mengikuti pendidikan prasekolah dan jumlah anak usia 3-6 tahun.

Berikut adalah perbandingan realisasi APM PAUD/TK (point) Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023,

Tabel 3.24

Perbandingan realisasi APM PAUD/TK (point) Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
APM PAUD/TK (point) Kabupaten Flores Timur	67,54	70,33	72,22



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa APM SD/MI/Paket A (point) 3 tahun terakhir mengalami peningkatan

6.5. APM SD/MI/Paket A (point)

Pada tabel 3.20 menyatakan capaian APM SD/MI/Paket A (point) tahun 2023 yaitu 99,80% dengan target 88,65 dan realisasinya 88,67. APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Berikut adalah perbandingan realisasi APM SD/MI/Paket A (point) Nasional/ Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023, berdasarkan suber data BPS, Susenas Maret tahun 2023.

Tabel 3.25

Perbandingan realisasi APM SD/MI/Paket A (point) Nasional/ Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
APM SD/MI/Paket A Nasional/ Indonesia	97,8	97,88	97,89
APM SD/MI/Paket A Nusa Tenggara Timur	96,04	96,08	95,98
APM SD/MI/Paket A Kabupaten Flores Timur	67,54	70,33	88,67

Hasil Susenas Maret 2023 menunjukkan bahwa APM SD/MI/Paket A (point) sebesar 31.74. Jika dibandingkan dengan kondisi setengah dekade yang lalu (tahun 2021), APM SD/MI/Paket A menunjukan Kenaikan mendekati target nasional 2023 sebesar 97,89. dimana makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya 100%.

6.6. APM SMP/MTs/ Paket B (point)

Pada tabel 3.20 menyatakan capaian APM SMP/MTs/ Paket B (point) tahun 2023 yaitu 100,28 dengan target 67,49 dan realisasinya 67,68 APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Berikut adalah perbandingan realisasi APM SMP/MTs/ Paket B (point) Nasional/ Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023, berdasarkan suber data BPS, Susenas Maret tahun 2023.



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Tabel 3.26

Perbandingan realisasi APM SMP/MTs/ Paket B (point) Nasional/ Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
APM SMP/MTs/ Paket B (point) Nasional/ Indonesia	80,59	80,89	81,35
APM SMP/MTs/ Paket B (point) Nusa Tenggara Timur	69,99	70,05	73,47
APM SMP/MTs/ Paket B (point) Kabupaten Flores Timur	69,9	68,72	67,68

Hasil Susenas Maret 2023 menunjukkan bahwa APM SD/MI/Paket A (point) sebesar 67,68 diman mengalami penurunan dibandingkan dengan APM SMP/MTs/ Paket B (point) Nasional/ Indonesia dan APM SMP/MTs/ Paket B (point) Nusa Tenggara Timur yang mengalami peningkatan di 3 tahun terakhir.

6.7. Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)

Mayoritas pemuda di Indonesia merupakan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat pada 2023. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), persentase pemuda yang menamatkan pendidikannya hingga SMP/sederajat sebesar 48,08%, dan berdasarkan Tabel 3.20 Capaian Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP ialah 100(%) dengan nilai target 100 dan realisasinya 100.

Berikut adalah perbandingan realisasi Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%) Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023, berdasarkan suber data BPS, Susenas Maret tahun 2023.

Tabel 3.27

Perbandingan realisasi Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%) Kabupaten Flores Timur dari tahun 2021 s/d 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%Kabupaten Flores Timur	110,26	100	100

Hasil Susenas Maret 2023 menunjukkan bahwa Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP % sebesar 100 yang dimana tidak mengalami peningkatan di 3 tahun terakhir.



6.8. Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA(%)

Mayoritas pemuda di Indonesia merupakan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat pada 2023. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), persentase pemuda yang menamatkan pendidikannya hingga SMA/sederajat sebesar 30,22%, dibandingkan dengan Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Tabel 3.20 Capaian Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP ialah 100(%) dengan nilai target 100 dan realisasinya 100

Beberapa hal yang berhasil diidentifikasi sebagai penyebab dari belum tercapainya tingkat kinerja yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya alokasi anggaran untuk mendukung penyusunan program dan kegiatan serta pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Penyelesaian sejumlah paket pekerjaan tidak tepat waktu
3. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS baik Satdik Negeri dan Swasta belum tertib dan tepat waktu
4. Terbatasnya sarana yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan.
5. Terbatasnya sumber daya manusia aparatur SKPD dinas PKO (aspek jumlah, pendidikan, disiplin dan kinerja).
6. Pengendalian dan pengawasan internal SKPD belum maksimal.

Strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan adalah :

1. Pengalokasian anggaran dan peralatan yang memadai untuk mendukung kegiatan pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi [pelaksanaan kegiatan.
2. Ketaatan pelaksanaan program/kegiatan sesuai kalender kerja tahunan yang telah ditetapkan.
3. Perlu adanya koordinasi yang terintegrasi sejak awal tahun anggaran dalam rangka perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana BOS.
4. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja secara intern.
6. Menegakan integritas nilai etika dan praktik pembinaan sumber daya manusia melalui penyusunan dan penyerapan aturan perilaku serta kebijakan lain yang berisi tentang standar perilaku etis, serta tindak disiplin yang tepat.



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Tabel 3.28

Sasaran Strategi 7 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
7.1	Indeks Keluarga Sehat (point)	0,12	0,29	0,138	47,59
7.2	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 KLH)	149	124	162	130,65
7.3	Angka Kematian Bayi (AKB) (Per1000 KLH)	10,5/1000	10	15,4	154,00
7.4	Prevalensi Stunting (%)	20,9	17	18,10	106,47
7.5	Cakupan pelayanan vaksinasi Covid 19 (Vaksin kedua) (%)	35,39	75	76,71	102,28

7.1. Indeks Keluarga Sehat (Point)

Pada tabel 3.28 menyatakan capaian indikator 47,59 dengan target 0,29 dan realisasi 0,138. IKS merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial dan lingkungan. Nilai IKS ini merupakan akumulasi dari 12 indikator PIS PK dan dikategorikan kedalam 3 kelompok yakni, keluarga sehat bila nilai IKS > 0,8, keluarga pra sehat bila nilai IKS 0,5-0,8 dan keluarga tidak sehat bila nilai IKS < 0,5.

12 indikator sebagai berikut :

1. Keluarga mengikuti program KB
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan
3. Bayi mendapatkan imunisasi yang lengkap
4. Bayi mendapatkan ASI eksklusif
5. Balita mendapat pemantauan pertumbuhan
6. Penderita TBC mendapatkan pengobatan sesuai standar
7. Penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan
8. Penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapat pengobatan
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok
10. Keluarga merupakan anggota jaminan kesehatan nasional
11. Keluarga memiliki akses sarana air bersih
12. Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

■ Masalah / Kendala yang di hadapi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi indeks keluarga sehat, yaitu, banyak begadang, merokok, kurang istirahat, kurang olahraga, banyak makan junk food dan berlemak serta kebiasaan atau rutinitas yang kurang sehat lainnya.

■ Rencana Aksi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi indeks keluarga sehat, yaitu, sosial, ekonomi, gizi seimbang, fisik, mental dan lingkungan

Tabel 3.29

Perbandingan realisasi Indeks Keluarga Sehat
tahun 2021 s.d 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Keluarga Sehat	-	-	0,138

7.2. Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 KLH)

Angka kematian ibu merupakan salah satu indikator yang mampu menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Kematian ibu adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera. Nilai capaian dari Angka kematian ibu, yaitu 130,65% kategori dengan nilai target 124 dan realisasinya 162.

■ Masalah / Kendala yang di hadapi

Penyebab terbanyak angka kematian ibu adalah pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, gangguan metabolik dan ada juga faktor lain seperti ekonomi, lingkungan dan adat istiadat. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada indikator kematian tersebut dan juga dapat menilai kinerja pemerintah.

■ Rencana Aksi

Ada beberapa faktor yang bisa menurunkan angka kematian ibu, yaitu :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan imunisasi tetanus bagi wanita usia subur dan ibu hamil
3. Pemberian tablet tambah darah
4. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
5. Pelayanan kesehatan ibu nifas
6. Penyelenggaraan kelas ibu hamil



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

7.3. Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 KLH)

Angka kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada penduduk 0-11 bulan (Kurang dari 1 tahun). Angka ini digunakan sebagai indikator kemajuan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator derajat kesehatan. Nilai capaian dari Angka kematian bayi, yaitu 154,00% kategori Kurang Baik dengan nilai target 10 dan realisasinya 15,4

■ Masalah / Kendala yang di hadapi

Penyebab langsung dari kematian bayi adalah berat badan lahir rendah (BBLR), asfiksia dan kelainan kongenital sedangkan yang menjadi penyebab kematian tidak langsung antara lain riwayat komplikasi pada ibu

■ Rencana Aksi

Beberapa faktor pendukung yang bisa menurunkan angka kematian bayi, yaitu :

1. Memberikan pelayanan yang berkesinambungan berfokus pada aspek pencegahan melalui pendidikan kesehatan dan konseling
2. Promosi kesehatan
3. Pertolongan persalinan normal dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan perempuan serta melakukan deteksi dini pada kasus kematian bayi.

Tabel 3.30

Perbandingan realisasi Angka Kematian Bayi
tahun 2021 s.d 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Angka Kematian Bayi	45	49	15,4

Pada tabel 3.30 menyatakan bahwa nilai realisasi dari tahun 2021 s/d 2023 mengalami penurunan dan hal ini dapat kita simpulkan menjadi indikator Angka Kematian Bayi berhasil diturunkan.

7.4. Prevalensi Stunting (%)

Prevalensi balita stunting digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara. Prevalensi balita stunting mengacu pada presentase jumlah di suatu populasi yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya. Pada umumnya stunting terjadi pada balita khususnya pada usia 1-3 tahun. Pada rentang usia tersebut, Ibu sudah bisa melihat apakah si anak terkena stunting atau tidak. Meski baru dikenali setelah lahir, ternyata stunting bisa berlangsung sejak si anak masih berada dalam kandungan.



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Nilai capaian dari Prevalensi Stunting, yaitu 106,47% kategori Baik Sekali dengan nilai target 17 dan realisasinya 18,10.

■ Masalah / Kendala yang dihadapi

Penyebab stunting adalah malnutrisi dalam jangka panjang (Kronis). Kekurangan asupan gizi ini bisa terjadi sejak bayi masih di dalam kandungan karena ibu tidak mencukupi kebutuhan nutrisi selama kehamilan.

■ Rencana Aksi

Faktor - faktor yang bisa mencegah stunting, yaitu :

1. Periksa kehamilan secara rutin
2. Memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil
3. Beri ASI eksklusif minimal selama 6 bulan
4. Dampingi dengan MPASI lengkap dan bergizi
5. Terus pantau tumbuh kembang anak
6. Melengkapi imunisasi dan
7. Selalu jaga kebersihan lingkungan

Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting. Pangan hewani mempunyai kandungan zat gizi yang lengkap, kaya protein hewani dan vitamin yang sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Asupan protein hewani pada ibu hamil sangat penting dalam mencegah stunting pada janin yang dikandungnya.

Tabel 3.31

Perbandingan realisasi Prevalensi Stunting
tahun 2021 s.d 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Prevalensi Stunting	-	-	18,1

7.5. Cakupan Pelayanan Vaksinasi Covid - 19 (Vaksin Kedua) (%)

Masyarakat perlu memahami perlunya vaksinasi sangat penting untuk melindungi masyarakat dari penularan covid - 19 sekaligus memulihkan kondisi sosial dan ekonomi yang menurun akibat pandemi. Selain itu vaksinasi covid - 19 juga bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat virus mematikan ini. Tujuan vaksinasi covid - 19 ini untuk memberikan antigen tubuh, sehingga dapat merangsang terbentuknya imunitas atau antibodi pada tubuh. Dengan begitu, kekebalan tubuh bisa terbentuk, dan risiko yang dapat ditimbulkan akibat virus corona dapat diminimalkan secara optimal. Nilai capaian dari Cakupan



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Pelayanan Vaksinasi Covid - 19 (Vaksin Kedua), nilai capaian pada tabel 3.31 yaitu 102,28% dengan nilai target 75 dan realisasinya 76,71.

■ Masalah / Kendala yang dihadapi

Klaster - klaster covid - 19 seperti rumah sakit, perkantoran, pasar, perusahaan dan lain-lain, fasilitas kesehatan di rumah sakit rujukan. Laboratorium serta ketersediaan SDM tenaga kesehatan.

■ Rencana Aksi

Faktor - faktor yang dapat mencegah tertular covid - 19, yaitu :

1. Menggunakan masker
2. Mencuci tangan secara rutin
3. Menjauhi kerumunan
4. Rutin bersihkan gawai
5. Bersihkan lingkungan rumah
6. Mendapatkan vaksin covid - 19
7. Meningkatkan daya tahan tubuh

Tabel 3.32

Sasaran Strategi 8 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan KB

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan KB” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
8.1	Angka Kelahiran Total (TFR) (%)	3,2	3,10	2,58	83,23

8.1. Angka Kelahiran Total (TFR) (%)

Berdasarkan tabel 3.32 nilai capaian Angka Kelahiran Total (TFR) adalah 83,23% dengan realisasi 2,58 dan target nya 3,10 Total Fertility Rate (TFR) adalah salah satu indikator yang digunakan dalam demografi untuk mengukur jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama usia reproduktifnya. TFR sering digunakan untuk menganalisis tren pertumbuhan populasi dan potensi perubahan dalam struktur demografi suatu negara atau wilayah. TFR diukur dalam jumlah rata-rata anak per wanita dalam kelompok usia reproduktif (biasanya antara 15-49 tahun). Konsep TFR melibatkan asumsi bahwa seorang wanita akan mengikuti pola fertilitas yang teramati pada saat pengukuran dan akan hidup sepanjang usia reproduktifnya.



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Beberapa poin penting tentang Total Fertility Rate (TFR):

1. TFR dan Kebijakan Keluarga Berencana: TFR sering digunakan oleh pemerintah dan organisasi untuk mengukur efektivitas kebijakan keluarga berencana dan upaya pengendalian pertumbuhan populasi. Jika TFR berada di bawah angka 2,1, biasanya dianggap bahwa populasi akan mengalami penurunan alami dalam jangka panjang.
2. TFR dan Struktur Demografi: TFR juga membantu dalam memahami struktur demografi suatu populasi. Jika TFR tinggi, populasi cenderung memiliki proporsi besar anak-anak dan remaja, yang dapat memiliki dampak pada ekonomi dan layanan masyarakat.
3. Pengaruh Faktor-faktor Sosial dan Ekonomi: TFR dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan wanita, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, status sosial ekonomi, budaya, agama, dan kebijakan pemerintah terkait keluarga berencana.
4. Dampak pada Pertumbuhan Populasi: TFR yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan populasi yang cepat, sementara TFR yang rendah dapat menyebabkan pertumbuhan populasi yang lambat bahkan menurun.
5. Perubahan dalam Waktu: TFR tidak statis; itu dapat berubah seiring waktu karena perubahan dalam norma sosial, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. TFR yang semula tinggi dalam suatu negara bisa menurun secara signifikan karena perubahan dalam kebijakan atau perubahan budaya.

TFR adalah alat penting dalam analisis demografi, karena memberikan wawasan tentang tren pertumbuhan populasi dan implikasinya terhadap kebijakan dan pembangunan. Meskipun TFR dapat memberikan informasi yang berharga, penting juga untuk memahami bahwa ini hanyalah salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi perubahan populasi dalam suatu negara.

Tabel 3.33

Sasaran Strategi 9 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
9.1	Persentase PMKS (%)	11,58	10,42	16,49	158,25

9.1. Persentase PMKS (%)



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Berdasarkan tabel 3.33 nilai capaian Persentase PMKS (%) adalah 158,25% dengan target 10,42 dan realisasi 16,49. Capaian persentase PMKS/ Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat yang mendapatkan bantuan di tahun 2023 sebesar 15,35% atau sebanyak 5.222 orang dari PMKS yang seharusnya menerima bantuan sebesar 34.020 orang. Ini artinya persentase PMKS yang mendapatkan bantuan masih rendah di tahun 2023 yaitu. Jumlah PMKS yang diberikan bantuan sosial selama tahun 2023 sebanyak 5.222 jiwa dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Bantuan untuk para penyandang disabilitas dalam bentuk alat bantu, permakanan, dan sandang sebanyak 310 orang disabilitas
2. Bantuan untuk lansia terlantar dalam bentuk alat bantu, permakanan, dan sandang sebanyak 254 lansia
3. Bantuan untuk anak terlantar dalam bentuk alat bantu, permakanan, dan sandang serta bantuan atensi dari kementerian sosial sebanyak 768 anak terlantar (anak yatim piatu)
4. Bantuan sosial bagi anak stunting dalam bentuk pemberdayaan anak ayam beserta pakan dan vitamin sebanyak 20 anak stunting
5. Bantuan sosial dalam bentuk beras bagi keluarga miskin sebagai KPM Penerima Bantuan Kemiskinan Ektrim sebanyak 337 KPM
6. Bantuan bagi korban bencana alam dan bencana sosial sebanyak 3870 jiwa.
Bantuan sosial bagi warga KAT di Desa Aransina Kecamatan Tanjung Bunga sebanyak 44 Keluarga

Tabel 3.34

Sasaran Strategi 10
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
10.1	Indeks Pembangunan Gender (point)	91,32	19,24	92,08	99,83

3.1. Indeks Pembangunan Gender (point)

Bedasarkan Tabel 3.34 nilai capaian indikator Indeks Pembangunan Gender (point) ialah 9983% dengan nilai target 92,24 dan realisasi 92,08. Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Tabel 3.35

Sasaran Strategi 11 Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
11.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	0	24,725	N/A	0,00
11.2	Persentase wirausaha muda (%)	1,68	1,71	N/A	0,00

11.1. Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)

Berdasarkan Tabel 3.35 nilai Capaian Indikator Persentase organisasi pemuda yang aktif (%) yaitu N/A dengan nilai target 24,725.dan nilai realisasi N/A,pada inidkator ini tilah berjalan realisasi kegiatannya.

11.2. Persentase wirausaha muda (%)

Berdasarkan Tabel 3.35 nilai Capaian Indikator Persentase wirausaha muda (%) yaitu N/A dengan nilai target 1,71.dan nilai realisasi N/A,pada inidkator ini tilah berjalan realisasi kegiatannya.

Tabel 3.36

Sasaran Strategi 12 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik” adalah sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
12.1	Predikat Sakip (%)	52,00	100	53,06	53,06

12.1. Predikat Sakip

Berdasarkan tabel 3.36 menyatakan nilai capaian indikator predikat Sakip ialah 53,06% dengan Nilai Target 100 dan Realisasi 53,06. Nilai Akuntabilitas Kinerja menggambarkan sudah sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakannya. Nilai tersebut diperoleh melalui Evaluasi Implementasi SAKIP yang dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan kebijakan tersebut, hasil penilaian evaluasi SAKIP di instansi pemerintah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.37

Hasil penilaian evaluasi SAKIP di instansi pemerintah dapat dikategorikan sebagai berikut

No.	Nilai	Predikat	Interpretasi
1.	> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
2.	> 80 - 90	A	Memuaskan
3.	> 70 - 80	BB	Sangat Baik
4.	> 60 - 70	B	Baik
5.	> 50 - 60	CC	Cukup (Memadai)
6.	> 30 - 50	C	Kurang
7.	> 0 - 30	D	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel 3.37, Instansi pemerintah yang memiliki Nilai Akuntabilitas Kinerja “Baik” adalah instansi pemerintah yang nilai total akuntabilitas kinerja di atas 60 (enam puluh) atau memiliki predikat B ke atas.

Tabel 3.38

Rincian hasil evaluasi Sakip tahun 2023

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai		Selisih Nilai
		2022	2023	
a. Perencanaan Kinerja	30	19,50	19,70	0,2



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

b. Pengukuran Kinerja	30	14,93	15,16	0,23
c. Pelaporan Kinerja	15	7,44	7,56	0,12
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	10,60	10,64	0,04
Nilai Hasil Evaluasi	100	52,47	53,06	0,59
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC	

Pada tabel 3.38 Perkembangan instansi pemerintah dengan akuntabilitas kinerja tahun 2023 masih belum signifikan “Cukup (Memadai)” kurang meningkat, baik itu pada perencanaan Kinerja , Pengukurang Kinerja, Pelaporan Kinerja maupun Evaluasi Kinerja.

Tabel 3.39

Presentase Nilai Evaluasi Sakip tahun 2021 s/d 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Predikat Sakip	52,00	52,47	53,06

Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan persentase instansi pemerintah yang memiliki Nilai Akuntabilitas Kinerja Baik (kategori “B”) antara lain:

1. Pimpinan instansi belum sepenuhnya terlibat langsung dan aktif dalam membangun dan monitoring implementasi SAKIP;
2. Instansi pemerintah masih dalam proses menyempurnakan SAKIP yang diterapkan dengan berpedoman pada peraturan baru, yaitu Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen-PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Personel yang secara kuantitas dan kualitas masih belum cukup untuk melakukan bimbingan teknis dan asistensi secara optimal;
4. Anggaran yang terbatas mengakibatkan tidak semua bimbingan teknis dan asistensi dapat dilaksanakan secara langsung bagi daerah yang memiliki kendala jaringan.
5. Para stakeholder belum bersinergi secara optimal.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Flores Timur, pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Flores Timur secara intensif mengikuti sosialisasi dan pendampingan atas penerapan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah bersama Kementerian PANRB.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel antara lain:

- 1) Mengoptimalkan pendampingan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara virtual, melalui aplikasi zoom, maupunchat interaktif, karena belum memungkinkan pertemuan tatap muka kepada Kementerian PANRB, terutama terkait kebijakan baru, yaitu PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen-PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- 2) Memprioritaskan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dan Perangkat Daerah dalam mengikuti asistensi instansi pemerintah yang berpredikat di bawah B oleh PermenPANRB di Kupang.

Tabel 3.40

Sasaran Strategi 13 Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
13.1	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) KPK.	0	83,2	N/A	0,00

13.1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) KPK.

Berdasarkan Tabel 3.40 nilai Capaian Indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) KPK yaitu 0,00% dengan nilai target 83,2.dan nilai realisasi N/A,pada inidkator ini telah berjalan realisasi kegiatannya.

Tabel 3.41

Sasaran Strategi 14 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
14.1	Indeks Kepuasan masyarakat (point)	81,60	80,52	83,2	103,33



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

14.1 Indeks Kepuasan

Pada tabel 3.41 memiliki capaian nilai 10,33 dengan target 80,52 dan realisasinya 83,2. Dalam perhitungan nilai IKM di perlukan total dari nilai Persepsi Per Unsur dan Total Unsur Terisi dan dikali Nilai Penimbang. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 3.42

IKM Unit Pelayanan x 25

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1.	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak baik
2.	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang baik
3.	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4.	3,26-4,00	81,26-100	A	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas, Instansi pemerintah yang memiliki Nilai Akuntabilitas Kinerja “Baik” adalah instansi pemerintah yang nilai total akuntabilitas kinerja di atas 62,51 (enam puluh dua koma lima puluh satu) atau memiliki predikat B ke atas.

Tabel 3.43

Realisasi Indeks Kepuasan tahun 2021 s/d 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Kepuasan	81,18	80,52	82,86

Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 82,86. Nilai IKM di lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2023.

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 4 (empat) Perangkat Daerah telah menyampaikan laporannya. Dari seluruh Perangkat Daerah yang telah melaporkan hasil SKM, belum dilakukan rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

Hasil analisis data SKM Menunjukkan bahwa unsur sarana dan prasarana merupakan unsur dengan nilai rendah pada semua unit penyelenggara pelayanan publik, diikuti oleh unsur perilaku pelaksana dan waktu penyelesaian.

Tabel 3.44

Sasaran Strategi 15 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran		Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
15.1	Opini BPK (Opini)		WDP	WDP	WTP	100

Berdasarkan Tabel 3.44 menyatakan bahwa capaian untuk indikator Opini BPK (Opini) ialah 100% dengan target Opini WDP dan mendapat realisasi mendapatkan opini WTP. Atas LKPD TA 2022 Kabupaten Flores Timur, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan opini WTP ini merupakan yang kedua kalinya bagi Kabupaten Flores Timur. Walaupun telah memperoleh opini WTP, masih terdapat beberapa catatan yang menjadi perhatian yang disajikan dalam 14 temuan BPK pada Buku II. Permasalahan-permasalahan tersebut bersifat tidak material atau tidak mempengaruhi kewajaran LKPD TA 2022, sehingga BPK memberikan opini WTP.



Gambar 3.1
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Flores Timur TA 2022.

Kupang, 26 Juni 2023 – Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT, Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT, Slamet Riyadi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Flores Timur



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

TA 2022. LHP LKPD tersebut diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur (Yoseph Paron Kabon) dan Bupati Flores Timur (Doris Alexander Rih).

Tabel 3.45

Sasaran Strategi 16 Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
16.1	Indeks Profesional ASN (point)	0	36,14	35,87	99,25

16.1 Indeks Profesional ASN (point)

Pada tabel 3.45 menjelaskan bahwa nilai capaian yaitu 99,25, dengan target 36,14 dan realsasinya 35,87. Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

■ Rencana Tindak Lanjut Pengukuran IP ASN

Sistem ini ditopang oleh ASN yang mampu bekerja sesuai bidangnya. Memiliki keahlian dan keterampilan yang dipahami dan dikuasai, sesuai pekerjaannya. Ini bisa terwujud dengan pembagian tugas secara proporsional. Contoh sederhana, masih ditemukan ASN yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan kualifikasi keahlian/pendidikannya. Menukilkan penyelesaian sasaran strategis Kementerian Agama dalam meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Tentunya amanah yang tertuang dalam Perkin Tahun 2023 tersebut menjadi PR kita bersama.

Percepatan penyelesaian persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71), diatur dalam Pasal 5 Peraturan BKN Nomor 8/2019. Secara teknis terdapat 5 (lima) prinsip untuk mengukur IP ASN antara lain: koheren, kelayakan, akuntabel, dapat ditiru dan multi dimensional.

3.2

Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kab. Flores Timur

Akuntabilitas keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan aspek keuangan yang digunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPD maupun



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama. Gambaran Realisasi APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.46

Anggaran dan Realisasi APBD Kab. Flores Timur TA. 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.160.793.771.033	1.146.683.420.280,84	98,78
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51.683.483.652	50.230.790.007,84	97,19
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	51.683.483.652	50.230.790.007,84	97,19
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.096.229.516.701	1.087.497.827.803,00	99,20
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.880.770.680	8.954.802.470,00	69,52
5	BELANJA DAERAH	1.214.709.310.732	1.112.050.119.412,45	91,55
5.1	BELANJA OPERASI	821.445.764.273	748.481.034.899,45	91,12
	JUMLAH BELANJA OPERASI	821.445.764.273	748.481.034.899,45	91,12
5.2	BELANJA MODAL	128.870.503.777	103.487.957.556,00	80,30
	JUMLAH BELANJA MODAL	128.870.503.777	103.487.957.556,00	80,30
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.518.234.437	518.234.437,00	11,47
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	4.518.234.437	518.234.437,00	11,47
5.4	BELANJA TRANSFER	259.874.808.245	259.562.892.520,00	99,88
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	259.874.808.245	259.562.892.520,00	99,88
	JUMLAH BELANJA	1.214.709.310.732	1.112.050.119.412,45	91,55
	SURPLUS/DEFISIT	(53.915.539.699)	34.633.300.868,39	(64,24)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	53.915.539.698	53.829.609.698,00	99,84
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.915.539.698	55.829.609.698,00	99,85
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.915.539.698	55.829.609.698,00	99,85
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	2.000.000.000,00	100,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	2.000.000.000,00	100,00



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

	PEMBIAYAAN NETTO	53.915.539.698	53.829.609.698,00	99,84
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(0)	88.462.910.566,39	0,00

Sumber : Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Flores Timur Tahun 2023 (Sebelum Audit BPK RI)

Secara umum pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp. **1.160.793.771.033,00-** dan mencapai realisasi sebesar Rp. **1.146.683.420.280,84** atau **98,78%**. Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. **1.214.709.310.732,00-** dan mencapai realisasi sebesar Rp. **1.112.050.119.412,45-** atau **91,55%**. Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar RP. **53.915.539.698** dengan realisasi anggran Rp. **53.829.609.698,00** atau **99,84%**, sisa lebih pembiayaan anggaran ialah (0) dan realisasi nya Rp.**88.462.910.566,3** atau **0,00%**.



**BAB IV
PENUTUP**

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Kementerian PANRB tahun 2022 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada peraturan bupati nomor 23 tahun 2023.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan dunia usaha. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 dapat dinyatakan “cukup berhasil”, karena realisasi sebanyak 19 indikator berhasil dari 42 Target (hampir setengah) Indikator Kinerja Sasaran Strategis 100% ke atas, dengan rincian:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 15 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 4 target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 19 target: dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 4 target.

Selain itu, secara keseluruhan capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan nilai capaian 90,28%. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penerbitan kebijakan terkait pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi, kordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah khususnya kabupaten/kota dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Ite Lewotolok, No. : - Telp. (0383) 21091 Fx. (0383) 21091
L A R A N T U K A

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Larantuka, 27 Maret 2024

Inspektur Daerah
Kabupaten Flores Timur

Antonius Lebi Raya, S.Sos., MAP

Pembina Utama Muda

NIP. 19651023 199503 1 002

**PENGUKURAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1. Terwujudnya Daya Saing Daerah							
1.	Terwujudnya daya saing Ekonomi	1 Pertumbuhan PDRB	Point	4,59	3,15	68,63	CUKUP BAIK
		2 Laju Inflasi Daerah	Point	0,45	3,33	13,51	KURANG BAIK
		3 Indeks Desa Membangun	IDM	41,67	95,45	229,06	BAIK SEKALI
2	Terwujudnya Daya Saing SDM	4 Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,04	8,04	100,00	BAIK SEKALI
		5 Angka Harapan lama sekolah	Tahun	13,44	12,95	96,35	BAIK SEKALI
		6 Angka Drop Out/ Angka Putus Sekolah (APS)	%	1,20	0,65	54,17	CUKUP BAIK
		7 Rasio lulusan S1, S2, S3 (per 10.000 jiwa)	Per 10.000 jiwa	500	659,24	131,85	BAIK SEKALI
		8 Angka melek huruf	%	99,54	98,79	99,25	BAIK SEKALI
		9 Angka harapan hidup	Tahun	65,7	65,5	99,70	BAIK SEKALI
		10 Angka kesakitan (per 100 jiwa)	Per 100 jiwa	14	10,83	77,36	BAIK
		11 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,56	3,79	93,93	BAIK SEKALI
3.	Terwujudnya daya saing Infrastruktur	12 Tingkat Kemantapan Jalan	%	74,33	77,54	104,32	BAIK SEKALI
		13 Rasio Konektivitas	Rasio	63,94	N/A	0,00	N/A
		14 Persentase jaringan irigasi	%	21,58	50	231,70	BAIK SEKALI
		15 Akses air minum aman	%	86,34	78,15	90,51	BAIK SEKALI
		16 Akses sanitasi aman dan layak	%	72,18	54,99	76,18	BAIK
		17 presentase jaringan IntraPemerintah	%	76,23	96,75	126,92	BAIK SEKALI
2. Terwujudnya Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan							
4.	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata	18. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat (Tingkat Kemiskinan) %	%	10	11,77	84,96	BAIK
5.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	19. Indeks Kualitas Lingkungan hidup (point)	Point	69,71	69,29	99,40	BAIK SEKALI
3. Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas							
6.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	20 APK PAUD/TK (point)	Point	56,61	98,84	174,60	BAIK SEKALI
		21 APK SD/MI/Paket A (point)	Point	97,35	99,09	101,79	BAIK SEKALI
		22 APK SMP/MTs/ Paket B (point)	Point	95,98	88,91	92,63	BAIK SEKALI
		23 APM PAUD/TK (point)	Point	56,74	72,22	127,28	BAIK SEKALI
		24 APM SD/MI/Paket A (point)	Point	88,85	88,67	99,80	BAIK SEKALI
		25 APM SMP/MTs/ Paket B (point)	Point	67,49	67,68	100,28	BAIK SEKALI
		26 AngkaMelanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	%	100	100	100,00	BAIK SEKALI
		27 Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA(%)	%	100	100	100,00	BAIK SEKALI
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	28 Indeks Keluarga Sehat (point)	Point	0,29	0,138	47,59	KURANG BAIK
		29 Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 KLH)	Per 100.000 KLH	124	162	130,65	BAIK SEKALI
		30 Angka Kematian Bayi (AKB) (Per1000 KLH)	Per1000 KLH	10	15,4	154,00	BAIK SEKALI
		31 Prevalensi Stunting (%)	%	17	18,10	106,47	BAIK SEKALI
		32 Cakupan pelayanan vaksinasi Covid 19 (Vaksin kedua) (%)	%	75	76,71	102,28	BAIK SEKALI

8.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk dan layanan KB	33	Angka Kelahiran Total (TFR) (%)	%	3,10	2,58	83,23	BAIK
9.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	34	Persentase PMKS (%)	%	10,42	15,35	147,31	BAIK SEKALI
10.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	35	Indeks Pembangunan Gender (point)	Point	92,24	92,08	99,83	BAIK SEKALI
11.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah	36	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	%	24,725	N/A	0,00	N/A
		37	Persentase wirausaha muda (%)	%	1,71	N/A	0,00	N/A
4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik								
12.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	38	Predikat Sakip	%	100	53,06	53,06	KURANG BAIK
13)	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	39	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) KPK.	Point	83,2	N/A	0,00	N/A
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	40	Indeks Kepuasan masyarakat (point)	Poin	80,52	83,2	103,33	BAIK SEKALI
15	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	41	Opini BPK (Opini)	Opini	WDP	WTP	100,00	BAIK SEKALI
16	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara	42	Indeks Profesional ASN	Point	36,14	35,87	99,25	BAIK SEKALI

Larantuka, 27 Maret 2024
PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR
DRS. MORIS ALEXANDER RIHI, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KABUPATEN FLORES TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. DORIS ALEXANDER RIHI, M.Si
Jabatan : PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Larantuka, 27 Maret 2024

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,



Drs. DORIS ALEXANDER RIHI, M.Si

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kabupaten Flores Timur

LAMPIRAN :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KABUPATEN FLORES TIMUR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya Daya Saing Daerah			
1.	Terwujudnya daya saing Ekonomi	1 Pertumbuhan PDRB	%	100
		2 Indeks Desa Membangun	Poin	41,67
2	Terwujudnya Daya Saing SDM	3 Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,36
		4 Angka Harapan lama sekolah	Tahun	13,96
		5 Angka Drop Out	%	1,17
		6 Angka melek huruf	%	99,56
		7 Angka harapan hidup	%	65,9
		8 Angka kesakitan (per 100 jiwa)	%	13,42
		9 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,31
3.	Terwujudnya daya saing Infrastruktur	10 Tingkat Kemantapan Jalan	%	76,83
		11 Rasio Konektivitas	%	21,58
		12 presentase jaringan Irigasi	%	86,34
		13 Akses Air Minum Aman	%	72,18
		14 Akses Sanitasi Aman dan Layak	%	76,23
		15 presentase jaringan Intra Pemerintah	%	76,23
2.	Terwujudnya Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan			
4.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	17 Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat	%	10,00
5.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	18. Indeks Kualitas Lingkungan hidup (point)	Poin	100 %
		19 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	100 %

Perencanaan Kinerja Tahun 2024 Kabupaten Flores Timur

3. Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas				
6.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	20	APK PAUD/TK (point)	% 57,74
		21	APK SD/MI/Paket A (point)	% 98,24
		22	APK SMP/MTs/ Paket B (point)	% 97,32
		23	APM PAUD/TK (point)	% 59,49
		24	APM SD/MI/Paket A (point)	% 89,23
		25	APM SMP/MTs/ Paket B (point)	% 68,33
		26	Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	% 100
		27	Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA(%)	% 100[
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	28	Indeks Keluarga Sehat (point)	Poin 0,46
		29	Angka Kematian Ibu(AKI) (Per 100.000 KLH)	Per100.000 KLH 99/ 100.000
		30	Angka Kematian Bayi (AKB) (Per1000 KLH)	Per1000 KLH 8,7/ 1000
		31	Prevalensi Stunting (%)	% 13
		32	Cakupan pelayanan vaksinasi Covid 19 (Vaksin kedua) (%)	% 77
8.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk dan layanan KB	33	Angka Kelahiran Total (TFR) (%)	% 3
9.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	34	Persentase PMKS (%)	% 9,38

10.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	35	Indeks Pembangunan Gender (point)	Poin	93,16
		36	Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan (Kasus)	Kasus	19
		37	Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak (Kasus)	Kasus	23
11.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah	38	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	%	49,48%
		39	Persentase wirausaha muda (%)	%	1,74 %
4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
11.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah	40	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	%	49,48%
		41	IndeksKepuasan masyarakat (point)	Poin	82,86
		42	Opini BPK(Opini)	Opini	WTP

ROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024

No.	PROGRAM	ANGGARAN	RETERANGAN
Terwujudnya Daya Saing Daerah			
1	Sasaran 1 : Terwujudnya daya saing Ekonomi		
1)	Program Penyuluhan Pertanian (Pertanian)	564.607.439,00	APBD
2)	Program Penyuluhan Pertanian (Perkebunan)	108.483.825,00	APBD
3)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Pertanian)	499.999.949	APBD
4)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Perkebunan)	228.961.327	APBD
5)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Pertanian)	20.754.905.240	APBD
7)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.627.523.106	DAK & DAU
8)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.109.087.330	DAK & DAU
9)	Program Pengembangan UMKM	170.171.781	APBD
10)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	223.679.850	APBD
11)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	109.999.422	APBD
12)	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	144.999.314	APBD
13)	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	84.985.406	APBD
14)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	40.499.755	APBD
15)	Program Promosi Penanaman Modal	29.992.250	APBD
16)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	141.000.000	APBD II

17)	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	120.000.000	APBD II
18)	Program Pemasaran Pariwisata	120.000.000	APBD II
19)	Program Pengembangan Kebudayaan	560.000.000	APBD II
20)	Program Pembinaan Sejarah	21.000.000	APBD II
21)	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100.000.000	APBD II
22)	Program Penataan Desa	89.844.830	APBD
23)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	269.926.595	APBD
24)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat	3.457.365.400	APBD
2	Sasaran 2 : Terwujudnya Daya Saing SDM		
1)	Program Pengelolaan Pendidikan	111.585.583.887	APBD
2)	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	980.142.240,00	APBD
3)	Program Pembinaan Perpustakaan	878.464.432	APBD
4)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	24.141.787.825	APBD
5)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	465.497.844	APBD
3	Sasaran 3 : Terwujudnya daya saing Infrastruktur		
1)	Program Penyelenggaraan Jalan	969.849.750	APBD
2)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.572.088.490	APBD
3)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	12.065.426.549	APBD
4)	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Tidak ada kegiatan	
5)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8.253.046.580	APBD

6)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.906.387.066	APBD
7)	Program Pengelolaan Pelayaran	184.760.080	APBD
9)	Program Aplikasi Informatika	239.801.000,00	APBD
Terwujudnya Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan			
4	Sasaran 4 : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata		
1)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	209.998.210	APBD
2)	Program Kawasan Permukiman	3.489.040.985	APBD
3)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	229.999.960	APBD
5	Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		
1)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	327.499.198	APBD II
2)	Program Pengelolaan Persampahan	4.184.799.245	APBD II
3)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	835.681.435	APBD
Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas			
6	Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat		
1)	Program Pengelolaan Pendidikan	112.324.347.117	APBD
2)	Program Pengembangan Kurikulum	74.998.325	APBD
3)	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	134.641.650	APBD
7	Sasaran 7 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		
1)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinkes)	100.293.906.981	APBD
2)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RS)	9.909.659.700	APBD II/BLUD

3)	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	443.992.740	APBD
4)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	185.632.000	APBD
5)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinkes)	7.204.849.230	APBD
6)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (RS)	4.427.119.920	APBD II
8	Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk dan layanan KB		
1)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.290.972.559	APBD (DAU/DAK)
9	Sasaran 9 : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat		
1)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	209.998.210	APBD
2)	Program Rehabilitasi Sosial	536.995.880	APBD
10	Sasaran 10 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak		
1)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	74.999.076	APBD
2)	Program Perlindungan Perempuan	70.000.000	APBD
3)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	49.999.900	APBD
11	Sasaran 11 : Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah		
1)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.199.995.711,00	APBD
2)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.049.999.330,00	APBD
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			

12	Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
1)	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	1.297.708.890,00	APBD
2)	Program Pendaftaran Penduduk	328.996.500	APBD II
3)	Program Pencatatan Sipil	99.996.100	APBD II
4)	Program Pelayanan Penanaman Modal	90.000.005	APBD
5)	Program Kepegawaian Daerah	1.307.495.238	APBD
6)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.049.994.950	APBD
7)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	808.738.193	APBD II
8)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	224.999.000	APBD II
9)	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	714.993.900	APBD
10)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	727.891.130	APBD
	Program Perumusan Kebijakan	267.746.600	APBD
11)	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	35.865.514.129	APBD
12)	Program Informasi dan Komunikasi Publik	131998240	APBD
13)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1.805.796.150	APBD
14)	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	561.989.295	APBD
15)	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	219.984.850	APBD
16)	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	808.358.598	APBD
17)	Program Penanggulangan Bencana	554.996.880	APBD

18)	Program Penanganan Bencana	329.998.170	APBD
19)	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	349.999.589	APBD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Flores Timur memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Salah satu kewajiban tersebut adalah Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap tahun sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dapat memberikan gambaran tentang rencana kinerja yang hendak dilaksanakan dalam satu anggaran yang merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Gambaran tentang Rencana Kinerja Tahunan dimaksud agar semua stakeholders dapat mengetahui komitmen Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan tahapan pelaksanaan perencanaan yang telah tertuang dalam Dokumen RPD untuk diwujudkan setiap tahun.

Pencapaian Tujuan dan Sasaran dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan guna menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi di daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini adalah sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Rencana Kinerja yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

- Adapun Tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini adalah :
- a. Untuk menyajikan informasi tentang Rencana Kinerja Tahunan sesuai Dokumen Rencana Pembangunan Daerah kepada semua Stakeholders khususnya kepada Pemerintah Daerah.
 - b. Untuk melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3.1 Kedudukan

Kedudukan Pemerintah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai Daerah Otonom, yakni Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.3.2 Tugas Pokok Dan Fungsi

Untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai penjabaran lebih lanjut atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang mengatur tentang kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur terdiri dari :

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar :

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Urusan Pemerintahan pilihan, meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Selanjutnya berbagai kewenangan tersebut dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, dalam rangka mewujudkan upaya mencerdaskan, mensejahterakan dan melindungi masyarakat kabupaten melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat secara profesional, akuntabel, transparan dan partisipatif.

1.3.3 Struktur Organisasi

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur telah mengalami perubahan, seiring adanya kebijakan politik, untuk melakukan penataan birokrasi termaksud didalamnya, penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Flores Timur, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Adapun Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dimaksud sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur staf yang diwadahi dalam Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelayanan administrasi dan memberi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang diwadahi dalam Sekretariat DPRD Tipe C;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam Inspektorat Daerah Tipe A;
4. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana yang diwadahi dalam dinas- dinas daerah, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan serta urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- f Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
- i Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- k Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- l Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
- m Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
- n Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
- o Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur

- Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- p. Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - q. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - r. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Pangan;
 - s. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Perkebunan dan Peternakan;
 - t. Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan sub urusan Perikanan; dan
 - u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan.
5. Badan Daerah merupakan unsur penunjang yang diwadahi dalam badan-badan daerah, terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan Pembangunan, serta fungsi penunjang urusan Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan, sub urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - c. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan, sub urusan Pendapatan; dan
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

6. Kecamatan, terdiri dari:

- a Kecamatan Larantuka dengan Tipe A;
- b Kecamatan Adonara Timur dengan Tipe A;
- c Kecamatan Adonara Barat dengan Tipe A;
- d Kecamatan Adonara dengan Tipe A;
- e Kecamatan Adonara Tengah dengan Tipe A;
- f Kecamatan Kelubagolit dengan Tipe A;
- g Kecamatan Witihamo dengan Tipe A;
- h Kecamatan Ile Boleng dengan Tipe A;
- i Kecamatan Wotan Ulumado dengan Tipe A;
- j Kecamatan Tanjung Bunga dengan Tipe A;
- k Kecamatan Wulanggitan dengan Tipe A;
- l Kecamatan Titehena dengan Tipe A;
- m Kecamatan Lewolema dengan Tipe A;
- n Kecamatan Ile Mandiri dengan Tipe A;
- o Kecamatan Ile Bura dengan Tipe A;
- p Kecamatan Demon Pagong dengan Tipe A;
- q Kecamatan Solor Timur dengan Tipe A;
- r Kecamatan Solor Barat dengan Tipe A; dan
- s Kecamatan Solor Selatan dengan Tipe A.

1.4

Permasalahan Daerah

Berdasarkan gambaran umum daerah dan hasil evaluasi kinerja Pembangunan Daerah, maka teridentifikasi berbagai permasalahan yang menjadi perhatian di tahun 2023 sebagai berikut:

1.4.1 Permasalahan Terkait Program Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan kajian terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta RPJPD tahun 2005-2025 yang disajikan dalam gambaran umum kondisi daerah. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah tersebut maka dirumuskan beberapa permasalahan Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

- 1) Rendahnya daya saing daerah khususnya di bidang ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur;

- 2) Kemiskinan, stunting dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat semakin lebar;
- 3) Menurunnya kualitas lingkungan hidup;
- 4) Menurunnya kualitas layanan pendidikan masyarakat;
- 5) Menurunnya kualitas layanan kesehatan masyarakat;
- 6) Rendahnya derajat kesehatan masyarakat;
- 7) Rendahnya kesejahteraan sosial masyarakat;
- 8) Pengaruh utama gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum maksimal;
- 9) Menurunnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dan;
- 10) Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum maksimal.

1.4.2 Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

A. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- Layanan pendidikan belum berjalan sesuai harapan. Hal ini ditandai dengan rendahnya angka partisipasi sekolah;
- Jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan masih kurang dan belum memenuhi standar serta belum memadai kebutuhan tumbuh kembang anak. Selain itu fasilitas penunjang pendidikan termasuk pengembangan laboratorium dan perpustakaan sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
- Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pengembangan wajib belajar 12 tahun terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum berjalan sesuai harapan;
- Kompetensi dan jumlah tenaga pendidik kurang memadai
- Masih rendahnya aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi serta sumber daya pendukung.

2. Kesehatan

- Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) hamil dan melahirkan relatif tinggi, serta adanya kecenderungan meningkatnya kejadian kehamilan remaja di bawah usia 20 tahun;

- Kerawanan gizi yang ditunjukkan dengan masih banyaknya ibu hamil mengalami kondisi kurang energi kronis, masih terdapat bayi dan balita dalam keadaan gizi buruk dan kurang gizi;
- Belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya;
- Masih rendahnya kualitas tenaga kesehatan, serta masih terbatasnya kuantitas tenaga kesehatan dengan basis ilmu tertentu seperti gizi, kesehatan lingkungan dan manajemen kesehatan;
- Pandemi Covid-19 masih mewabah serta adanya penyakit *endemik* yang berjangkit dan sulit dikendalikan karena pengaruh perubahan cuaca seperti infeksi saluran pernapasan akut, demam berdarah, penyakit infeksi khronis seperti TBC, HIV dan malaria.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pembanguana terus dilaksanakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Namun demikian, upaya-upaya itu belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan infrastruktur daerah.

Infrastruktur belum mampu memberi dukungan maksimal terhadap upaya menciptakan transportasi yang aman, efisien dan efektif.

Permasalahan transportasi darat adalah tingginya tingkat kerusakan jalan akibat longsir dan banjir, rendahnya akses jalan menuju kantong-kantong produksi serta minimnya ketersediannya sarana transportasi darat untuk daerah pedalaman. Sementara itu permasalahan transportasi laut adalah belum memadainya kualitas sarana dan daya tampung ruang kota. Sedangkan permasalahan transportasi udara adalah panjang landasan yang tidak memungkinkan untuk didarati jenis pesawat terbang berukuran besar. Berbagai permasalahan transportasi di atas memberikan dampak terhadap mahalnya biaya dan tidak efektifnya transportasi.

Daya dukung sumber air baku untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat belum optimal. Saluran irigasi belum mampu

memenuhi kebutuhan air bagi kegiatan budidaya pertanian. Masih tersedia lahan potensial yang cukup untuk perluasan areal budidaya pertanian namun belum terlayani jaringan irigasi teknis. Selain itu ketersediaan air baku juga belum mampu mengatasi kebutuhan air bersih yang terus meningkat sejalan dengan terus bertambahnya jumlah penduduk.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kebutuhan akan perumahan layak huni dan lingkungan permukiman yang berkualitas juga belum teratasi secara optimal. Pemenuhan kebutuhan hunian layak masih dihadapkan pada rendahnya tingkat keterjangkauan rumah layak bagi masyarakat. Masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah menetap pada rumah tidak layak huni dan sebagiannya tidak memiliki rumah. Kebutuhan akan rumah bagi masyarakat terus meningkat yang tidak diiringi dengan kemampuan orang yang memiliki rumah sehingga meningkatkan jumlah rumah tangga sharing. Hal ini memberi dampak pada penurunan kualitas rumah dan menciptakan rumah tidak layak huni baru.

Minimnya ketersediaan sarana prasarana dasar memberikan dampak pada tidak berkurangnya lingkungan kumuh bahkan memungkinkan terciptanya lingkungan kumuh baru. Kinerja pelayanan air bersih/minum masih perlu ditingkatkan dalam rangka mencapai target *universal acces*. Demikian juga pada sektor sanitasi yang meliputi limbah domestik, sampah dan drainase. Prasarana permukiman lain seperti jalan lingkungan, talud pengaman permukiman dari longsor dan abrasi serta ketersediaan listrik juga belum menunjukkan kinerja optimal sehingga memberi dampak pada penurunan kualitas lingkungan.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Pengamanan dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur perlu ditingkatkan
- Perlu diadakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Konflik sosial antar kampung, batas wilayah dan hak ulayat perlu dicegah.

6. Sosial

- Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar bagi pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masih kurang dan belum optimal peran berbagai pihak termasuk masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat yang belum efektif
- Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal
- Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia, didukung prasarana yang memadai dan berkualitas, serta dengan mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial belum berjalan seperti yang diharapkan
- Pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja relatif tinggi.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 - 2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap empat tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1 Visi

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan pada periode lima tahunan terakhir dalam rangka pencapaian visi RPJPD Kabupaten Flores Timur tahun 2005-2025. Visi tersebut adalah **“Flores Timur yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, dan Berdaya Saing”**.

Berdasarkan visi tersebut, sasaran pembangunan jangka menengah tahap keempat/ terakhir yang ingin dicapai adalah:

- 1) Terwujudnya jaminan kehidupan bermartabat

- 2) Meningkatnya kemampuan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan
- 3) Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkendali
- 4) Meningkatnya kualitas SDM
- 5) Tersedianya tenaga kerja produktif di sektor usaha ekonomi daerah
- 6) Meningkatnya infrastruktur dasar dan transportasi untuk mendukung perekonomian daerah
- 7) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
- 8) Meningkatnya kesejahteraan sosial

Mengacu pada sasaran pembangunan di atas, serta memperhatikan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi, kondusif faktual, permasalahan dan isu-isu strategis maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan melalui pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai dan rasional, untuk dapat dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Sasaran merupakan gambaran dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program pembangunan daerah. Capaian sasaran pembangunan selain menunjukkan tercapainya tujuan pembangunan jangkauan jangka menengah daerah, juga berisikan sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Dengan demikian capaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah melalui RPD tahun 2023-2026 merupakan kontribusi periode terakhir untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang (RPJPD) tahun 2005-2025. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan tujuan dan

sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Terwujudnya daya saing daerah

Sasaran :

1) Terwujudnya daya saing ekonomi

Indikator Kinerja :

- a. Persetasi lembaga petani tingkat madya
- b. Rasio penyuluh perdesa
- c. Cakupan pemenuhan sarana pertanian
- d. Cakupan pemenuhan prasarana pertanian
- e. Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap
- f. Persentasi hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan
- g. Persentasi UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki badan hukum
- h. Persentase industri skala kecil dan menengah yang mengelolah hasil pertanian
- i. Cakupan sarana distribusi perdagangan
- j. Terkendalnya harga barang (perbandingan harga pasar dengan harga dasar (Laporan)
- k. Cakupan IKM yang difasilitasi
- l. Persentasi pengembangan iklim penanaman modal
- m. Persentase fasilitasi pelayanan perizinan
- n. Persentase prasarana dan sarana pariwisata
- o. Persentase SDM pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya
- p. Persentase promosi dan pemasaran pariwisata
- q. Persentase BUMDES aktif
- r. Persentase peningkatan desa tertib administrasi
- s. Persentase aparatur desa yang ditingkatkan kapasitasnya
- t. Persentase desa yang PADesanya meningkat

2) Terwujudnya daya saing SDM

Indikator Kinerja :

- a. APK PAUD
- b. APK SD
- c. APM SD

- d. APK SMP
- e. APM SMP
- f. Penurunan buta huruf
- g. Angka DO
- h. Angka melanjutkan pendidikan SD ke SMP
- i. Angka melanjutkan pendidikan SMP ke SMA
- j. Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik
- k. Angka kelulusan (AL) SD/MI
- l. Angka kelulusan SMP/MTS
- m. Persentase PAUD terakreditasi B
- n. Persentase SD terakreditasi minimal B
- o. Persentase SMP terakreditasi minimal B
- p. Jumlah siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa (mahasiswa)
- q. Cakupan penyelenggaraan perpustakaan
- r. Cakupan PHBS
- s. Cakupan penanganan penyakit menular
- t. Cakupan penanganan penyakit tidak menular
- u. Persentase puskesmas yang terakreditasi utama
- v. Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar
- w. Angka gizi buruk
- x. Cakupan desa/kelurahan STBM
- y. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
- z. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
- aa. Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar
- ab. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
- ac. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
- ad. Cakupan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar
- ae. Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
- af. Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar
- ag. Cakupan pelayanan vaksin covid-19
- ah. Persentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan

- ai. Persentasi angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan
- aj. Persentasi pemenuhan sarana pelatihan BLK
- 3) Terwujudnya daya saing infrastruktur
 - a. Persentasi jalan yang ditangani
 - b. Persentasi irigasi kondisi baik (Bendungan)
 - c. Persentasi penduduk berakses air minum
 - d. Persentasi sarana dan prasarana sampah
 - e. Akses limbah domestik layak
 - f. Persentasi peningkatan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik
 - g. Persentasi peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik
 - h. Persentasi pengadaan tanah pemda yang difasilitasi
 - i. Persentasi peningkatan jaringan intra pemerintah

Tujuan 2 : Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan

Sasaran :

- 1) Terpenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata

Indikator Kinerja :

- a. Persentasi anak terlantar yang ditangani
- b. Cakupan rumah layak huni
- c. Cakupan PSU

- 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator Kinerja :

- a. Kualitas lingkungan hidup
- b. Presentase kualitas dan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup
- c. Persentasi penanganan pengaduan masyarakat
- d. Persentasi dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- e. Prosentase usaha yang memiliki persetujuan lingkungan
- f. Prosentase pengelolaan keanekaragaman hayati
- g. Cakupan pencegahan dan penanggulangan pencemaran daya alam dan lingkungan

- h. Prosentase penanganan dan pengelolaan sampah
- i. Prosentase ketaatan usaha/ kegiatan terhadap pengelolaan B3
- j. Ratio fungsi laboratorium lingkungan hidup.

Tujuan 3 : Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas

Sasaran :

- 1) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat

Indikator Kinerja :

- a. APK PAUD
 - b. APM PAUD
 - c. APK SD
 - d. APM SD
 - e. APK SMP
 - f. APM SMP
 - g. Penurunan buta huruf
 - h. Angka DO
 - i. Angka melanjutkan pendidikan SMP ke SMA
 - j. Persentasi sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik
 - k. Angka kelulusan (AL) SD/MI
 - l. Persentasi PAUD terakreditasi B
 - m. Persentasi SD terakreditasi minimal B
 - n. Persentasi SMP terakreditasi minimal B
 - o. Cakupan tenaga pendidikan dan kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Indikator Kinerja :

- a. Cakupan PHBS
- b. Cakupan penanganan penyakit menular
- c. Cakupan penanganan penyakit tidak menular
- d. Persentasi puskesmas yang terakreditasi utama
- e. Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar
- f. Angka gizi buruk
- g. Cakupan desa/kelurahan STBM
- h. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

- i. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
 - j. Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar
 - k. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
 - l. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
 - m. Cakupan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar
 - n. Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar
 - o. Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar
 - p. Cakupan pelayanan vaksin covid-19
 - q. Persentasi penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan
 - r. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan miskin
 - s. Persentasi penerapan SOP
 - t. Cakupan pemulihan kesehatan
 - u. Cakupan penerapan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi
 - v. Cakupan mutu pelayanan RS
 - w. Persentasi sarana/prasarana RS dalam kondisi baik
 - x. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
 - y. Persentasi penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan
 - z. Cakupan pengawasan obat dan makanan
 - aa. Cakupan desa yang menerapkan PERDES KIBBLA
 - ab. Persentasi tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas
- 3) Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk dan layanan KB
- Indikator Kinerja:
- a. Cakupan PUS peserta KB aktif
 - b. Cakupan akseptor baru
- 4) Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
- Indikator Kinerja:
- a. Persentase anak terlantar yang ditangani
 - b. Persentasi fakir miskin yang mendapatkan bantuan
 - c. Persentasi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas
- 5) Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak
- Indikator kinerja:
- a. Persentasi perempuan yang berpartisipasi disektor publik

- b. Persentasi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terselesaikan
 - c. Persentasi kasus kekerasan terhadap anak
 - d. Persentasi desa/kelurahan layak anak
- 6) Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
- Indikator:
- a. Persentasi organisasi pemuda yang aktif
 - b. Persentasi pemuda yang menjadi wirausaha mandiri
 - c. Persentasi fasilitas olahraga yang memenuhi standar

Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran :

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- Indikator Kinerja :
- a. Cakupan penerapan SPM sesuai standar
 - b. Cakupan penerapan SOP sesuai standar
 - c. Rasio penduduk ber-KTP
 - d. Rasio penduduk ber-KK
 - e. Rasio anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA
 - f. Rasio penduduk ber-AKTA kelahiran
 - g. Rasio penduduk ber-AKTA nikah
 - h. Persentasi fasilitas pelayanan perizinan
 - i. Persentasi ASN yang memiliki sertifikat fungsional sesuai jabatan
 - j. Persentasi ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai jabatan
 - k. Persentasi peningkatan PAD
 - l. Persentasi penatausahaan keuangan
 - m. Persentasi penatausahaan aset
 - n. Persentasi tindak lanjut LHP
 - o. Persentasi keterlibatan lembaga politik dalam pendidikan politik masyarakat
 - p. Cakupan layanan media komunikasi dan informasi publik
 - q. Persentasi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD

- r. Persentasi realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD
- s. Persentasi konsistensi program kegiatan RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja
- t. Persentasi kasus sosial yang ditangani
- u. Persentasi kasus kriminal yang ditangani
- v. Persentasi peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- w. Persentasi penurunan resiko bencana
- x. Persentasi cakupan penanganan bencana
- y. Persentasi cakupan rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana
- z. Persentasi pelayanan dan penanganan sosial korban bencana
- aa. Persentasi desa/kelurahan siaga bencana
- ab. Jumlah penelitian yang dimanfaatkan
- ac. Jumlah inovasi yang dihasilkan
- ad. Persentasi BUMDES aktif
- ae. Persentasi peningkatan desa tertib administrasi
- af. Persentasi aparatur desa yang ditingkatkan kapasitasnya

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rencana hasil yang akan dicapai Pemerintah Kabupaten Flores Timur selama satu tahun anggaran. RKT ini ditetapkan sebagai implementasi dari RPD tahun 2023-2026 untuk mendukung 12 sasaran strategis, dengan tetap mempertimbangkan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi serta tetap berpedoman pada kebijakan Pemerintah, dengan tidak mengurangi esensi Perencanaan Strategis tersebut.

Dalam penyusunan RKT Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Flores Timur selain memperhatikan program-program juga memperhatikan target capaian kinerja masing-masing program tersebut, yang nantinya akan dituangkan dalam dokumen "Perjanjian Kinerja". Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun tujuan khusus dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; serta
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Untuk itu, RKT Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

3.1

Rencana Kinerja Tahunan Kab. Flores Timur Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
I.	BIDANG PENDIDIKAN		
1.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Rata-rata lama sekolah	8,34 %
2.	Meningkatnya angka harapan lama sekolah	Angka harapan lama sekolah	13,96 %
3.	Meningkatnya angka melek huruf	Angka melek huruf	99,56
4.	Menurunnya angka drop out	Angka drop out	1,17 %
5.	Meningkatnya APK PAUD/TK	APK PAUD/TK	57,74 %
6.	Meningkatnya APK SD/MI/ Paket A	APK SD/MI/ Paket A	89,23 %
7.	Meningkatnya APK SMP/MTs/ Paket B	APK SMP/MTs/ Paket B	68,33 %
11.	Tercapainya angka melanjutkan pendidikan SD ke SMP yang ideal	Angka melanjutkan pendidikan SD ke SMP	100%
12.	Tercapainya angka melanjutkan pendidikan SMP ke SMA yang ideal	Angka melanjutkan pendidikan SMP ke SMA	100%
2.	BIDANG KESEHATAN		
1.	Angka harapan hidup	1. UHH	6,1
		2. AKI/100.000KLH	99
		3. Pelayanan kesehatan ibu hamil	100
		4. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100
		5. Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100
		6. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	98,7
2.	Angka kematian ibu	7. Cakupan pelayanan nifas	97
		8. Persentasi ibu hamil KEK	15
		9. Persentase ibu hamil kurang energi kronik mendapat makanan tambahan	98
		10. Persentasi ibu hamil anemia	35
		11. Cakupan ibu hamil mendapat tablet fe 90 tablet	95
		12. Persentasi puskesmas yang menyelenggarakan kelas ibu hamil	21

3	Angka kematian bayi	1. Angka kematian nasional per 1000 kelahiran hidup	10
		2. Persentasi puskesmas dengan tempat tidur yang memberikan pelayanan dengan kegawatdaruraan maternal dan neonatal	40
		1. AKB KLH	8,7
		2. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100
		3. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	75
		4 Cakupan kungan nasional pertama	99,9
		5. Angka kelangsungan hidup bayi	1-8,7
		6. Cakupan kunjungan bayi	92
		7. Cakupan bayi dengan BBLR	5
4.	Prevalensi stanting	1. Angka kematian balita per 1000 kelahiran bayi	17,4
		2. Persentase Puskesmas yang melakukan pendekatan MTBS	33
		3. Persentase Puskesmas yang melaksanakan SDIDTK	100
		4. Pelayanan kesehatan balita	100
		5. Prevalensi stunting	8
		6. Angka gizi buruk	0,2
		7. Prevelensi kekurangan gizi	7
		8. Prevalensi underweight	18
		9. Cakupan balita gizi kurang mendapat PMT pemulihan	60
		10. Cakupan balita yang mendapat KMS	100
		11. Cakupan balita yang ditimbang di posyandu (N/D)	96
		12. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100
		13. Persentase bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini (IMD)	85
		14. Cakupan bayi 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	85
		15. Cakupan balita 6-59 bulan mendapat vitamin A	99

		16. Cakupan rumah tangga mengkonsumsi garam lodium	40
		17. Cakupan remaja putri mendapat tablet tambah darah	70
5.	Indeks keluarga sehat	1. Cakupan peserta KB aktif	35
		2. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	100
		3. Pelayanan kesehatan usia produktif	100
		4. Pelayanan kesehatan usia lanjut	100
		5. Indeks keluarga sehat	0,46
		6. Cakupan desa siaga aktif	84
		7. Rasio posyandu per satuan balita	28,30
		8. Persentase posyandu purnama + mandiri	82
		9. Cakupan puskesmas yang menerapkan kebijakan GERMAS	45
		10. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	82
		11. Persentase rumah tangga dengan air minum bersih	79
		12. Persentase tempat – tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	94
		13. Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	70
		14. Cakupan rumah sehat	65
		15. Cakupan pemeriksaan test kebugaran	10
		16. Cakupan pos UKK	42
6.	Angka Kesakitan	1. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100
		2. Prevalensi tuberkulosis	80
		3. Angka keberhasilan pengobatan penderita TB	90
		4. Persentase penemuan penderita baru TB	25
		5. Angka notifikasi semua kasus TB (CNR)	65

		6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100
		7. Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV	4
		8. Persentase penemuan dan pengobatan kasus pneumonia pada balita	100
		9. Persentase demam berdarah dengue (DBD) yang ditangani	100
		10. Persentase angka kematian rabies per 10.000 penduduk	0
		11. Persentase penemuan kasus diare	7
		12. Angka kejadian malaria (AP) /1000 penduduk	0,4
		13. Cakupan ABER	30
		14. Tingkat kematian akibat malaria	0,5
		15. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta /10.000 penduduk	13
		16. Angka kesembuhan kusta (RFT)	100
		17. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	100
		18. Persentase angka kasus HIV yang diobati	70
		19. Prevalensi HIV/AIDS	0,053
		20. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan pos pembinaan terpadu (Posbindu) PTM	100
		21. Pelayanan kesehatan hipertensi	100
		22. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100
		23. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	100
7.	Umur Harapan Hidup	1. Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	35
		2. Persentase penderita gangguan mental emosional pada penduduk usia >15 tahun yang mendapat	25

		elayanan sesuai standar	
		3. Persentase fasyankes yang menyelenggarakan layanan upaya berhenti merokok	55
		4. Persentase sekolah atau TTU yang menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR)	10
		5. Persentase puskesmas yang melaksanakan posyandu PTM	100
		6. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	90
		7. Cakupan desa uci	85
		8. Cakupan vaksinasi Covid-19	80
		9. Rasio rumah sakit persatuan penduduk	0,00043
		10. Cakupan puskesmas	110,5
		11. Cakupan puskesmas pembantu	21,83
		12. Cakupan angka kontak peserta BPJS/1000	150
		13. Ratio peserta prolaris yang terkendali	5%
		14. Ratio rujukan rawat jalan non spesialis	$\leq 2 \%$
		15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	17,75
		16. Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	38,09
		17. Rasio dokter umum	11
		18. Rasio dokter gigi	4
		19. Rasio perawat	87
		20. Rasio bidan	92
		21. Rasio apoteker	16
		22. Rasio tenaga nutrisisionis	11
		23. Rasio tenaga sanitasi lingkungan	20
		24. Rasio tenaga pronkes dan ilmu perilaku	9
		25. Tenaga ahli teknologi laboratorium medik	74
		26. Tenaga terapis gigi mulut	88
		27. Tenaga elektromedik	24

		28. Tenaga rekam medik	24
		29. Tenaga fisioterapis	50
		30. Tenaga sistem informasi kesehatan	24
		31. Tenaga manajemen farmasi	50
		32. Tenaga kesehatan masyarakat	60
		33. Tenaga administrasi keuangan	24
		34. Tenaga informatika	10
		35. Tenaga hukum kesehatan	50
		36. Tenaga ketatausahaan	24
		37. Cakupan tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan formasi strata 1	32
		38. Cakupan tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan profesi	21
		39. Cakupan tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan formal	13
8.	Umur Harapan Hidup	1. Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas	96
		2. Cakupan ketersediaan peralatan kesehatan di puskesmas	82
		3. Cakupan pengawasan mutu obat, sediaan farmasi dan produk pangan	75

3.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.	Meningkatkan kualitas kemantapan jalan dan jembatan	Tingkat kemantapan jalan	75,58%
2.	Meningkatnya jaringan irigasi (Bendunga)	Persentasi jaringan irigasai irigasi	54,55%
3.	Meningkatnya akses air minum aman	Akses air minum aman	89,16%
4.	Meningkatnya akses sanitasi aman dan layak	Akses sanitasi aman dan layak	81,66%

4.	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.	Jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun	Jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/terreview/terlegalisasi	dokumen
2.	Terlaksananya pembangunan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	unit

3.	Terlaksananya urusan penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas (PSU)	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	Lokasi
4.	Tersusunnya dokumen penyelesaian sengketa tanah garapan	Jumlah data sengketa, konflik dan perkara dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	dokumen
5.	Tersusunnya dokumen sidang panitia pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah	Jumlah dokumen sidang panitia pertimbangan Landerform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah	dokumen
5.	BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN		
1.	Penaanggun gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengaman dan pengawalan	5 kasus
		Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penrtiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	5 kasus
		Jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	5 dokumen
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	15 orang
		Jumlah dokumen hasil kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	5 dokumen
6.	BIDANG SOSIAL		
1.	Menurunnya persentasi PMKS	persentasi PMKS	9,38%
2.	Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentasi tingkat kemiskinan	9,85%
B.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
I.	BIDANG TENAGA KERJA		

1.	Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi 2. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur serta sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	25 Orang 5 Lembaga
2.	Penempatan tenaga kerja	1. Pelayanan Antar Kerja 2. Pengawasan dan Pengendalian LPTKS 3. Pemeliharaan dan Operasional Apikasi Informasi Pasar Kerja Online 4. Penyediaan Layanan Terpadu Calon Pekerja Migran 5. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penetapan	100 Orang 2 Lembaga 1 Dokumen 200 Orang 15 Orang
3.	Hubungan industrial	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu Daerah kab/kota 3. Penyelesaian Perselisiahn Hubungan Industri, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat pada kepentingan di satu Daerah Kabupaten/Kota 4. Penyelesaian Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada Organisasi pengusaha, Federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat Buruh serta Non Afiliasi 5. Pengembangan Pelaksanaan jaminan Sosial Tenga Kerja dan Fasilitas kesejahteraan Pekerja	10 perusahaan 20 Perkara 10 Perkara 6 Asosiasi dan Serikat Pekerja 50 Orang

4.	Ketransmigrasian	1. Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi 2. Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 3. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	2 dokumen 50 KK 2 Satuan Pemukiman
2.	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1.	Meningkatkan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan	1. Indeks pembangunan gender 2. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 3. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	93,16 % 19 % 23 %
3.	BIDANG PANGAN		
1.	Terwujudnya daya saing ekonomi	1. Pelaksanaan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup wilayah daerah kabupaten - Beras / jagung giling 2. Pengadaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota - Beras jagung/ jagung giling 3. Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan (NBM) 4. Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan 5. Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan ketentraman pangan 6. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun 7. Peningkatan ketahanan pangan - Keluarga - Belanja bahan bibit tanaman 8. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhsn daerah Kabupaten/Kota 9. Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota 10. Pemberdayaan masyarakat dalam	1.500Kg 2.050 Kg 4 laporan 4 dokumen 13 dokumen 3 dokumen 6 keluarga 1 paket 10 dokumen 1 sertifikat

		5. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/kota dalam Penertiban Informasi Adm. Kependudukan (Laporan) 6. Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen) 7. Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan) 8. Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (Dokumen)	12 Laporan 5 Dokumen 2 Laporan 100 Dokumen
6.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa Meningkatkan Perekonomian Desa	1. Persentase Desa yang melakukan Penataan Dea 2. Presentase Peningkatan Desa yang tertib Administrasi 1. Persentase BUMDes yang Aktif 2. Persentase Desa yang PADesnya Meningkat	11,11% 74,67% 51,97% 10,53%
7.	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1.	Meningkatkan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Menurunkan angka kelahiran total (THFR)	7 dokumen
8.	BIDANG PERHUBUNGAN		
1.	Meningkatnya penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan	Persentase peningkatan penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan	52%
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pelayaran	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan pelayaran	30,5%
9.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1.	Meningkatnya Kualitasnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Media Komunikasi dan Informasi Publik	40%
2.	Terwujudnya Daya Saing Infrastruktur	Prosentase Peningkatan Jaringan Intra	72,22%

		Pemerintah	
10.	BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
1.	Pengawas dan pemeriksaan koperasi	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota	92 unit usaha
2.	Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Jumlah unit koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	10 unit usaha
3.	Pendidikan dan latihan perkoperasian	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	60 orang
4.	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengemangan ekonomi lainnya	10 keluarga (kelompok embrio)
5.	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	240 unit usaha
6.	Pengembangan UMKM	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM, serta desain dan teknologi pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	16 unit usaha
11.	BIDANG PENANAMAN MODAL		
1.	Persentase sistem investasi yang dibangun	Jumlah dokumen penetapan kebijakan penanaman modal	1 dokumen
2.	Jumlah potensi unggulan daerah yang di promisi	Meningkatnya investasi daerah	1 video promosi
3.	Peningkatan pelayanan perizinan	Jumlah pelayanan perizinan	1.800 izin usaha
4.	Meningkatnya jumlah investor PMA/PMDN	Meningkatnya investasi daerah	-
5.	Terlaksananya sistem pengembangan informasi penanaman modal	Tersedianya sistem pengembangan informasi penanaman modal	1 dokumen
12.	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1.	Meningkatnya persentasi organisasi pemuda yang aktif	Persentase organisasi pemuda yang aktif	49,48%
2.	Meningkatnya persentase wirausaha muda	Persentasi pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	1,74%
13.	BIDANG KEBUDAYAAN		

1.	Pengembangan Budaya Lamaholot secara Strategis dan Terintegrasi	1. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan 2. Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional	3 obyek 20 Orang
2.	Pembinaan Sejarah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	1 dokumen
3.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Perlindungan cagar budaya	12 Obyek
14.	BIDANG PERPUSTAKAAN		
1.	Terwujudnya daya saing SDM	1. Jumlah perpustakaan yang dikembangkan ditingkat daerah Kabupaten/Kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya 2. Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan 3. Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota 4. Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan 5. Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan 6. Jumlah perpustakaan yang di bangun di Tempat – tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 7. Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar	4 perpustakaan 20 perpustakaan 20 orang 140 eksemplar 15 lokus 1 perpustakaan 24 Orang

		Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	
15	BIDANG KEARSIPAN		
1.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan 2. Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan 3. Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	140 berkas 20 berkas 1 laporan
2.		1. Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	20 Laporanann
C.	URUSAN PILIHAN		
I.	BIDANG PERIKANAN		
1.	Meningkatnya produksi	1. Jumlah data dan informasi sumber daya ikan dan perairan darat dalam satu kabupaten/kota yang tersedia 2. Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia 3. Jumlah SOP dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 dokumen 1173 Unit 4 Dokumen
2.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	1. Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas 2. Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota 3. Jumlah hasil ikan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	246 kelompok 246 Kelompok 1 Dokumen
3.	Meningkatnya pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten kota	1 dokumen
4.	Meningkatnya produksi dan diverifikasi pangan	1. Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengelolaan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan	1 dokumen

		risiko 2. Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota yang terfasilitasi	95 Pelaku Usaha
2.	BIDANG PARIWISATA		
1.	Meningkatnya industri pariwisata	1. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota 2. Penyediaan layanan pendaftaran usaha	4 Objek 4 Dokumen
2.	Pemasaran Pariwisata	1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri 2. Fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota 3. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Promosi
3.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Fasilitas pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif 2. Pengembangan kapasitas SDM pariwisata berbasis SKKNI	20 Orang 2 Orang
3.	BIDANG PERTANIAN		

	Energi dan air	dan air	
5.	BIDANG PERDAGANGAN		
1.	Terbinanya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar) Terkendalnya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	1. Jumlah laporan Pembinaan dan pengembangan kepada pengelola sarana distribusi perdagangan 2. Jumlah laporan Pemantauan Stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 3. Jumlah laporan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan 4. Jumlah laporan Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokume 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
6.	BIDANG PERINDUSTRIAN		
	Meningkatkan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	1. Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota 2. Jumlah dokumen rencana pembangunan Industri 3. Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	12 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
D.	URUSAN PENUNJANG		
1.	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		

1.	Meningkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat	1. Jumlah dokumen laporan triwulan pejabat Bupati 2.)	100%
		2. Jumlah dokumen laporan bulanan Pejabat Bupati	100%
		3. Jumlah dokumen LKPJ Pejabat Bupati Kab. Flores Timur yang disusun (dok)	100%
		4. Terlaksananya kegiatan koordinasi dan fasilitasi urusan Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati/DPRD) dan koordinasi Pemerintahan Umum (kali)	100%
		5. Terlaksananya fasilitasi kegiatan untuk memperingati HUT RI ke-79 Tingkat Kab. Flores Timur (kegiatan)	100%
		6. Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/desa (kecamatan)	100%
		7. Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan batas administrasi wilayah Kab. Flores Timur (Kec)	100%
		8. Jumlah LPPD dan ILPPD Kabupaten Flores Timur yang disusun (Dok)	100%
		9. Jumlah evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah yang dilaksanakan (kali)	100%
		10. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi serta monitoring pelaksanaan kerjasama dan otonomi Daerah di Kabupaten Flores Timur (Kali)	100%
		11. Terlaksananya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Dok)	100%
		12. Penyusunan Memori Akhir Masa Jabatan Pejabat Bupati (Dok)	100%
		13. Terlaksananya Pelantikan / Pengukuhan Pejabat Bupati Flores Timur (Paket)	100%

2.	BIDANG PENGAWAS		
1.	Terselenggaranya pengawasan internal	1. Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah 2. Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah 3. Jumlah laporan hasil revidi laporan kinerja 4. Jumlah laporan hasil revidi laporan keuangan 5. Jumlah laporan hasil pengawasan desa 6. Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	13 Laporan 7 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 20 Laporan 16 Laporan
2.	Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	1. Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara / Daerah yang ditangani 2. Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	2 laporan 10 laporan
3.	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Jumlah perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	3 rekomendasi
4.	Terlaksananya pendampingan dan asistensi	1. Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah 2. Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi 3. Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi 4. Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	2 perangkat daerah 5 perangkat daerah 6 kegiatan 8 perangkat daerah

3.	BIDANG PERENCANAAN		
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD 2. Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 3. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan 4. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100% 100% 100%
4.	BIDANG KEUANGAN		
1.	Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase penatausahaan keuangan daerah	55,0%
2.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2. Persentase penatausahaan aset	13,75 Dokumen
5.	BIDANG KEPEGAWAIAN		
1.	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	1. Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis & jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN 2. Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK 3. Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian 4. Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian 5. Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	2 dokumen 2 dokumen 7 dokumen 3 dokumen 4 dokumen
2.	Mutasi dan promosi ASN	1. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	2 dokumen

		2. Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN 3. Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	4 dokumen 3 dokumen
3.	Pengembangan kompetensi ASN	1. Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN 2. Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan 3. Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitas sertifikasi jabatan fungsional ASN	2 dokumen 100 orang 100 orang
4.	Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur 2. Jumlah ASN yang diberikan penghargaan 3. Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	2 dokumen 20 orang 20 laporan
5.	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	1. Jumlah ASN yang tersertifikasi lingkup kabupaten/kota 2. Jumlah Dokumen hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama	20 orang 2 Dokumen

BAB IV

PENUTUP

Dengan telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, diharapkan dapat dijadikan pedoman/Ukuran Kinerja Pelaksanaan Pembangunan yang ada di Kabupaten Flores Timur, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan Perjanjian Kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sejalan dengan penetapan RKT tersebut, diharapkan tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi ditunjang dengan kemampuan yang dapat menunjukan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Semoga dengan tersusunnya Dokumen RKT ini, dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana yang telah tertuang dalam RKT ini, maka diharapkan adanya komitmen dari seluruh aparatur guna bersama-sama melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKT Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Larantuka, 27 Maret 2024

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR



DRS. BORIS ALEXSANDER RIHI, M. SI



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 88 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur, diperlukan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. bahwa Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan merupakan Prosedur Kerja dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area perubahan ketatalaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 71);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur; (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 74);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 81 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Bagian adalah Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
10. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOP-AP adalah Standar Operasional Prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai standarisasi prosedur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh ASN dalam melaksanakan tugas;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ASN dan organisasi secara keseluruhan;
- c. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- d. menjamin konsistensi pelayanan publik, baik dari sisi waktu maupun prosedur;
- e. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan;
- f. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh ASN dalam melaksanakan tugas;
- g. memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh ASN dalam melaksanakan tugas;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Bagian adalah Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
10. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOP-AP adalah Standar Operasional Prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai standarisasi prosedur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh ASN dalam melaksanakan tugas;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ASN dan organisasi secara keseluruhan;
- c. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- d. menjamin konsistensi pelayanan publik, baik dari sisi waktu maupun prosedur;
- e. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan;
- f. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh ASN dalam melaksanakan tugas;
- g. memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh ASN dalam melaksanakan tugas;

- h. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
- i. memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi; dan
- j. membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan sehingga dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berasaskan:

- a. Kemudahan dan kejelasan
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh ASN.
- b. Efisiensi dan efektifitas
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas.
- c. Keselarasan
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait.
- d. Keterukuran
Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilan.
- e. Dinamis
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- f. Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna (*customer's needs*) sehingga dapat memberikan *kepuasan* kepada pengguna.
- g. Kepatuhan hukum
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan *sesuai* Peraturan Perundang-undangan.
- h. Kepastian hukum
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati dan dilaksanakan.

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Subyek dan Obyek; dan
- b. Jenis SOP-AP.

BAB III SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 6

- (1) Subyek SOP-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah ASN.
- (2) Obyek SOP-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah setiap jenis tugas dan fungsi ASN.

BAB IV JENIS STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 7

- (1) SOP-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bagian Kesejahteraan Rakyat:
 1. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan manasik haji; dan
 2. Pemberian bantuan beasiswa mahasiswa kedokteran.
 - b. Bagian Pemerintahan Umum:
 1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur;
 2. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Flores Timur; dan
 3. Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa/Kelurahan.
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat
Penyusunan Naskah Sambutan/pidato Bupati/Wakil Bupati Flores Timur.
 - d. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 1. Pengiriman Paket Lelang;
 2. Pendistribusian Paket Lelang;
 3. Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa;
 4. Pengiriman Hasil Lelang;
 5. Pengarsipan Paket Lelang;
 6. Kaji Ulang Dokumen Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Barang dan Jasa;
 7. Pendaftaran Penyedia;
 8. Pengajuan Perubahan Data Penyedia;
 9. Perubahan Jadwal Lelang;
 10. Pemeriksaan Fisik Lelang; dan
 11. Penanganan Sanggah dan Pengaduan.
 - e. Bagian Hukum:
 1. Penyusunan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 2. Pembentukan Peraturan Daerah;
 3. Pembentukan Peraturan Bupati;

4. Pembentukan Keputusan Bupati;
 5. Penanganan Perkara;
 6. Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Desa;
 7. Pembentukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 8. Penyusunan Nota Kesepahaman;
 9. Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama;
 10. Penyusunan Lembaran Daerah;
 11. Penyusunan Berita Daerah; dan
 12. Pendokumentasian Produk Hukum Daerah.
- f. Bagian Organisasi:
1. Penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur;
 2. Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Flores Timur;
 3. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
 4. Penyusunan Dokumen Informasi Jabatan Kabupaten Flores Timur;
 5. Penyusunan SOP-AP Daerah;
 6. Penyusunan Dokumen Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur; dan
 7. Penyusunan Dokumen Standar Kompetensi Manajerial (SKM) Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.
- (2) Format Identitas SOP-AP dan Bagan Alir (*Flowcharts*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

SOP-AP yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini karena kekhususannya, tetap mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, ketentuan mengenai SOP-AP Sekretariat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 28 Desember 2018
BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 28 Desember 2018

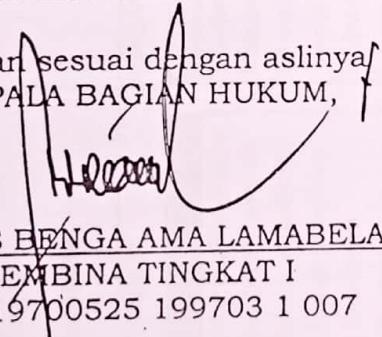
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700525 199703 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Desember 2017

Tanggal Revisi

November 2018

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

BUPATI FLORES TIMUR

Nama SOP

Penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kabupaten 11 Nomor 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur
4. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur

Keterkaitan SOP

1. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)

Peringatan

1. Pelaporan LKIP memiliki batas waktu yang wajib untuk diperhatikan agar tidak sampai terjadi keterlambatan dalam pengiriman LKIP ke Provinsi, Kemenpan dan RB, Kemendagri dan Bappenas

Kualifikasi Pelaksana

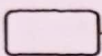
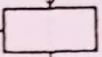
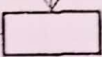
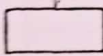
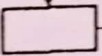
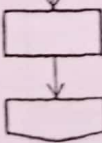
1. Sarjana Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Hukum
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi
3. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait persoalan yang ada
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik
6. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan

Peralatan/ Perlengkapan

Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer, Peraturan Perundangan-undangan terkait, Lembar Kerja/ Rencana Kerja

Pencatatan & Pendataan

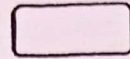
1. Disimpan dalam bentuk file softcopy dan hardcopy
2. Pada proses penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur, data agar dapat diterima dan dihimpun tepat waktu oleh Bagian Organisasi

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Bagian Organisasi	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tim Sekretariat	Tim Penyusun LAKIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur					SK Bupati	15 menit	SK Bupati	Pembentukan Tim dengan SK Bupati
2	Mengonsep surat untuk dikirim kepada SKPD dalam rangka permintaan data kinerja dan Laporan Kinerja SKPD					Konsep Surat Keluar	10 menit	Konsep Surat Keluar	Surat dikonsep Kasubag
3	Mengoreksi surat untuk yang dikonsep Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi					Konsep Surat Keluar	5 menit	Konsep Surat Keluar	Surat telah dikoreksi Kabag
4	Mengetik surat, mengagendakan dan mendistribusikan surat kepada SKPD dan Tim Penyusun dalam rangka permintaan LKIP SKPD serta Rapat awal penyusunan LKIP					Surat Keluar	30 menit	Surat Keluar	Surat siap didistribusi ke SKPD dan Tim Penyusun
5	Memberi petunjuk penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur kepada Kasubag Ketatalaksanaan dan Kinerja dan Staf Bagian Organisasi					Petunjuk teknis penyusunan LKIP	15 Menit	Petunjuk teknis penyusunan LKIP	Persiapan penyusunan LKIP Kabupaten
6	Memberikan pelayanan kepada SKPD terkait konsultasi penyusunan Laporan Kinerja SKPD					Petunjuk teknis penyusunan LKIP	1 minggu	Petunjuk teknis penyusunan LKIP	Persiapan penyusunan LKIP Kabupaten
7	Menerima dan menghimpun dokumen LKIP dari semua SKPD					Petunjuk teknis penyusunan LKIP	1 minggu	Petunjuk teknis penyusunan LKIP	Persiapan penyusunan LKIP Kabupaten

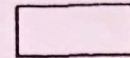
8	Menyusun draf dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur berdasarkan data Laporan Kinerja SKPD				Laporan Kinerja SKPD, Perjanjian Kinerja, RENSTRA SKPD, RPJMD	1 Minggu	Draf Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Penyusunan Draf awal LKIP Kabupaten Flores Timur
9	Mengoreksi draf awal dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya dibahas dan disempurnakan bersama TIM Penyusun LKIP Kabupaten Flores Timur				Laporan Kinerja SKPD, Perjanjian Kinerja, RENSTRA SKPD, RPJMD	1 Minggu	Draf Dokumen LKIP Kab. Flores Timur	Draf Dokumen LKIP Kab. Flores Timur yang sudah dikoreksi
10	Melaksanakan proses penyempurnaan dan perbaikan atas draf LKIP antara lain: Pembahasan terkait finalisasi penyusunan dan rencana kerja TIM, Menganalisa RPJMD dan RENSTRA SKPD, Menyempurnakan draf awal LKIP				Laporan Kinerja SKPD, Perjanjian Kinerja, RENSTRA SKPD, RPJMD	1 Minggu	Draf Dokumen LKIP Kab. Flores Timur	Draf Dokumen LKIP Kab. Flores Timur yang sudah diperbaiki dan disempurnakan
11	Mengirim dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur kepada Inspektorat Kabupaten untuk direview				Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	1 Minggu	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur siap direview
12	Melakukan perbaikan/finalisasi dokumen LKIP sesuai hasil review Inspektorat Kabupaten Flores Timur				Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	1 Minggu	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Finalisasi Dokumen LKIP Kab Flores Timur
13	Mengetik surat pengantar penyampaian LKIP Kabupaten Flores Timur di tingkat Provinsi dan Pusat setelah disetujui dan ditandatangani oleh Bupati Flores Timur				Surat Pengantar Penyampaian LKIP	15 Menit	Surat Pengantar Penyampaian LKIP	Surat Pengantar Penyampaian LKIP di tingkat Provinsi dan Kementerian
14	Penyampaian LKIP Kabupaten Flores Timur kepada Gubernur NTT melalui Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang				Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	4 Hari	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Penyampaian Dokumen LKIP di Provinsi
15	Penyampaian LKIP Kabupaten Flores Timur ke Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas RI di Jakarta				Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	5 Hari	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Penyampaian Dokumen LKIP di Pusat

KETERANGAN SIMBOL FLOWCHARTS:

1. Simbol Kapsul



2. Simbol Kotak



3. Simbol Belah Ketupat



4. Simbol Segilima



5. Simbol Anak Panah



Kegiatan mulai dan berakhir

Proses atau kegiatan eksekutif

Kegiatan pengambilan keputusan

Pindah Halaman

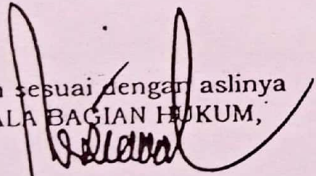
Alur Proses

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA
PEMBINA TK. I
NIP. 19700525 199703 1 007